

Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2012 Audited



**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

BAGIAN ANGGARAN 015



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012
*AUDITED***

Jalan Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2013
Sekretaris Jenderal,

Kiagus Ahmad Badaruddin
MHP 195703291978031001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015) Kementerian Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2013

P/I: Menteri Keuangan,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA II LANTAI 4 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3456546, FAKSIMILE (021) 3847442, SITUS : www.ijen.depkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TAHUN ANGGARAN 2012 (AUDITED)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (Audited) untuk tahun anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2013

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan



Sonny Loho
NIP 195706011979111001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Pernyataan Tanggung Jawab | ii |
| Pernyataan Telah Direviu | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Grafik | x |
| Daftar Lampiran | xi |
| Daftar Singkatan | xii |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 4 |
| II. Neraca | 5 |
| III. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| A.1. Dasar Hukum | 7 |
| A.2. Kebijakan Teknis | 11 |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | 18 |
| A.4. Kebijakan Akuntansi | 19 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 29 |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah | 29 |
| B.2. Belanja Negara | 53 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 81 |
| C.1. Aset Lancar | 82 |
| C.2. Aset Tetap | 110 |
| C.3. Piutang Jangka Panjang | 131 |
| C.4. Aset Lainnya | 133 |
| C.5. Kewajiban Jangka Pendek | 139 |
| C.6. Ekuitas Dana Lancar | 143 |
| C.7. Ekuitas Dana Investasi | 145 |
| D. Catatan Penting Lainnya | 146 |
| E. Pengungkapan Penting Lainnya | 166 |
| E.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK | 166 |
| E.2. Rekening Pemerintah | 166 |
| E.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual | 166 |
| E.4. Barang Tegahan | 167 |
| E.5. Barang Sitaan | 167 |

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-55/PB/2012

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna Tahunan
- Laporan Posisi BMN di Neraca

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Lampiran-Lampiran Lain:

1. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
 - iii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural:
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
3. Laporan Rekening Pemerintah
4. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpjakan
5. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
6. Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR
7. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
8. Daftar Barang Sitaan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
9. Rincian Piutang Pajak
10. Rincian Piutang PNBP
11. Rincian Penyisihan Piutang PNBP
12. Rincian SP3DRI

DAFTAR TABEL

| | Halaman | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 | 2 |
| Tabel 2 | Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 | 3 |
| Tabel 3 | Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon 1 | 18 |
| Tabel 4 | Penggolongan Kualitas Piutang | 27 |
| Tabel 5 | Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2012 | 29 |
| Tabel 6 | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 | 29 |
| Tabel 7 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 dan 2011 | 30 |
| Tabel 8 | Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2012 | 30 |
| Tabel 9 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2012 dan 2011 | 31 |
| Tabel 10 | Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012 | 31 |
| Tabel 11 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012 dan 2011 | 31 |
| Tabel 12 | Realisasi Penerimaan Perpjakan Per Jenis Penerimaan TA 2012 | 32 |
| Tabel 13 | Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpjakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012 dan 2011 | 32 |
| Tabel 14 | Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 | 35 |
| Tabel 15 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 dan 2011 | 35 |
| Tabel 16 | Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 dan 2011 | 43 |
| Tabel 17 | Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012 | 44 |
| Tabel 18 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012 dan 2011 | 45 |
| Tabel 19 | Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 dan 2011 | 46 |
| Tabel 20 | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012 | 47 |
| Tabel 21 | Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012 dan 2011 | 47 |
| Tabel 22 | Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2012 | 49 |
| Tabel 23 | Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2012 dan 2011 | 49 |
| Tabel 24 | Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2012 dan 2011 | 50 |
| Tabel 25 | Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 | 50 |
| Tabel 26 | Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 dan 2011 | 51 |
| Tabel 27 | Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 Berdasarkan Satuan Kerja | 51 |
| Tabel 28 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana TA 2012 | 54 |
| Tabel 29 | Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2012 dan 2011 | 55 |
| Tabel 30 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2012 | 56 |
| Tabel 31 | Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I Bruto TA 2012 dan 2011 | 56 |
| Tabel 32 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Fungsi TA 2012 | 57 |
| Tabel 33 | Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2012 dan 2011 | 58 |
| Tabel 34 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2012 | 58 |
| Tabel 35 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2012 | 59 |
| Tabel 36 | Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Bruto TA 2012 dan TA 2011 | 61 |
| Tabel 37 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012 | 62 |
| Tabel 38 | Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dan 2011 | 63 |
| Tabel 39 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2012 | 63 |
| Tabel 40 | Perbandingan Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dan TA 2011 | 64 |
| Tabel 41 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2012 | 65 |
| Tabel 42 | Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan 2011 | 66 |
| Tabel 43 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Barang Per Eselon I TA 2012 | 66 |
| Tabel 44 | Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I TA 2012 dan TA 2011 | 67 |

| | | |
|----------|--|-----|
| Tabel 45 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Modal TA 2012 | 68 |
| Tabel 46 | Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 | 69 |
| Tabel 47 | Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Bruto TA 2012 | 69 |
| Tabel 48 | Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 | 70 |
| Tabel 49 | Komposisi Neraca Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 81 |
| Tabel 50 | Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 82 |
| Tabel 51 | Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 83 |
| Tabel 52 | Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 83 |
| Tabel 53 | Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 84 |
| Tabel 54 | Rincian Kas BLU Sekretariat Jenderal | 84 |
| Tabel 55 | Rincian Kas pada PIP | 85 |
| Tabel 56 | Rincian Kas pada LPDP | 85 |
| Tabel 57 | Rincian Kas pada LPDP | 85 |
| Tabel 58 | Belanja Dibayar Di Muka Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 86 |
| Tabel 59 | Uang Muka Belanja Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 87 |
| Tabel 60 | Piutang Pajak Bruto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 | 87 |
| Tabel 61 | Piutang Pajak Neto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 87 |
| Tabel 62 | Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJP Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 88 |
| Tabel 63 | Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2012 | 89 |
| Tabel 64 | Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJBC Per 31 Desember 2012 | 91 |
| Tabel 65 | Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2012 | 92 |
| Tabel 66 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2012 | 94 |
| Tabel 67 | Piutang PNBP Bruto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 | 95 |
| Tabel 68 | Piutang PNBP Neto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 95 |
| Tabel 69 | Mutasi Piutang Bukan Pajak di BPPK Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 100 |
| Tabel 70 | Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak di BPPK Per 31 Desember 2012 | 101 |
| Tabel 71 | Rincian Penyisihan Piutang PNBP Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 | 102 |
| Tabel 72 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bruto Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 31 Desember 2011 | 102 |
| Tabel 73 | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I Per 31 Desember 2012 | 103 |
| Tabel 74 | Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Bruto Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 31 Desember 2011 | 103 |
| Tabel 75 | Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2012 | 104 |
| Tabel 76 | Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Setjen-PIP Per 31 Desember 2012 | 104 |
| Tabel 77 | Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN Per 31 Desember 2012 | 105 |
| Tabel 78 | Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN Per 31 Desember 2012 | 105 |
| Tabel 79 | Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Bruto Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 105 |
| Tabel 80 | Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP selain Bunga Akrual Deposito Per 31 Desember 2012 | 106 |
| Tabel 81 | Rincian Piutang Dari Selain Bunga Akrual Deposito Per 31 Desember 2012 | 106 |
| Tabel 82 | Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2012 | 107 |
| Tabel 83 | Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-STAN Per 31 Desember 2012 | 107 |
| Tabel 84 | Persediaan Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 108 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 85 | Persediaan Per Jenis Per 31 Desember 2012 | 108 |
| Tabel 86 | Persediaan BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 109 |
| Tabel 87 | Aset Tetap per Jenis Aset per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 110 |
| Tabel 88 | Mutasi/Perubahan Aset Tetap Per 31 Desember 2012 | 111 |
| Tabel 89 | Rincian Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2012 | 112 |
| Tabel 90 | Perbandingan Saldo Awal Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 31 Desember 2011 | 113 |
| Tabel 91 | Perbandingan Posisi Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012 | 114 |
| Tabel 92 | Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 116 |
| Tabel 93 | Mutasi/Perubahan Tanah Per 31 Desember 2012 | 116 |
| Tabel 94 | Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2012 | 117 |
| Tabel 95 | Aset Tetap Tanah BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 117 |
| Tabel 96 | Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 118 |
| Tabel 97 | Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2012 | 118 |
| Tabel 98 | Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 119 |
| Tabel 99 | Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 120 |
| Tabel 100 | Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU Per 31 Desember 2012 | 120 |
| Tabel 101 | Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin BLU dari Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 120 |
| Tabel 102 | Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 121 |
| Tabel 103 | Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2012 | 121 |
| Tabel 104 | Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 122 |
| Tabel 105 | Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 123 |
| Tabel 106 | Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU Per 31 Desember 2012 | 123 |
| Tabel 107 | Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 124 |
| Tabel 108 | Aset Tetap Jalan , Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 124 |
| Tabel 109 | Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2012 | 125 |
| Tabel 110 | Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 126 |
| Tabel 111 | Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 126 |
| Tabel 112 | Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 127 |
| Tabel 113 | Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2012 | 127 |
| Tabel 114 | Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 128 |
| Tabel 115 | Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 128 |
| Tabel 116 | Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU Per 31 Desember 2012 | 128 |
| Tabel 117 | Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2012 | 129 |
| Tabel 118 | Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 129 |
| Tabel 119 | Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Penggerjaan Per 31 Desember 2012 | 130 |
| Tabel 120 | Aset Tetap KDP BLU Per Unit Eselon I per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 130 |
| Tabel 121 | Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU per 31 Desember 2012 | 130 |
| Tabel 122 | Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 131 |
| Tabel 123 | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Bruto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 131 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 124 | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR NetoPer Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 132 |
| Tabel 125 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 132 |
| Tabel 126 | Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 133 |
| Tabel 127 | Aset Tak Berwujud per Jenis Aset per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 134 |
| Tabel 128 | Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 134 |
| Tabel 129 | Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud | 135 |
| Tabel 130 | Aset Tak Berwujud BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 135 |
| Tabel 131 | Aset Tak Berwujud - BLU Per Jenis Aset | 136 |
| Tabel 132 | Aset Lain-lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 136 |
| Tabel 133 | Perbandingan Saldo Akhir Akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca | 137 |
| Tabel 134 | Aset Lain-lain BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 138 |
| Tabel 135 | Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 139 |
| Tabel 136 | Utang Kepada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 139 |
| Tabel 137 | Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun Per 31 Desember 2012 | 140 |
| Tabel 138 | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 140 |
| Tabel 139 | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun Per 31 Desember 2012 | 140 |
| Tabel 140 | Pendapatan Diterima di Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 141 |
| Tabel 141 | Uang Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 141 |
| Tabel 142 | Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 142 |
| Tabel 143 | Pendapatan Yang Ditangguhkan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 143 |
| Tabel 144 | Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 143 |
| Tabel 145 | Rincian Cadangan Piutang Per 31 Desember 2012 | 144 |
| Tabel 146 | Rincian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2012 | 144 |
| Tabel 147 | Rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 145 |
| Tabel 148 | Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 | 170 |
| Tabel 149 | Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012 | 171 |
| Tabel 150 | Rekapitulasi Piutang Negara Per 31 Desember 2012 | 172 |
| Tabel 151 | Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2012 | 173 |

DAFTAR GRAFIK

| | Halaman | |
|-----------|---|-----|
| Grafik 1 | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 | 29 |
| Grafik 2 | Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 | 30 |
| Grafik 3 | Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012 | 33 |
| Grafik 4 | Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 | 35 |
| Grafik 5 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 dan 2011 | 36 |
| Grafik 6 | Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 | 36 |
| Grafik 7 | Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012 dan 2011 | 48 |
| Grafik 8 | Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012 | 48 |
| Grafik 9 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2012 dan 2011 | 53 |
| Grafik 10 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2012 | 54 |
| Grafik 11 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2012 | 57 |
| Grafik 12 | Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2012 | 60 |
| Grafik 13 | Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2012 | 60 |
| Grafik 14 | Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 | 62 |
| Grafik 15 | Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2012 | 65 |
| Grafik 16 | Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2012 | 68 |
| Grafik 17 | Komposisi Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011 | 81 |
| Grafik 18 | Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2012 | 89 |
| Grafik 19 | Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset Per 31 Desember 2012 | 110 |
| Grafik 20 | Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap | 111 |
| Grafik 21 | Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2012 | 133 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Neraca Percobaan |
| | LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja |
| | LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan |
| | Laporan Kuasa Pengguna Barang |
| | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap |
| | Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan |
| | Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR |
| Lampiran II | Rincian Piutang Pajak |
| | Rincian Piutang PNBP |
| | Rincian Penyisihan Piutang PNBP |
| | Rincian SP3DRI |
| | Informasi Akrual |
| | Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK RI |
| Lampiran III | Laporan Keuangan KSAP |
| | Laporan Keuangan PIP |
| | Laporan Keuangan LPDP |
| | Laporan Rekening Pemerintah |
| Lampiran IV | Daftar Barang Tegahan DJBC |

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|-----------|---|--|
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APBN-P | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan |
| BLU | : | Badan Layanan Umum |
| BMDTP | : | Bea masuk Ditanggung Pemerintah |
| BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BUN | : | Bendahara Umum Negara |
| DIPA | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| DPPN | : | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional |
| LRA | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| MA | : | Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran |
| MPN | : | Modul Penerimaan Negara |
| PNBP | : | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| SIMAK-BMN | : | Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara |
| SAI | : | Sistem Akuntansi Instansi |
| SAK | : | Sistem Akuntansi Keuangan |
| SAP | : | Standar Akuntansi Pemerintahan |
| SKPA | : | Surat Kuasa Pengguna Anggaran |
| UP | : | Uang Persediaan |
| TA | : | Tahun Anggaran |
| TAB | : | Tahun Anggaran Berjalan |
| TAYL | : | Tahun Anggaran Yang Lalu |
| TGR | : | Tuntutan Ganti Rugi |
| TPA | : | Tagihan Penjualan Angsuran |
| UP | : | Uang Persediaan |
| TNP | : | <i>Treasury Notional Pooling</i> |
| SETJEN | : | Sekretariat Jenderal |
| ITJEN | : | Inspektorat Jenderal |

| | |
|------------|---|
| DJA | : Direktorat Jenderal Anggaran |
| DJP | : Direktorat Jenderal Pajak |
| DJBC | : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| DJPK | : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| DJPU | : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
| DJPB | : Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| DJKN | : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| BAPEPAM-LK | : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan |
| BPPK | : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
| BKF | : Badan Kebijakan Fiskal |
| PIP | : Pusat Investasi Pemerintah |
| STAN | : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara |

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 sebesar **Rp982.829.932.056.170,00** atau **96,60** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp1.017.371.947.232.192,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp980.470.822.097.887,00** atau mencapai **96,48** persen dari pagu anggarannya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.359.109.958.283,00** atau mencapai **207,92** persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk Imbalan Bunga pada TA 2012 sebesar **Rp16.325.448.043.171,00** atau mencapai **93,81** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp16.199.881.727.924,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja Imbalan Bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp615.634.747.251,00**) atau **94,09** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp125.566.315.247,00** atau **67,87** persen dari anggarannya. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa Imbalan Bunga pada TA 2012 adalah sebesar **Rp15.709.813.295.920,00** atau mencapai **90,28** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp15.584.246.980.673,00** atau **90,52** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp125.566.315.247,00** atau **67,87** persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

| URAIAN | TA 2012 | | | (dalam rupiah) TA 2011 |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI TERHADAP ANGGARAN | REALISASI |
| PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS | 1.017.371.947.232.192 | 982.829.932.056.170 | 96,60 | 875.490.823.295.438 |
| Penerimaan Perpajakan | 1.016.237.341.511.000 | 980.470.822.097.887 | 96,48 | 873.721.483.886.873 |
| PNBP | 1.134.605.721.192 | 2.359.109.958.283 | 207,92 | 1.769.339.408.565 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penerimaan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNBP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH | 1.017.371.947.232.192 | 982.829.932.056.170 | 96,60 | 875.490.823.295.438 |
| BELANJA TRANSAKSI KAS | 17.402.097.003.000 | 16.325.448.043.171 | 93,81 | 16.096.296.744.832 |
| Belanja Rupiah Murni | 17.217.079.527.000 | 16.199.881.727.924 | 94,09 | 15.986.719.279.081 |
| Belanja PHLN | 185.017.476.000 | 125.566.315.247 | 67,87 | 109.577.465.751 |
| BELANJA TRANSAKSI NON KAS | 0 | 0 | 0 | 4.036.475.457 |
| Belanja Barang Non Kas | 0 | 0 | 0 | 4.036.475.457 |
| JUMLAH BELANJA | 17.402.097.003.000 | 16.325.448.043.171 | 93,81 | 16.100.333.220.289 |

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Nilai Aset adalah sebesar **Rp93.150.323.894.383,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp53.004.852.749.265,00**, Aset Tetap sebesar **Rp39.244.462.867.245,00**, Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp170.783.795,00**, dan Aset Lainnya sebesar **Rp900.837.494.078,00**.

Nilai Kewajiban adalah sebesar **Rp814.697.948.478,00** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp814.697.948.478,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**.

Sementara itu, nilai Ekuitas Dana adalah sebesar **Rp92.335.625.945.905,00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar **Rp52.190.154.800.787,00** dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp40.145.471.145.118,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

| Uraian | Tanggal Neraca | | | Kenaikan/ (penurunan) | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------|
| | 31 Des 2012 (Rp) | 31 Des 2011 (Rp) | | (Rp) | % |
| Aset | | | | | |
| Aset Lancar | 53,004,852,749,265 | 62,816,187,789,195 | | (9,811,335,039,930) | (15.62) |
| Aset Tetap | 39,244,462,867,245 | 37,731,845,000,870 | | 1,512,617,866,375 | 4.01 |
| Piutang Jangka Panjang | 170,783,795 | 0 | | 170,783,795 | 0.00 |
| Aset Lainnya | 900,837,494,078 | 801,376,507,540 | | 99,460,986,538 | 12.41 |
| Jumlah Aset | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 | | (8,199,085,403,222) | (8.09) |
| Kewajiban | | | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 814,697,948,478 | 806,982,593,139 | | 7,715,355,339 | 0.96 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | | 0 | 0.00 |
| Jumlah Kewajiban | 814,697,948,478 | 806,982,593,139 | | 7,715,355,339 | 0.96 |
| Ekuitas Dana | | | | | |
| Ekuitas Dana Lancar | 52,190,154,800,787 | 62,084,362,174,070 | | (9,894,207,373,283) | (15.94) |
| Ekuitas Dana Investasi | 40,145,471,145,118 | 38,458,064,530,396 | | 1,687,406,614,722 | 4.39 |
| Jumlah Ekuitas Dana | 92,335,625,945,905 | 100,542,426,704,466 | | -8,206,800,758,561 | (8.16) |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 | | -8,199,085,403,222 | (8.09) |

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | TA 2012 | | | TA 2011 |
|--|------------|------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % Realisasi | Realisasi |
| A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | B.1 | | | | |
| 1 PENERIMAAN DALAM NEGERI | B.1.1 | 1.017.371.947.232.190 | 982.829.932.056.170 | 96,60 | 875.490.823.295.438 |
| a Penerimaan Perajakan | B.1.1.1 | 1.016.237.341.511.000 | 980.470.822.097.887 | 96,48 | 873.721.483.886.873 |
| i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri | B.1.1.1.1 | 968.293.241.511.000 | 930.855.230.106.189 | 96,13 | 819.726.384.405.794 |
| ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional | B.1.1.1.2 | 47.944.100.000.000 | 49.615.591.991.698 | 103,49 | 53.995.099.481.079 |
| b Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1.2 | 1.134.605.721.192 | 2.359.109.958.283 | 207,92 | 1.769.339.408.565 |
| i. Pendapatan PNBP Lainnya | B.1.1.2.1 | 355.648.561.192 | 856.424.264.729 | 240,81 | 647.774.605.376 |
| ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) | B.1.1.2.2 | 778.957.160.000 | 1.502.685.693.554 | 192,91 | 1.121.564.803.189 |
| 2 HIBAH | B.1.2 | - | - | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN | | 1.017.371.947.232.190 | 982.829.932.056.170 | 96,60 | 875.490.823.295.438 |
| B BELANJA | B.2 | | | | |
| 1 Belanja Pegawai | B.2.1 | 8.375.082.920.608 | 7.976.346.217.823 | 95,24 | 7.490.514.041.094 |
| 2 Belanja Barang | B.2.2 | 7.127.781.800.025 | 6.097.847.421.003 | 85,55 | 5.277.837.278.247 |
| 3 Belanja Modal | B.2.3 | 1.899.232.282.367 | 1.635.619.657.094 | 86,12 | 2.084.582.029.561 |
| 4 Pembayaran Bunga Utang | B.2.4 | 0 | 615.634.747.251 | 0,00 | 1.247.399.871.387 |
| JUMLAH BELANJA | | 17.402.097.003.000 | 16.325.448.043.171 | 93,81 | 16.100.333.220.289 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LR4KS
Tanggal : Tuesday, May 07,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauai

| No | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS(BAWAH) ANGGARAN | % REALISASI ANGGARAN |
|---|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | |
| I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS | | | | | |
| 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI | | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 |
| a. Penerimaan Perpajakan | | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 |
| b. Penerimaan Negara Bukan Pajak | | 1,016,237,341,511,000 | 980,470,822,097,887 | (35,766,519,413,113) | 96.48 |
| 2. HIBAH | | 1,134,605,721,192 | 2,359,109,958,283 | 1,224,504,237,091 | 207.92 |
| II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS | | | | | |
| 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS | | | | | |
| a. Penerimaan Perpajakan Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. HIBAH NON KAS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II) | | | | | |
| | | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 |
| B BELANJA | | | | | |
| I BELANJA TRANSAKSI KAS | | | | | |
| Belanja Pegawai | | 17,402,097,003,000 | 16,325,448,043,171 | (1,076,648,959,829) | 93.81 |
| Belanja Barang | | 8,375,082,920,608 | 7,976,346,217,823 | (398,736,702,785) | 95.24 |
| Belanja Modal | | 7,127,781,800,025 | 6,097,847,421,003 | (1,029,934,379,022) | 85.55 |
| Pembayaran Bunga Utang Subsidi | | 1,899,232,282,367 | 1,638,619,657,094 | (263,612,625,273) | 86.12 |
| Hibah | | 0 | 615,634,747,251 | 615,634,747,251 | 0.00 |
| Bantuan Sosial | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Lain-lain | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| II BELANJA TRANSAKSI NON KAS | | | | | |
| Belanja Pegawai Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Barang Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pembayaran Bunga Utang Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Subsidi Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hibah Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bantuan Sosial Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Lain-lain Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JUMLAH BELANJA (B I + B II) | | | | | |
| | | 17,402,097,003,000 | 16,325,448,043,171 | (1,076,648,959,829) | 93.81 |
| C PEMBIAYAAN | | | | | |
| 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) | | | | | |
| a. Perbankan Dalam Negeri | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) | | | | | |
| a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Jakarta, Mei 2013
Sekretaris Jenderal,

Kiaque Ahmed Badaruddin
NIP. 195703291978031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : Tuesday, May 07,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauait

| No | URAIAN | 2012 | | | | 2011 | | | |
|----------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | | | |
| A.I | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 | 879,328,211,203,898 | 875,490,823,295,438 | (3,837,387,908,460) | 99.56 |
| A.I.1 | PENERIMAAN NEGARA | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 | 879,328,211,203,898 | 875,490,823,295,438 | (3,837,387,908,460) | 99.56 |
| A.I.1.a | Penerimaan Perajakan | 1,016,237,341,511,000 | 980,470,822,097,887 | (35,766,519,413,113) | 96.48 | 878,685,216,762,000 | 873,721,483,886,873 | (4,963,732,875,127) | 99.44 |
| A.I.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1,134,605,721,192 | 2,359,109,958,283 | 1,224,504,237,091 | 207.92 | 642,994,441,898 | 1,769,339,408,565 | 1,126,344,966,667 | 275.17 |
| A.I.2 | HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.II | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.II.1 | PENERIMAAN NEGARA NON KAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.II.1.a | Penerimaan Perajakan Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.II.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.II.2 | HIBAH NON KAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) | 1,017,371,947,232,192 | 982,829,932,056,170 | (34,542,015,176,022) | 96.60 | 879,328,211,203,898 | 875,490,823,295,438 | (3,837,387,908,460) | 99.56 |
| B | BELANJA NEGARA | | | | | | | | |
| B.I | BELANJA TRANSAKSI KAS | 17,402,097,003,000 | 16,325,448,043,171 | (1,076,648,959,829) | 93.81 | 17,346,872,669,000 | 16,096,296,744,832 | (1,250,575,924,168) | 92.79 |
| B.I.1 | Rupiah Murni | 17,217,079,527,000 | 16,199,881,727,924 | (1,017,197,799,076) | 94.09 | 17,183,692,670,000 | 15,986,719,279,081 | (1,196,973,390,919) | 93.03 |
| B.I.1.a | Belanja Pegawai | 8,375,082,920,608 | 7,976,346,217,823 | (398,736,702,785) | 95.24 | 8,161,582,433,000 | 7,490,514,041,094 | (671,068,391,906) | 91.78 |
| B.I.1.b | Belanja Barang | 7,012,914,994,025 | 5,998,821,296,389 | (1,014,093,697,636) | 85.54 | 6,209,251,588,000 | 5,214,425,020,769 | (994,826,567,231) | 83.98 |
| B.I.1.c | Belanja Modal | 1,829,081,612,367 | 1,609,079,466,461 | (220,002,145,906) | 87.97 | 2,812,858,649,000 | 2,034,380,345,831 | (778,478,303,169) | 72.32 |
| B.I.1.d | Pembayaran Bunga Utang | 0 | 615,634,747,251 | 615,634,747,251 | 0.00 | 0 | 1,247,399,871,387 | 1,247,399,871,387 | 0.00 |
| B.I.1.e | Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.1.f | Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.1.g | Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.1.h | Belanja Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2 | Pinjaman dan Hibah | 185,017,476,000 | 125,566,315,247 | (59,451,160,753) | 67.87 | 163,179,999,000 | 109,577,465,751 | (53,602,533,249) | 67.15 |
| B.I.2.a | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2.b | Belanja Barang | 114,866,806,000 | 99,026,124,614 | (15,840,681,386) | 86.21 | 106,511,097,000 | 59,375,782,021 | (47,135,314,979) | 55.75 |
| B.I.2.c | Belanja Modal | 70,150,670,000 | 26,540,190,633 | (43,610,479,367) | 37.83 | 56,668,902,000 | 50,201,683,730 | (6,467,218,270) | 88.59 |
| B.I.2.d | Pembayaran Bunga Utang | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2.e | Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2.f | Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2.g | Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.I.2.h | Belanja Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II | BELANJA TRANSAKSI NON KAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4,036,475,457 | 4,036,475,457 | 0.00 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : Tuesday, May 07.
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauait

| No | URAIAN | 2012 | | | | 2011 | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REAL. ANGG. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B.II.1 | Belanja Pegawai Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.2 | Belanja Barang Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4,036,475,457 | 4,036,475,457 | 0.00 |
| B.II.3 | Belanja Modal Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.4 | Pembayaran Bunga Utang Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.5 | Subsidi Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.6 | Hibah Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.7 | Bantuan Sosial Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.II.8 | Belanja Lain-lain Non Kas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) | 17,402,097,003,000 | 16,325,448,043,171 | (1,076,648,959,829) | 93.81 | 17,346,872,669,000 | 16,100,333,220,289 | (1,246,539,448,711) | 92.81 |
| C | PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
| C.I | PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.I.1 | Perbankan Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.I.2 | Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.II | PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.II.1 | Penarikan Pinjaman Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.II.1 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Jakarta, Mei 2013

Sekretaris Jenderal,

Klagus Ahmad Badaruddin
NIP. 195703291978031001

II. NERACA

II. NERACA

**KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(dalam Rupiah)

| NAMA PERKIRAAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2012 | 31 DESEMBER 2011 |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | C.1 | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1.1 | 8,796,459,747 | 1,439,660,756 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1.2 | 6,659,080,618 | 3,060,880,248 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1.3 | 20,739,677,126 | 8,115,195,871 |
| Kas pada Badan Layanan Umum | C.1.4 | 3,641,157,122,268 | 2,168,961,124,597 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | C.1.5 | 23,212,842,494 | 10,002,522,352 |
| Uang muka belanja (prepayment) | C.1.6 | 3,723,250,772 | 16,924,326,150 |
| Piutang Perpajakan | C.1.7 | 93,468,526,344,200 | 108,063,462,383,641 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan | C.1.8 | (44,550,942,630,944) | (47,817,309,090,339) |
| <i>Piutang Perpajakan (Netto)</i> | | <i>48,917,583,713,256</i> | <i>60,246,153,293,302</i> |
| Piutang Bukan Pajak | C.1.9 | 96,450,818,001 | 85,849,145,052 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.1.10 | (51,808,973,643) | (44,869,379,520) |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i> | | <i>44,641,844,358</i> | <i>40,979,765,532</i> |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.11 | 9,625,650,721 | 9,874,029,786 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.12 | (9,414,674,698) | (9,478,786,128) |
| <i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i> | | <i>210,976,023</i> | <i>395,243,658</i> |
| Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | C.1.13 | 20,520,519,164 | 14,938,119,944 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | C.1.14 | (112,142,971) | (95,448,100) |
| <i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i> | | <i>20,408,376,193</i> | <i>14,842,671,844</i> |
| Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | C.1.15 | 32,766,356,150 | 22,027,746,408 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | C.1.16 | (633,092,250) | (553,181,649) |
| <i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i> | | <i>32,133,263,900</i> | <i>21,474,564,759</i> |
| Persediaan | C.1.17 | 284,672,873,440 | 282,731,013,941 |
| Persediaan Badan Layanan Umum | C.1.18 | 913,269,070 | 1,107,526,185 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 53,004,852,749,265 | 62,816,187,789,195 |
| ASET TETAP | C.2 | | |
| Tanah | C.2.1 | 17,296,534,823,816 | 17,210,633,268,536 |
| Tanah Badan Layanan Umum | C.2.2 | 545,192,062,827 | 545,192,062,827 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.3 | 8,849,450,471,389 | 8,021,195,465,644 |
| Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum | C.2.4 | 51,293,956,632 | 43,188,928,397 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.5 | 11,211,918,159,435 | 10,635,543,677,167 |
| Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum | C.2.6 | 196,710,647,484 | 194,255,849,179 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.7 | 348,573,649,280 | 332,477,687,395 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum | C.2.8 | 18,437,121,332 | 18,437,121,332 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.9 | 26,339,299,995 | 21,169,879,443 |
| Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum | C.2.10 | 11,807,907,831 | 11,467,292,040 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.11 | 677,317,480,494 | 698,283,768,910 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum | C.2.12 | 10,887,286,730 | 0 |
| JUMLAH ASET TETAP | | 39,244,462,867,245 | 37,731,845,000,870 |

| | | | |
|---|------------|---------------------------|----------------------------|
| PIUTANG JANGKA PANJANG | C.3 | | |
| Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.3.1 | 171,642,005 | 26,443,698 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.3.2 | (858,210) | (132,218) |
| <i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i> | | 170,783,795 | 26,311,480 |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | | 170,783,795 | 26,311,480 |
| ASET LAINNYA | C.4 | | |
| Aset Tak Berwujud | C.4.1 | 518,108,669,309 | 474,893,975,396 |
| Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum | C.4.2 | 3,177,745,040 | 2,898,446,790 |
| Aset Lain-lain | C.4.3 | 379,512,337,729 | 248,393,281,860 |
| Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum | C.4.4 | 38,742,000 | 75,164,492,014 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | | 900,837,494,078 | 801,350,196,060 |
| JUMLAH ASET | | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | C.5 | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.5.1 | 39,060,216,445 | 17,174,929,541 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | C.5.2 | 753,033,696,543 | 704,320,653,776 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.5.3 | 4,367,814,771 | 1,583,445,635 |
| Uang Muka | C.5.4 | 0 | 4,155,000 |
| Uang Muka dari KPPN | C.5.5 | 8,796,376,249 | 1,435,505,756 |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | C.5.6 | 9,439,844,470 | 82,463,903,431 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 814,697,948,478 | 806,982,593,039 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 814,697,948,478 | 806,982,593,039 |
| EKUITAS DANA | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | C.6 | | |
| Cadangan Piutang | C.6.1 | 49,016,779,361,599 | 60,326,557,849,853 |
| Cadangan Persediaan | C.6.2 | 285,586,142,510 | 283,838,540,126 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | C.6.3 | (774,134,999,714) | (717,825,069,672) |
| Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi | C.6.4 | 83,498 | 0 |
| Dana Lancar BLU | C.6.5 | 3,641,157,122,268 | 2,168,961,124,597 |
| Barang/Jasa yang Harus Diterima | C.6.6 | 25,134,905,397 | 24,214,537,744 |
| Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan | C.6.7 | (4,367,814,771) | (1,384,808,578) |
| JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | | 52,190,154,800,787 | 62,084,362,174,170 |
| EKUITAS DANA INVESTASI | C.7 | | |
| Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | C.7.1 | 39,244,462,867,245 | 37,731,845,000,870 |
| Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya | C.7.2 | 901,008,277,873 | 726,219,529,526 |
| JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | | 40,145,471,145,118 | 38,458,064,530,396 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | | 92,335,625,945,905 | 100,542,426,704,566 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 |

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| ASET | |
| ASET LANCCAR | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 8,796,459,747 |
| Kas di Bendahara Penetilaan | 6,659,080,618 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 20,739,677,126 |
| Kas pada Badan Layanan Umum | 3,641,157,122,268 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 23,212,842,494 |
| Uang muka belanja (prepayment) | 3,723,250,772 |
| Piutang Perpajakan | 93,468,526,344,200 |
| Penyisihan Piutang Tidak-Tertagih – Piutang Perpajakan | (44,550,942,630,944) |
| Piutang Perpajakan (Netto) | 48,917,583,713,256 |
| Piutang Bukan Pajak | 96,420,818,001 |
| Penyisihan Piutang Tidak-Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (9,414,674,638) |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | 210,976,023 |
| Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | 20,520,519,164 |
| Penyisihan Piutang Tidak-Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | (112,142,971) |
| Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) | 20,408,376,193 |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | 32,706,356,150 |
| Penyisihan Piutang Tidak-Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | (633,092,250) |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) | 32,133,263,900 |
| Persediaan | 284,672,873,440 |
| Persediaan Badan Layanan Umum | 913,269,070 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 53,004,852,749,265 |
| ASET TETAP | |
| Tanah | 17,296,534,823,816 |
| Tanah Badan Layanan Umum | 545,102,062,827 |
| Peralatan dan Mesin | 8,849,450,471,389 |
| Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum | 51,293,956,632 |
| Gedung dan Bangunan | 11,211,918,159,435 |
| Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum | 196,710,647,484 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 348,573,649,280 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum | 18,437,121,332 |
| Aset Tetap Lainnya | 26,339,299,995 |
| Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum | 11,807,907,831 |
| Konstruksi Dalam Pengelolaan | 677,317,480,494 |
| Konstruksi Dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum | 10,887,286,730 |
| JUMLAH ASET TETAP | 39,244,462,867,245 |
| PUTANG JANGKA PANJANG | |

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 171,642,005 |
| Penyisihan Piutang Tidak Teragih – Tagihan Tunilitan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (858,210) |
| <i>Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i> | 170,783,795 |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | 170,783,795 |
| ASET LAINNYA | |
| Aset Tak Berwujud | 518,108,669,309 |
| Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum | 3,177,745,040 |
| Aset Lain-lain | 379,512,337,729 |
| Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum | 38,742,000 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 900,837,494,078 |
| JUMLAH ASET | 93,150,323,894,383 |
| KEWAJIBAN | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| Uang kepada Pihak Ketiga | 39,000,216,445 |
| Uang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | 753,033,696,543 |
| Pendapatan Diterima Dimulka | 4,367,814,771 |
| Uang Muka dari KPPN | 8,796,376,249 |
| Pendapatan Yang Dilanggukukan | 9,439,844,470 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 814,697,948,478 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 814,697,948,478 |
| EKUITAS DANAI | |
| EKUITAS DANA LANCAR | |
| Cadangan Piutang | 49,016,779,361,599 |
| Cadangan Persediaan | 285,566,142,510 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | (774,134,998,74) |
| Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi | 83,498 |
| Dana Lancar BLU | 3,641,157,122,268 |
| Barang/Jasa yang Harus Diterima | 25,134,905,397 |
| Barang/Jasa Yang Harus Diserahtakan | (4,367,814,771) |
| JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | 52,190,154,800,787 |
| EKUITAS DANA INVESTASI | |
| Dilinvestasikan Dalam Aset Tetap | 39,244,462,867,245 |
| Dilinvestasikan Dalam Aset Lainnya | 901,008,277,873 |
| JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | 40,145,471,145,118 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | 92,335,625,945,905 |

Kode Laporan : LSAIKB
Tanggal : 07/05/13
Halaman : 2

**NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 93,150,323,894,383 |

Jakarta, Mei 2013
Sekretaris Jenderal
[Signature]
Kiaque Ammar Badaruddin
NIP. 195203291978031001

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 07/05/13
Halaman : 3

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Laporan : NSAIKLT
Tanggal : 07/05/13
Halaman : 1

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 2012 | 2011 | Jumlah | % |
| ASET | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 8,796,459,747 | 1,439,660,756 | 7,356,798,991 | 51.00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 6,659,080,618 | 3,060,880,248 | 3,598,200,370 | 117.55 |
| Kas Lainnya dan Selara Kas | 20,739,677,126 | 8,115,195,871 | 12,624,481,255 | 155.56 |
| Kas pada Badan Layanan Umum | 3,641,157,122,268 | 2,168,961,124,597 | 1,472,195,997,671 | 67.87 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 23,212,842,494 | 10,002,522,352 | 13,210,320,142 | 132.06 |
| Uang muka belanja (prepayment) | 3,723,250,772 | 16,924,326,150 | (13,201,075,378) | (78.00) |
| Piutang Perajakan | 93,468,526,344,200 | 108,063,462,383,641 | (14,594,936,039,441) | (13.50) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perajakan | (44,550,942,630,944) | (47,817,309,090,339) | 3,266,366,458,395 | (6.83) |
| Piutang Bukan Pajak | 48,917,583,713,256 | 60,246,153,283,302 | (11,328,569,580,046) | (18.80) |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak | (96,450,818,001) | 85,849,145,052 | 10,601,672,949 | 12.34 |
| Piutang Bukan Pajak (Netto) | (51,808,973,643) | (44,899,379,520) | (6,999,594,123) | 15.46 |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendidaraan/Tuntutan Ganti Rugi | 44,621,844,358 | 40,978,765,532 | 3,662,078,826 | 8.93 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendidaraan/Tuntutan Ganti Rugi | (9,414,674,698) | (9,478,786,128) | 64,111,430 | (0.67) |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendidaraan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | 210,976,023 | 395,243,658 | (184,267,635) | (46.62) |
| Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | 20,520,519,164 | 14,938,119,944 | 5,582,399,220 | 37.37 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | (112,142,971) | (95,448,100) | (16,694,871) | 17.49 |
| Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) | 20,408,376,193 | 14,842,671,844 | 5,565,704,349 | 37.49 |
| Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | 32,766,356,150 | 22,027,746,408 | 10,738,609,742 | 48.75 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | (633,092,250) | (553,181,649) | (79,910,601) | 14.44 |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) | 32,133,263,900 | 21,474,564,759 | 10,658,699,141 | 49.63 |
| Persediaan | 284,672,873,440 | 282,731,013,941 | 1,941,859,499 | 0.68 |
| Persediaan Badan Layanan Umum | 913,269,070 | 1,107,526,185 | (194,257,115) | (17.53) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 53,004,852,749,265 | 62,816,187,789,195 | (9,811,335,039,930) | (15.61) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 17,296,534,823,816 | 17,210,633,268,536 | 85,901,555,280 | 0.49 |
| Tanah Badan Layanan Umum | 545,192,062,827 | 545,192,062,827 | 0 | 0.00 |
| Peralatan dan Mesin | 8,849,450,471,389 | 8,021,195,465,644 | 828,255,005,745 | 10.32 |
| Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum | 51,293,956,632 | 43,188,928,397 | 8,105,028,235 | 18.76 |
| Gedung dan Bangunan | 11,211,918,159,435 | 10,635,543,677,167 | 576,374,482,268 | 5.41 |
| Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum | 196,710,647,484 | 194,255,849,179 | 2,454,798,305 | 1.26 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 348,573,649,280 | 332,477,687,395 | 16,095,961,885 | 4.84 |

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Laporan: NSAKLT
 Tanggal : 07/05/13
 Halaman : 2

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenalkan (Penurunan) | |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 2012 | 2011 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum | 18,437,121,332 | 18,437,121,332 | 0 | 0.00 |
| Aset Tetap Lainnya | 26,339,299,995 | 21,169,879,443 | 5,169,420,552 | 24.41 |
| Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum | 11,807,907,831 | 11,467,292,040 | 340,615,791 | 2.97 |
| Konstruksi Dalam Pengelolaan | 677,317,480,494 | 698,283,768,910 | (20,966,288,416) | (3.00) |
| Konstruksi Dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum | 10,887,286,730 | 0 | 10,887,286,730 | 0.00 |
| JUMLAH ASET TETAP | 39,244,462,867,245 | 37,731,845,000,870 | 1,512,617,866,375 | 4.00 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | | |
| Tagihan Tuntutan Perberdaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 171,642,005 | 26,443,698 | 145,198,307 | 549.08 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perberdaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (858,210) | (132,218) | (725,992) | 549.08 |
| Tagihan Tuntutan Perberdaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) | 170,783,795 | 26,311,480 | 144,472,315 | 549.08 |
| JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG | 170,783,795 | 26,311,480 | 144,472,315 | 549.08 |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Tak Berwujud | 518,108,669,309 | 474,893,975,396 | 43,214,693,913 | 9.09 |
| Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum | 3,177,745,040 | 2,898,446,790 | 279,298,250 | 9.63 |
| Aset Lain-lain | 379,512,337,729 | 248,393,281,860 | 131,119,055,869 | 52.78 |
| Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum | 38,742,000 | 75,164,492,014 | (75,125,750,014) | (99.94) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 900,837,494,078 | 801,350,196,060 | 99,487,298,018 | 12.41 |
| JUMLAH ASET | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 | (8,199,085,403,222) | (8.08) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | 39,060,216,445 | 17,174,929,541 | 21,885,286,904 | 127.42 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | 753,033,696,543 | 704,320,653,776 | 48,713,042,767 | 6.91 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 4,367,814,771 | 1,583,445,635 | 2,784,369,136 | 175.84 |
| Uang Muka | 0 | 4,155,000 | (4,155,000) | (100.00) |
| Uang Muka dari KPPN | 8,796,376,249 | 1,435,505,756 | 7,360,870,493 | 512.77 |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | 9,430,844,470 | 82,463,903,431 | (73,024,058,961) | (88.55) |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 814,697,948,478 | 806,982,593,139 | 7,715,355,339 | 0.95 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 814,697,948,478 | 806,982,593,139 | 7,715,355,339 | 0.95 |
| EKUITAS DANA | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | |
| Cadangan Piutang | 49,016,779,361,599 | 60,326,557,849,853 | (11,309,778,488,254) | (18.74) |
| Cadangan Persediaan | 285,586,442,510 | 283,838,540,126 | 1,747,602,384 | 0.61 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang | (774,134,999,714) | (717,825,069,672) | (56,309,930,042) | 7.84 |
| Jangka Pendek | | | | |
| Keuntungan/Kerugian yang belum terrealisasi | 83,498 | 0 | 83,498 | 0.00 |
| Dana Lancar BLU | 3,641,157,122,268 | 2,168,961,124,597 | 1,472,195,997,671 | 67.87 |
| Barang/Jasa yang Harus Diterima | 25,134,905,397 | 24,214,537,744 | 920,367,653 | 3.80 |

NERACA

**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIKLT
Tanggal : 07/05/13
Halaman : 3

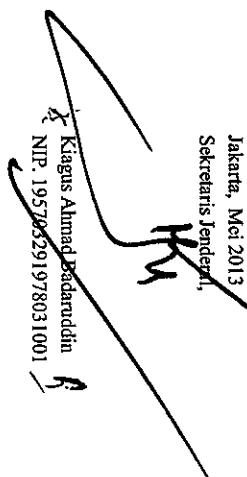
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenakan (Penurunan) | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | 2012 | 2011 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan | (4,367,814,771) | (1,384,808,578) | (2,983,006,193) | 215,40 |
| JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | 52,190,154,800,787 | 62,084,362,174,070 | (9,894,207,373,283) | (15,93) |
| Ekuitas Dana Investasi | | | | |
| Dinvestasikan Dalam Aset Tetap | 39,244,462,867,245 | 37,731,845,000,870 | 1,512,617,866,375 | 4,00 |
| Dinvestasikan Dalam Aset Lainnya | 901,008,277,873 | 726,219,529,526 | 174,788,748,347 | 24,06 |
| JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | 40,145,471,145,118 | 38,458,064,530,396 | 1,687,406,614,722 | 4,38 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | 92,335,625,945,905 | 100,542,426,704,466 | (8,206,800,758,561) | (8,16) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 93,150,323,894,383 | 101,349,409,297,605 | (8,199,085,403,222) | (8,08) |

Jakarta, Mei 2013

Sekretaris Jenderal,

Kiegus Ahmad Badruddin
NIP. 195703291978031001



III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan

- Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak *Production Sharing* dan kegiatan Pertamina sendiri;
 17. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM Atas Perolehan BKP dan atau JKP yang Digunakan Oleh BU atau BUT Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Modul Penerimaan Negara;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtempahan Barang Milik Negara;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KM.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda

Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
39. Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-07/PB/2005 tentang Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-48/PB/2006 tentang SP3;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Langsung;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan BAS;
50. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-62/PB/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
51. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
52. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
53. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-90/PB/2011 tentang Rekonsilias Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
54. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-58/BC/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
55. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
56. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

A.2.1. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah **menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.**

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan **pengelola keuangan dan kekayaan negara** adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara. **Dipercaya** adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. **Akuntabel** adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan atas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

A.2.2. Misi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan **visi** yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki **misi**:

1. **Misi fiskal** adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (*prudent*), dan bertanggung jawab;
2. **Misi kekayaan negara** adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab;
3. **Misi pasar modal dan lembaga keuangan** adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global;
4. **Misi penguatan kelembagaan** adalah:
 - i. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - ii. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;
 - iii. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

A.2.3. Tujuan Kementerian Keuangan

Guna mengaktualisasikan visi dan misi tersebut, maka Kementerian Keuangan menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | Tujuan 1 | : Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat; |
| 2. | Tujuan 2 | : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal; |

| | | |
|----|----------|--|
| 3. | Tujuan 3 | : Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal; |
| 4. | Tujuan 4 | : Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara; |
| 5. | Tujuan 5 | : Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; |
| 6. | Tujuan 6 | : Membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. |

A.2.4. Sasaran Strategis

- a. Sasaran strategis dalam **tema pendapatan negara** adalah:
1. Tingkat pendapatan yang optimal;
Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.
2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal;
Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan dimata *stakeholder*.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan, dan cukai.
 - b. Sasaran strategis dalam **tema belanja negara**:
 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN;
 - Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - Alokasi belanja negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara;

- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh *stakeholder* dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Perimbangan keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*;
- Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.

c. Sasaran strategis dalam **tema pemberdayaan APBN** adalah:

1. Terpenuhinya pemberdayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien;

Memenuhi target pemberdayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.

2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel;

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal;

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrumen SBN yang variatif serta meningkatkan sebaran investor.

- d. Sasaran strategis dalam **tema pertumbuhan negara** adalah:

1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara;

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi pengelolaan kas;

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle* kas yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.

Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).

3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya;

Salah satu bagian dari pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerusan pinjaman. Dana penerusan pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU;

Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya, secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual basis sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian)

melalui LKPP yang lebih berkualitas.

6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal, dan terpadu.

Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal, dan terpadu mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

- e. Sasaran strategis dalam **tema kekayaan negara** adalah:

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal;

Mengoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel;

Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*;

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tumpoksi penyelenggaraan negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara;

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtempahan barang milik negara.

5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

- f. Sasaran strategis dalam **tema pasar modal dan lembaga keuangan non bank** adalah:

1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional;

2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif;

3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal;

4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience*, dan *liquid*;
 5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*);
 6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan, dan berstandar internasional.
- g. Sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah:
1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM yang tertata dan berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam mengelola keuangan negara.
 2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;
Pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi dan SOP yang dimiliki, yaitu:
 - Fungsi unit organisasi merupakan fungsi yang telah disusun berdasarkan keputusan menteri keuangan;
 - SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). SOP yang disusun harus memenuhi prinsip efisiensi.
 3. Terwujudnya *good governance*;
Good governance adalah terciptanya tata kelola pemerintahan dalam menerapkan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, responsibilitas, efektivitas, dan efisien).
 4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;
Sistem informasi/aplikasi yang ada di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan diupayakan terintegrasi didukung dengan kualitas layanan infrastruktur yang prima.
 5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan.
Sasaran strategis ini terkait dengan *product/service* yang dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal yang difokuskan pada hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Kementerian Keuangan melalui asistensi, monitoring, dan *review* penyusunan laporan keuangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

A.2.5. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional 2010–2014, Kementerian Keuangan menetapkan 12 (dua belas) program.

REALISASI DIPA PER PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

| KODE | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 101 | Program Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan | 6.787.055.145.000 | 6.048.322.601.993 | 89,12 |
| 103 | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan | 94.741.699.000 | 88.443.110.197 | 93,35 |
| 104 | Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan | 421.882.973.000 | 395.209.374.815 | 93,68 |
| 106 | Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank | 361.099.484.000 | 183.322.470.015 | 50,77 |
| 107 | Program Pengelolaan Anggaran Negara | 139.374.773.000 | 125.576.715.215 | 90,10 |
| 108 | Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah | 117.463.308.000 | 112.558.982.775 | 95,82 |
| 109 | Program Pengelolaan Perpendidaraan Negara | 1.534.467.641.000 | 1.413.946.938.378 | 92,15 |
| 110 | Program Pengelolaan Kekayaan Negara Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang | 601.260.888.000 | 553.136.540.358 | 92,00 |
| 111 | Program Perumusan Kebijakan Fiskal | 145.989.695.000 | 131.400.076.992 | 90,01 |
| 112 | Program Pengamanan dan Pengamanan Penerimaan Pajak | 4.997.443.575.000 | 5.222.442.377.430 | 104,50 |
| 113 | Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | 2.130.567.822.000 | 1.983.136.295.944 | 93,08 |
| 114 | Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang | 70.750.000.000 | 67.952.559.059 | 96,05 |
| Jumlah | | 17.402.097.003.000 | 16.325.448.043.171 | 93,81 |

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Kementerian Keuangan TA 2012 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN-P sebesar **Rp17.402.097.003.000,00** meliputi:

- Satuan kerja kantor pusat (KP) termasuk 2 satker BLU PIP dan LPDP sebesar **Rp11.400.433.554.000**
- Satuan kerja kantor daerah (KD) termasuk 1 satker BLU STAN sebesar **Rp6.001.663.449.000**.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut:

| Tahun Anggaran | Jumlah Satker | Jenis Sumber Dana | |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | APBN | BLU |
| 2011 | 2 | 83.471.637.000 | 53.222.987.000 |
| 2012 | 3 | 70.238.748.000 | 347.537.304.000 |

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.073 satker termasuk 3 satker BLU . Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1.073 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon 1

| Kode Eselon I | Uraian | Jumlah Jenis Kewenangan | | | | | | | | Jumlah Satker | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|----|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|--|
| | | KP | | KD | | DK | | TP | | | |
| | | M | TM | M | TM | M | TM | M | TM | | |
| 01 | Sekretariat Jenderal | 10 | - | 22 | - | - | - | - | - | 32 | |
| 02 | Inspektorat Jenderal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 03 | Ditjen Anggaran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 04 | Ditjen Pajak | 4 | - | 568 | - | - | - | - | - | 572 | |
| 05 | Ditjen Bea dan Cukai | 6 | - | 138 | - | - | - | - | - | 144 | |
| 06 | Ditjen Perimbangan Keuangan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 07 | Ditjen Pengelolaan Utang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 08 | Ditjen Perbendaharaan | 4 | - | 207 | - | - | - | - | - | 211 | |
| 09 | Ditjen Kekayaan Negara | 1 | - | 87 | - | - | - | - | - | 88 | |
| 10 | Bapepam-LK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | BPPK | 7 | - | 13 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 12 | BKF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | | Jumlah | | 38 | - | 1035 | - | - | - | 1073 | |

Keterangan:

M = Menyampaikan LK
TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 Kementerian Keuangan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar **Rp316.194.201.433.000,00** dan dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar **Rp45.229.003.000,00**.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Keuangan adalah:

(1) Pendapatan;

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja;

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, adapun di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar;

Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

- a. belum jatuh tempo;
- b. telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau
- c. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

- a. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
- b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. telah diberitahukan Surat Paksa; atau
- d. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:

- a. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. sedang diajukan keberatan atau banding;
- c. Wajib Pajak Non Efektif (NE);
- d. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila:

- a. hak penagihannya telah daluwarsa; atau
- b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-58/BC/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitur;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang.

sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
2. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
4. Macet, ditetapkan apabila:
 - a. umur piutang lebih dari 3 tahun;
 - b. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
 - c. kondisi debitur:
 - i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;

- ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
- iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Berdasarkan PMK 201/PMK.06/2010, Piutang PNBP dikelompokkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Kualitas lancar apabila sejak tanggal terjadinya transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo (diterbitkannya Surat Tagihan Pertama) belum dibayar, piutang lancar disisihkan lima permil dari total piutang. Piutang kurang lancar apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Pertama diterbitkan belum dibayar, piutang kurang lancar disisihkan sepuluh persen dari total piutang. Piutang diragukan apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Kedua diterbitkan belum dibayar, piutang diragukan disisihkan lima puluh persen dari total piutang. Piutang macet apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Ketiga diterbitkan belum dibayar atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN, piutang macet disisihkan seratus persen dari total piutang.

Berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang menyatakan bahwa Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir apabila diperoleh melalui pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu

setahun atau kurang, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk surat berharga pada BUMN terjadi dalam rangka penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk

saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa pengakuan aset tetap renovasi yang telah selesai pada akhir periode pelaporan harus segera diserahterimakan kepada satker kuasa pengguna barang. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan atau aset renovasi belum diserahkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Aset Tetap Renovasi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan maka Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai Kontruksi Dalam Pengrajaan Aset Tetap terkait.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Selain itu kebijakan mengenai aset lain diatur dalam PMK Nomor: 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) poin d. Angka 2 menyatakan bahwa Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digolongkan dalam kualitas macet.
- b. Pasal 6 ayat (3) poin c. PMK tersebut menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang macet dibentuk “Penyisihan Piutang Tidak Tertagih” sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu

seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kementerian Keuangan belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2012 Rp982.829.932.056.170,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto Kementerian Keuangan pada TA 2012 adalah sebesar **Rp982.829.932.056.170,00** atau **96,60** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar **Rp1.017.371.947.232.192,00**.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2012
(dalam rupiah)

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah | 1.017.371.947.232.192 | 982.829.932.056.170 | 96,60 |
| Penerimaan Perpajakan | 1.016.237.341.511.000 | 980.470.822.097.887 | 96,48 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1.134.605.721.192 | 2.359.109.958.283 | 207,92 |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto Kementerian Keuangan pada TA 2012 adalah sebesar **Rp1.036.295.266.757.850,00** atau **101,86** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar **Rp1.017.371.947.232.192,00**. Dibandingkan dengan TA 2011, realisasi pendapatan TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp114.990.226.359.288,00** atau **12,48** persen. Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri **Rp118.771.193.423.752,00** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak **Rp590.556.917.659,00**. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan sebesar **Rp4.371.523.982.123,00**.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 6 dan Grafik 1 berikut.

Tabel 6
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012
(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi | % |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Penerimaan Perpajakan | 1.016.237.341.511.000 | 1.033.935.003.832.590 | 101,74 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 968.293.241.511.000 | 983.623.506.847.429 | 101,58 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 47.944.100.000.000 | 50.311.496.985.161 | 104,94 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1.134.605.721.192 | 2.360.262.925.264 | 208,02 |
| Jumlah | 1.017.371.947.232.192 | 1.036.295.266.757.850 | 101,86 |

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012



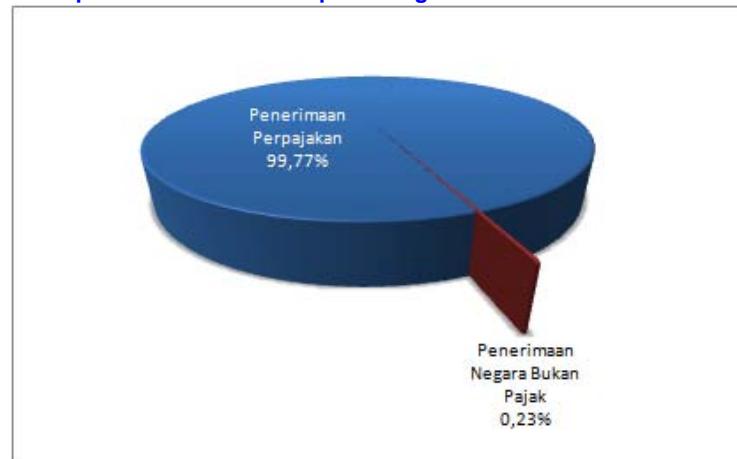
Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dan TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Penerimaan Perpajakan | 1.033.935.003.832.590 | 919.535.334.390.961 | 114.399.669.441.629 | 12,44 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 983.623.506.847.429 | 864.852.313.423.677 | 118.771.193.423.752 | 13,73 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 50.311.496.985.161 | 54.683.020.967.284 | (4.371.523.982.123) | (7,99) |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.360.262.925.264 | 1.769.706.007.605 | 590.556.917.659 | 33,37 |
| Jumlah | 1.036.295.266.757.850 | 921.305.040.398.566 | 114.990.226.359.288 | 12,48 |

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2012



1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I (Bruto)

Realisasi pendapatan per unit eselon I bruto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2012

(dalam rupiah)

| No. | Eselon I | Estimasi | Realisasi | % |
|-----|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | SETJEN | 761.307.265.000 | 1.509.182.136.455 | 198,24 |
| 2 | ITJEN | 80.000.000 | 89.308.578 | 111,64 |
| 3 | DJA | 0 | 1.238.566.482 | 0,00 |
| 4 | DJP | 885.031.926.607.755 | 888.618.235.460.407 | 100,41 |
| 5 | DJBC | 131.463.998.610.000 | 145.704.898.810.369 | 110,83 |
| 6 | DJPK | 0 | 710.608.590 | 0,00 |
| 7 | DJPU | 0 | 1.170.551.644 | 0,00 |
| 8 | DJPB | 8.295.619.437 | 102.760.577.333 | 1.238,73 |
| 9 | DJKN | 86.475.530.000 | 250.015.146.383 | 289,12 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 0 | 88.750.639.852 | 0,00 |
| 11 | BPPK | 19.863.600.000 | 17.910.018.810 | 90,17 |
| 12 | BKF | 0 | 304.932.951 | 0,00 |
| | JUMLAH | 1.017.371.947.232.192 | 1.036.295.266.757.850 | 101,86 |

Perbandingan realisasi pendapatan per unit eselon I bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2012 dan 2011
(dalam rupiah)

| No. | Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Rupiah | % |
| 1 | SETJEN | 1.509.182.136.455 | 1.117.542.025.073 | 391.640.111.382 | 35,04 |
| 2 | ITJEN | 89.308.578 | 689.682.757 | (600.374.179) | (87,05) |
| 3 | DJA | 1.238.566.482 | 1.590.391.042 | (351.824.560) | (22,12) |
| 4 | DJP | 888.618.235.460.407 | 787.850.521.116.699 | 100.767.714.343.708 | 12,79 |
| 5 | DJBC | 145.704.898.810.369 | 132.018.505.593.198 | 13.686.393.217.171 | 10,37 |
| 6 | DJKP | 710.608.590 | 396.576.933 | 314.031.657 | 79,19 |
| 7 | DIPU | 1.170.551.644 | 52.632.970 | 1.117.918.674 | 2.123,99 |
| 8 | DJPB | 102.760.577.333 | 6.077.092.117 | 96.683.485.216 | 1.590,95 |
| 9 | DJKN | 250.015.146.383 | 198.829.805.704 | 51.185.340.679 | 25,74 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 88.750.639.852 | 95.072.195.602 | (6.321.555.750) | (6,65) |
| 11 | BPPK | 17.910.018.810 | 14.545.418.124 | 3.364.600.686 | 23,13 |
| 12 | BKF | 304.932.951 | 1.217.868.347 | (912.935.396) | (74,96) |
| | JUMLAH | 1.036.295.266.757.850 | 921.305.040.398.566 | 114.990.226.359.288 | 12,48 |

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan (Bruto)

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Perpjakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan bruto TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10
Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012

(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi | % |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Penerimaan Perpjakan | 1.016.237.341.511.000 | 1.033.935.003.832.590 | 101,74 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 968.293.241.511.000 | 983.623.506.847.429 | 101,58 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 47.944.100.000.000 | 50.311.496.985.161 | 104,94 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1.134.605.721.192 | 2.360.262.925.264 | 208,02 |
| Jumlah | 1.017.371.947.232.192 | 1.036.295.266.757.850 | 47,72 |

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Penerimaan Perpjakan | 1.033.935.003.832.590 | 919.535.334.390.961 | 114.399.669.441.629 | 12,44 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 983.623.506.847.429 | 864.852.313.423.677 | 118.771.193.423.752 | 13,73 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 50.311.496.985.161 | 54.683.020.967.284 | (4.371.523.982.123) | (7,99) |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.360.262.925.264 | 1.769.706.007.605 | 590.556.917.659 | 33,37 |
| Jumlah | 1.036.295.266.757.850 | 921.305.040.398.566 | 114.990.226.359.288 | 12,48 |

B.1.1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

B.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Realisasi Penerimaan
Perpajakan Neto
Rp980.470.822.097.887,00
2.097.887,00*

Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp980.470.822.097.887,00** atau **101,74** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp1.016.237.341.511.000,00**. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp114.399.669.441.629,00** atau **12,44** persen dari realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2011. Kenaikan Penerimaan Perpajakan terutama terjadi pada Pajak Penghasilan (PPH) sebesar **Rp40.393.767.566.308,00**, Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp61.028.694.237.992,00**, Pendapatan Cukai sebesar **Rp18.020.010.844.834,00**, dan Pendapatan Bea Masuk sebesar **Rp3.160.413.389.023,00**.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.033.935.003.832.590,00** atau **101,74** persen dari target, dimana terjadi pengembalian pendapatan sebesar **Rp53.464.181.734.703,00** sehingga realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp980.470.822.097.887,00**.

Realisasi Penerimaan Perpajakan per jenis penerimaan Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12
Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012
(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi Bruto | Pengembalian | Realisasi Netto | % |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Penerimaan Perpajakan | 1.016.237.341.511.000 | 1.033.935.003.832.590 | (53.464.181.734.703) | 980.470.822.097.887 | 101,74 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 968.293.241.511.000 | 983.623.506.847.429 | (2.768.276.741.240) | 930.855.230.106.189 | 101,58 |
| Pendapatan PPh | 513.650.160.000.000 | 484.283.016.840.601 | (19.217.183.600.003) | 465.065.833.240.598 | 94,28 |
| Pendapatan PPN | 336.056.979.511.000 | 371.084.491.032.279 | (33.501.728.811.261) | 337.582.762.221.018 | 110,42 |
| Pendapatan PBB | 29.687.507.000.000 | 28.980.801.281.600 | (12.345.632.796) | 28.668.455.648.804 | 97,62 |
| Pendapatan Cukai | 83.266.625.000.000 | 95.030.359.803.014 | (3.057.355.600) | 95.027.302.447.414 | 114,13 |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 5.631.970.000.000 | 4.244.837.889.935 | (33.961.341.580) | 4.210.876.548.355 | 75,37 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 47.944.100.000.000 | 50.311.496.985.161 | (695.904.993.463) | 49.615.591.991.698 | 104,94 |
| Pendapatan Bea Masuk | 24.737.900.000.000 | 28.890.244.732.223 | (510.208.505.567) | 28.380.036.226.656 | 116,79 |
| Pendapatan Bea Keluar | 23.206.200.000.000 | 21.421.252.252.938 | (185.696.487.896) | 21.235.555.765.042 | 92,31 |

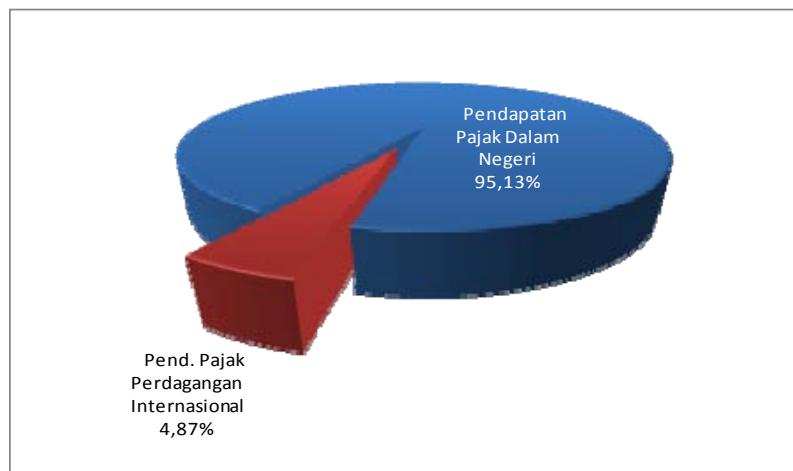
Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2012 dan 2011 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto
TA 2012 dan 2011
(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Rupiah | % |
| Penerimaan Perpajakan | 1.033.935.003.832.590 | 919.535.334.390.961 | 114.399.669.441.629 | 12,44 |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 983.623.506.847.429 | 864.852.313.423.677 | 118.771.193.423.752 | 13,73 |
| Pendapatan PPh | 484.283.016.840.601 | 443.889.249.274.293 | 40.393.767.566.308 | 9,10 |
| Pendapatan PPN | 371.084.491.032.279 | 310.055.796.794.287 | 61.028.694.237.992 | 19,68 |
| Pendapatan PBB | 28.980.801.281.600 | 29.900.911.038.417 | (920.109.756.817) | (3,08) |
| Pendapatan Cukai | 95.030.359.803.014 | 77.010.348.958.180 | 18.020.010.844.834 | 23,40 |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 4.244.837.889.935 | 3.996.007.358.500 | 248.830.531.435 | 6,23 |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 50.311.496.985.161 | 54.683.020.967.284 | (4.371.523.982.123) | (7,99) |
| Pendapatan Bea Masuk | 28.890.244.732.223 | 25.729.831.343.200 | 3.160.413.389.023 | 12,28 |
| Pendapatan Bea Keluar | 21.421.252.252.938 | 28.953.189.624.084 | (7.531.937.371.146) | (26,01) |

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2012 per jenis penerimaan dapat dilihat pada Grafik 3 berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2012



Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp983.623.506.847.429,00** yang berarti mengalami kenaikan sebesar **Rp118.771.193.423.752,00** atau **13,73** persen dibanding realisasi TA 2011 yang besarnya **Rp864.852.313.423.677,00**.

Adapun realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp50.311.496.985.161,00**. Dibandingkan dengan TA 2011, realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 mengalami penurunan sebesar **Rp4.371.523.982.123,00** atau **7,99** persen terutama disebabkan oleh penurunan Bea Keluar sebesar **Rp7.531.937.371.146,00**.

Penurunan Bea Keluar TA 2012 disebabkan oleh penurunan tarif Bea Keluar dan Harga Patokan Ekspor (HPE) sehingga terjadi pergeseran komoditi ekspor dari *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi komoditi turunannya.

Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang menghendaki pembayaran pajaknya melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau bunga yang diterima dan/atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain, Kementerian Keuangan mengatur tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, Pemindahbukuan meliputi:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- b. Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- c. Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

- d. Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
- e. Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak.
- f. Pemindahbukuan karena adanya pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

*Pemindahbukuan (Pbk)
Penerimaan Pajak*

Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2012 adalah sebesar **Rp1.400.997.781.312,00**. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

Pendapatan Pajak Internasional sangat dipengaruhi oleh Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pendapatan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain: Nilai Devisa Bayar, Tarif Efektif Rata-rata dan Nilai Tukar Rupiah atau Kurs. Adapun Bea Keluar dikenakan terhadap barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Tujuan pengenaan Bea Keluar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga komoditi ekspor tertentu di dalam negeri.

B.1.1.1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (Neto)

*Realisasi Pendapatan
Pajak Dalam Negeri
Neto
Rp930.855.230.106.189,00
.00*

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp930.855.230.106.189,00** atau **96,13** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp968.293.241.511.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 terjadi kenaikan sebesar **Rp118.771.193.423.752,00** atau naik **13,73** persen.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri (Bruto)

*Realisasi Pendapatan
Pajak Dalam Negeri
Bruto
Rp983.623.506.847.429
.00*

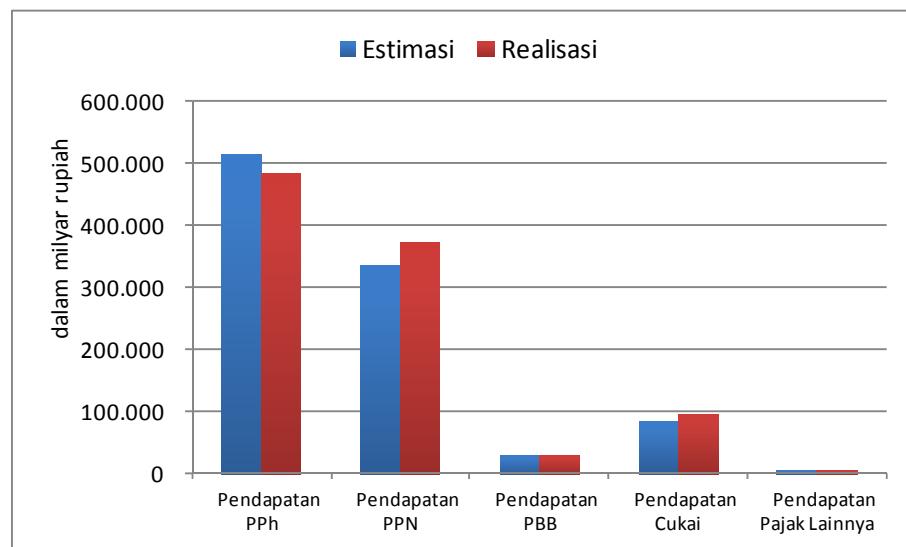
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp983.623.506.847.429,00** atau **101,58** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar **Rp968.293.241.511.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp118.771.193.423.752,00** atau naik **13,73** persen dari realisasi TA 2011.

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Grafik 4 berikut.

Tabel 14
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012

| Uraian | Estimasi | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 968.293.241.511.000 | 983.623.506.847.429 | 101,58 |
| Pendapatan PPh | 513.650.160.000.000 | 484.283.016.840.601 | 94,28 |
| Pendapatan PPN | 336.056.979.511.000 | 371.084.491.032.279 | 110,42 |
| Pendapatan PBB | 29.687.507.000.000 | 28.980.801.281.600 | 97,62 |
| Pendapatan Cukai | 83.266.625.000.000 | 95.030.359.803.014 | 114,13 |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 5.631.970.000.000 | 4.244.837.889.935 | 75,37 |

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012

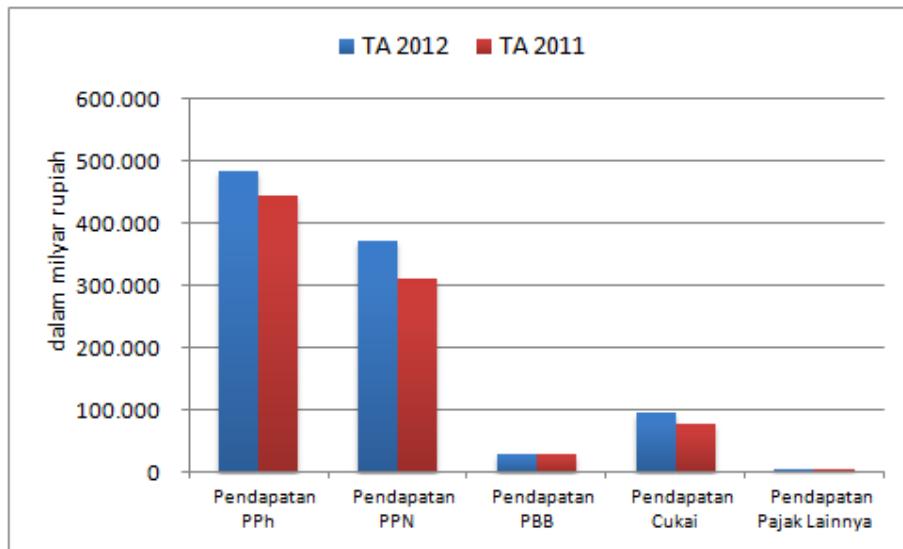


Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 15 dan Grafik 5 berikut.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto
TA 2012 dan 2011

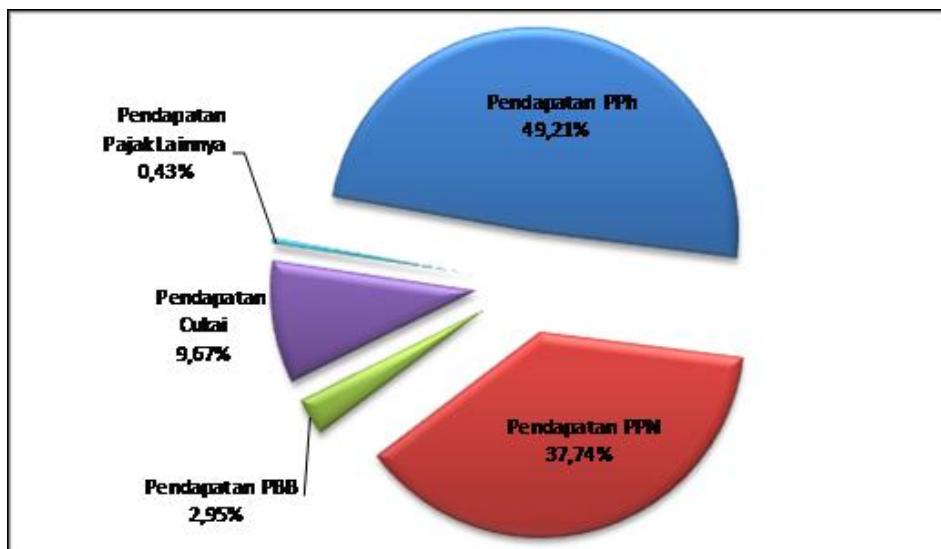
| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 983.623.506.847.429 | 864.852.313.423.677 | 118.771.193.423.752 | 13,73 |
| Pendapatan PPh | 484.283.016.840.601 | 443.889.249.274.293 | 40.399.767.566.308 | 9,10 |
| Pendapatan PPN | 371.084.491.032.279 | 310.055.796.794.287 | 61.028.694.237.992 | 19,68 |
| Pendapatan PBB | 28.980.801.281.600 | 29.900.911.038.417 | (920.109.756.817) | (3,08) |
| Pendapatan Cukai | 95.030.359.803.014 | 77.010.348.958.180 | 18.020.010.844.834 | 23,40 |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 4.244.837.889.935 | 3.996.007.358.500 | 248.830.531.435 | 6,23 |

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 dan 2011



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2012



Jika dibandingkan dengan TA 2011, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan PPh sebesar Rp40.393.767.566.308,00 atau 9,10 persen, PPN sebesar Rp61.028.694.237.992,00 atau 19,68 persen, Pendapatan Cukai Rp18.020.010.844.834 atau 23,40 persen, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp248.830.531.435,00 atau 6,23 persen. Sedangkan Pendapatan PBB mengalami penurunan sebesar Rp920.109.756.187,00 atau 3,08 persen dari tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Cukai TA 2012 sebesar Rp95.030.359.803.014,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.020.010.844.834,00 atau 23,40 persen dari realisasi TA 2011. Penyebab kenaikan tersebut karena kenaikan tarif Cukai HT dan efektifitas pengawasan peredaran MMEA melalui pelekatan pita cukai.

Pencapaian penerimaan pajak yang mencapai target APBN-P TA 2012 adalah penerimaan PPh Migas dan PPN & PPnBM. Pencapaian PPh Migas mencapai 122,88 persen dari target atau sebesar Rp83.460,91 miliar, sementara PPN & PPnBM mencapai 100,42 persen dari target APBN-P 2012 atau sebesar Rp371.084,49 miliar. Dilihat dari komposisi penerimaan Pajak Dalam Negeri, penerimaan PPh nonmigas menyumbang kontribusi terbesar, namun demikian pertumbuhan penerimanya hanya tumbuh sebesar 6,49 persen.

Beberapa hal yang menjadi penyebab naik/turunnya beberapa penerimaan pajak di TA 2012 ini antara lain:

1. Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp79.672,76 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,23 persen. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 ini tidak jauh dari pertumbuhan pada tahun 2011 yang meningkat 20,93 persen. Hal itu dapat terlihat sejalan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir yang relatif stabil.
2. PPh Pasal 22 mengalami pertumbuhan sebesar 11,21 persen dengan nilai penerimaan sebesar Rp5.547,50 miliar. Pencapaian penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2012 masih dibawah target tahun 2012. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal kementerian/lembaga pemerintahan. Penyerapan anggaran pemerintah yang diserap kementerian dan lembaga tahun 2012 hanya mencapai 87,5 persen atau Rp479,3 triliun dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp547,9 triliun. Pencapaian penyerapan anggaran tahun 2012 ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 yang mencapai 90,5 persen.
3. PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor mengalami pertumbuhan sebesar 11,21 persen, 18,31 persen, dan 56,72 persen dengan nilai sebesar Rp31.614,34 miliar untuk PPh Pasal 22 Impor, Rp126.631,92 miliar untuk PPN Impor dan Rp8.423,37 miliar untuk PPnBM Impor. Kondisi yang mempengaruhi peningkatan realisasi tersebut adalah tumbuhnya impor dengan pertumbuhan mencapai 9,40 persen selama periode Januari 2012 s.d November 2012 dengan nilai impor mencapai US\$176,09 miliar ([data http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Hal ini ditopang oleh naiknya nilai impor non migas terutama golongan barang mesin dan peralatan mekanik yang mencapai US\$38,85 miliar atau meningkat sebesar 17,94 persen seiring dengan meningkatnya investasi yang mencapai Rp229.900 miliar atau meningkat 27,0 persen (data BKPM s.d Tw.III 2012).
4. Penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp20.535,75 miliar atau tumbuh 8,50 persen dibandingkan penerimaan 2011. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2012 mengalami perlambatan disebabkan oleh karena menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian akibat dari krisis global, kondisi geografis yang tidak optimal (rendahnya kadar konsentrasi mineral di area pertambangan), adanya gangguan sosial (mogok kerja), serta gangguan keamanan

memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 23.

5. Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mengalami pertumbuhan 14,31 persen atau sebesar Rp3.782,21 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang semakin membaik.
6. PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 170.296,53 miliar merupakan jenis pajak dengan kontribusi terbesar. Namun demikian pertumbuhan pada PPh Pasal 25/29 Badan mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,85 persen dimana pada tahun sebelumnya pertumbuhannya mencapai 17,85 persen. Secara umum, perlambatan pertumbuhan pada jenis PPh 25/29 Badan antara lain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor seperti pada sektor industri pengolahan dan menurunnya produksi di sektor pertambangan dan penggalian terkait dengan kondisi geografis (rendahnya kadar konsentrasi mineral di area pertambangan), gangguan keamanan serta terjadinya mogok kerja. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan berkontribusi 50,82 persen di Tahun 2012, lebih rendah dari kontribusi tahun 2011 sebesar 58,59 persen.
7. Sama halnya dengan PPh Pasal 25/29 Badan, penerimaan PPh Pasal 26 juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 29,12 persen di tahun 2011 menjadi -7,48 persen di tahun 2012. Melambatnya realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2012 dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga beberapa Wajib Pajak menurunkan pembayaran PPh Pasal 26 nya.
8. Penerimaan PPh Final mengalami pertumbuhan yang cukup baik sebesar 18,83 persen atau secara nominal sebesar Rp 60.486,44 miliar. Pertumbuhan PPh final ditopang oleh meningkatnya pembayaran PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tumbuh sebesar 34,94 persen dan atas jasa konstruksi sebesar 33,52 persen dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia.
9. Penerimaan PPN Dalam negeri sebesar Rp224.895,17 miliar atau mencapai 97,97 persen. Pencapaian penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2012 lebih rendah dari target APBN-P 2012 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya dibawah dari angka yang diharapkan (realisasi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dari target 6,5 persen). Namun demikian jika dilihat dari sisi pertumbuhan, penerimaan PPN Dalam Negeri masih tumbuh sebesar 22,07 persen, hal ini dipengaruhi oleh adanya tambahan subsidi BBM sebesar Rp7.000 miliar serta perbaikan sistem administrasi registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.
10. Penerimaan PPnBM DN mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 29,70 persen atau mencapai Rp 10.936,55 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor sebagaimana data yang berasal dari Gaikindo, bahwa produksi otomotif tahun 2012 meningkat 24,84 persen dan terjual sebanyak 1.116.230 unit.
11. Pencapaian PBB di tahun 2012 mencapai 97,57 persen dengan pertumbuhan -3,09 persen. Pencapaian penerimaan PBB tahun 2012 sebesar Rp 28.980,80 miliar lebih

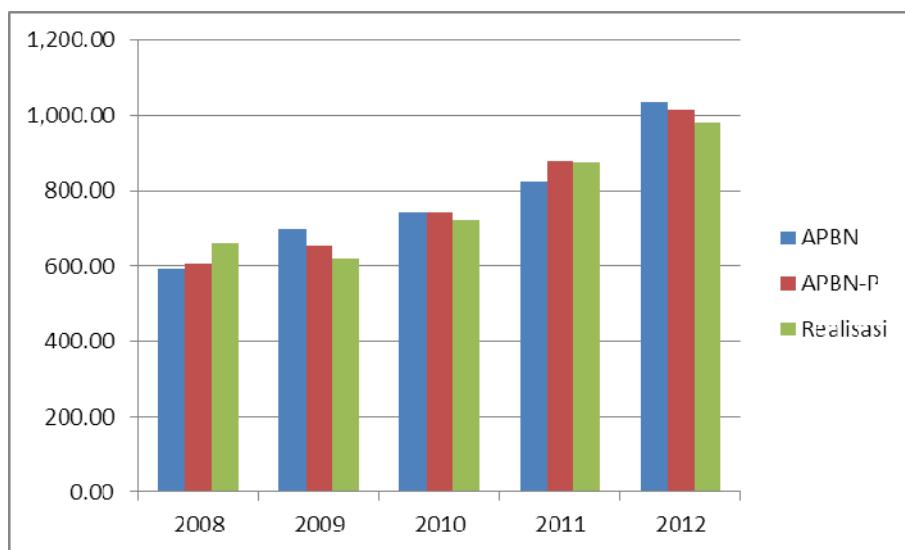
rendah dari angka target penerimaan APBN-P 2012 sebesar Rp 29.687,51 miliar disebabkan karena perubahan mekanisme pengenaan areal *on-shore* yang dikenakan tidak seluas Wilayah Kerja, namun seluas areal yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan (PMK.15/PMK.03/2012). Selain itu, adanya penangguhan pembayaran SPPT PBB Migas oleh Dirjen Anggaran dengan jumlah sebesar Rp 1.935,80 miliar turut mempengaruhi pencapaian penerimaan PBB Tahun 2012.

12. Penerimaan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan 7,23 persen dan mencapai Rp4.244,84 miliar yang didominasi oleh penjualan benda materai dan penerimaan bea materai yang tumbuh 8,84 persen dan 4,07 persen.

*Tren realisasi
penerimaan perpajakan
selama 5 tahun terakhir*

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp980,20 triliun atau meningkat sebesar 49 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008 yang sebesar Rp658,70 triliun. Pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi menjadi sebesar 95,09 persen. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,3 persen dari pagu, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen. Selama tahun 2012 tingkat realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan menjadi 96,45 persen dari pagu APBN-P 2012. Target APBN dan APBN-P serta realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2012



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

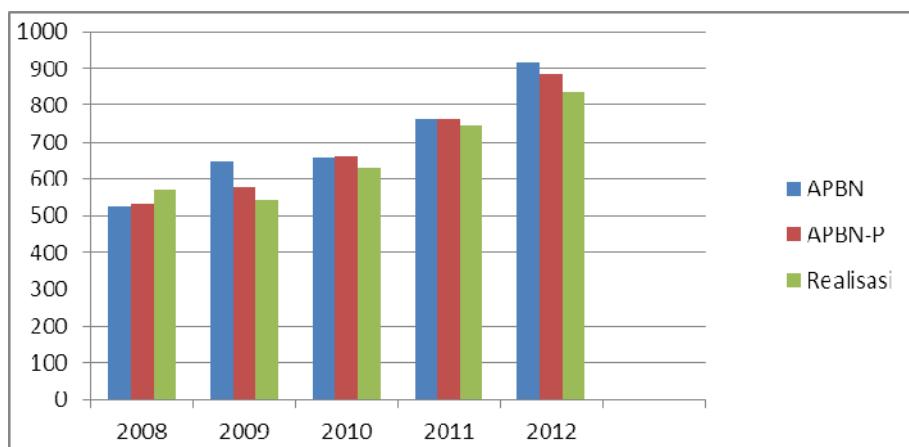
Realisasi penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp930.542.644.885.415,00 atau mencapai 96,10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp968.293.241.511.000,00.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri dikelola oleh dua Satuan Kerja di Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola penerimaan pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan cukai.

Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan pajak, cenderung mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp835,83 triliun atau kurang Rp49,20 triliun dari target APBN-P sebesar Rp885,03 triliun dan kurang 78,37 triliun dari target APBN sebesar Rp914,20 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 mencapai 106,82 persen dari target APBN-P. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai 94,33 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp32,72 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 mencapai 94,85 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp34,04 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 mencapai 97,26 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp20,95 triliun dari target.

Target dan realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008-2012 dalam triliun rupiah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik Target APBN/APBN-P dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Target penerimaan pajak ditetapkan dalam APBN dan selanjutnya apabila terjadi perubahan target, ditetapkan dalam APBN-P. Selama lima tahun terakhir, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target APBN dan APBN-P dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan APBN dan APBN-P Tahun 2008 – 2012 (Dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Jenis Pajak | Target | | Realisasi | Selisih | |
|-------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | APBN | APBN-P | | Realisasi dengan APBN | Realisasi dengan APBN-P |
| 2008 | A. PPh Non Migas | 264,31 | 251,37 | 249,96 | (14,36) | (1,41) |
| | B. PPN dan PPnBM | 187,63 | 195,46 | 210,25 | 22,63 | 14,79 |
| | C. PBB dan BPHTB | 29,01 | 30,70 | 30,65 | 1,64 | (0,05) |
| | D. Pajak lainnya | 2,94 | 3,35 | 3,03 | 0,09 | (0,32) |
| | E. PPh Migas | 41,65 | 53,65 | 77,12 | 35,47 | 23,47 |
| | Jumlah | 525,54 | 534,53 | 571,01 | 45,47 | 36,48 |
| 2009 | A. PPh Non Migas | 296,94 | 291,18 | 267,64 | (29,30) | (23,54) |
| | B. PPN dan PPnBM | 249,51 | 203,08 | 193,20 | (56,31) | (9,89) |
| | C. PBB dan BPHTB | 36,67 | 30,84 | 30,67 | (6,00) | (0,17) |
| | D. Pajak lainnya | 4,27 | 3,25 | 3,12 | (1,16) | (0,13) |
| | E. PPh Migas | 56,72 | 49,03 | 50,04 | (6,68) | 1,01 |
| | Jumlah | 644,11 | 577,38 | 544,67 | (99,45) | (32,72) |
| 2010 | A. PPh Non Migas | 303,96 | 306,84 | 297,96 | (6,00) | (8,87) |
| | B. PPN dan PPnBM | 269,54 | 262,96 | 230,05 | (39,48) | (32,91) |
| | C. PBB dan BPHTB | 33,90 | 32,47 | 36,61 | 2,71 | 4,13 |
| | D. Pajak lainnya | 3,85 | 3,84 | 3,97 | 0,12 | 0,13 |
| | E. PPh Migas | 47,02 | 55,38 | 58,87 | 11,85 | 3,49 |
| | Jumlah | 658,27 | 661,49 | 627,46 | (30,81) | (34,04) |
| 2011 | A. PPh Non Migas | 364,94 | 366,75 | 358,01 | (6,93) | (8,73) |
| | B. PPN dan PPnBM | 312,11 | 298,44 | 277,79 | (34,32) | (20,65) |
| | C. PBB dan BPHTB | 27,68 | 29,06 | 29,89 | 2,21 | 0,83 |
| | D. Pajak lainnya | 4,20 | 4,19 | 3,93 | (0,27) | (0,27) |
| | E. PPh Migas | 55,55 | 65,23 | 73,10 | 17,54 | 7,86 |
| | Jumlah | 764,49 | 763,67 | 742,72 | (21,77) | (20,96) |
| 2012 | A. PPh Non Migas | 459,05 | 445,73 | 381,60 | (77,44) | (64,13) |
| | B. PPN dan PPnBM | 352,95 | 336,06 | 337,58 | (15,37) | 1,53 |
| | C. PBB dan BPHTB | 35,65 | 29,69 | 28,97 | (6,68) | (0,72) |
| | D. Pajak lainnya | 5,63 | 5,63 | 4,21 | (1,42) | (1,42) |
| | E. PPh Migas | 60,92 | 67,92 | 83,46 | 22,55 | 15,54 |
| | Jumlah | 914,20 | 885,03 | 835,82 | -78,36 | (49,20) |
| | Total tidak mencapai target | | | | (230,38) | (136,91) |

Perubahan target penerimaan pajak dari APBN menjadi APBN-P disebabkan antara lain karena terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik antara lain meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, rata-rata nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, harga minyak ICP, lifting minyak, suku bunga SBI, yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang

berdampak cukup signifikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara agar menjadi lebih realistik. Perkembangan tersebut salah satunya adalah kinerja perekonomian Indonesia Tahun 2012 yang diperkirakan mengalami perlambatan dan mencapai sebesar 6,5% dari yang semula diperkirakan sebesar 6,7%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 melebihi target yaitu mencapai 106,84% dari target APBN-P. Namun tahun 2009 – 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target berkisar 94,31% - 97,26% dari target APBN-P. Dengan demikian selama periode empat tahun terakhir (2009 – 2012) penerimaan pajak yang tidak tercapai apabila dibandingkan dengan APBN-P sebesar Rp136.564.598.965.992 dan dengan APBN sebesar Rp233.760.009.921.992.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 – 2012 tidak mencapai target penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan data pihak ketiga sebagai pembanding untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dimaklumi, sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sistem self assessment yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan dari aparatur perpajakan. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka melaksanakan sistem sistem *self assessment* tersebut, telah diatur ketentuan dalam Pasal 35A Undang-Undang KUP berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat sampai dengan pertengahan tahun 2011 Pasal 35A UU KUP belum dapat diimplementasikan karena belum dibuat peraturan pelaksanaan di bawahnya, maka saat menyampaikan pidato pada acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2010 kepada Presiden tanggal 1 Juni 2011, Ketua BPK menegaskan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 35A UU KUP dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun data perpajakan dari para pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut dan menjadikannya sebagai pusat data pajak yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun peraturan pemerintah tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 27 Februari 2012, namun secara teknis peraturan dimaksud baru dapat diimplementasikan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur rincian jenis data, tata cara penyampaian, dan saat penyampaian data dan informasi perpajakan.

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 yang mulai berlaku efektif tanggal 4 Januari 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menetapkan 14 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain (ILAP) yang diminta memberikan data. Selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 yang menambah lima ILAP.

Masih terbatasnya instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain (ILAP) yang ditetapkan dalam PMK ini disebabkan antara lain adanya kekurangpahaman ILAP terhadap ketentuan perpajakan, dan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi ILAP yang dipahami oleh mereka bersifat rahasia termasuk apabila data dan informasi tersebut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berakibat pada resistensi atau penolakan untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, agar Pasal 35A UU KUP dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan adanya pemahaman dari seluruh ILAP dan masyarakat bahwa Pasal 35A Undang-Undang KUP bersifat lex specialis bagi Undang-Undang lainnya.

*Realisasi Pengembalian
Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp52.768.276.741.240,
00*

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar **Rp52.768.276.741.240,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16
Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | (dalam rupiah) | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 52.768.276.741.240 | 45.125.198.866.204 | 7.643.077.875.036 | 16,94 |
| Pendapatan PPh | 19.217.183.600.003 | 12.780.598.096.532 | 6.436.585.503.471 | 50,36 |
| Pendapatan PPN | 33.501.728.811.261 | 32.263.710.525.245 | 1.238.018.286.016 | 3,84 |
| Pendapatan PBB | 12.345.632.796 | 9.218.833.354 | 3.126.799.442 | 33,92 |
| Pendapatan Cukai | 3.057.355.600 | 3.820.585.340 | (763.229.740) | (19,98) |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 33.961.341.580 | 67.850.825.733 | (33.889.484.153) | (49,95) |

B.1.1.2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional (Neto)

*Realisasi Pendapatan
Pajak Perdagangan
Internasional Neto
Rp49.615.591.991.698,
00*

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp49.615.591.991.698,00** atau **104,94** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp47.944.100.000.000,00**.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional (Bruto)

*Realisasi Pendapatan
Pajak Perdagangan
Internasional Bruto
Rp50.311.496.985.161,
00*

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp50.311.496.985.161,00** atau **104,94** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp47.944.100.000.000,00**. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Masuk sebesar **Rp28.890.244.732.223,00** atau **116,79** persen dari target yang ditetapkan dan Pendapatan Bea Keluar sebesar **Rp21.421.252.252.938,00** atau **92,31** persen dari target yang ditetapkan. Dalam target Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 sudah termasuk target Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar **Rp600.000.000.000,00**. Untuk target BM-DTP masih tetap diberikan mengingat insentif fiskal masih harus diberikan kepada

beberapa sektor untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 mengalami penurunan sebesar **Rp4.371.523.982.123,00** atau **7,99** persen dari realisasi TA 2011 terutama berasal dari penurunan Bea Keluar sebesar **Rp7.531.937.371.146,00**. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012
(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 47.944.100.000.000 | 50.311.496.985.161 | 104,94 |
| Pendapatan Bea Masuk | 24.737.900.000.000 | 28.890.244.732.223 | 116,79 |
| Pendapatan Bea Keluar | 23.206.200.000.000 | 21.421.252.252.938 | 92,31 |

Adapun tantangan yang dihadapi dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Sektor Bea Masuk

1. Konsekuensi dari banyaknya Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema *Free Trade Agreement* (FTA) pada IJ-EPA, EFTA/CEITA ASEAN, China, Korea;
2. Adanya Fasilitas Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk;
3. Tarif umum Bea Masuk (MFN) yang cenderung turun (tarif efektif rata-rata Bea Masuk menurun);
4. Kebijakan non tarif (*Non Tarif Measure*) yang berorientasi pada pengendalian dan pembatasan barang impor serta penggunaan produksi dalam negeri;
5. Implementasi *Free Trade Zone* (FTZ) di Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

b. Sektor Bea Keluar

1. Harga internasional *Crude Palm Oil* (CPO) cenderung fluktuatif, sehingga berpengaruh pada struktur tarif Bea Keuar dan berpengaruh pada volume ekspor;
2. Kebijakan hilirisasi produk CPO menyebabkan pengusaha cenderung mengekspor produk turunan CPO yang mempunyai tarif Bea Keluar;
3. Perizinan ekspor bijih mineral dari instansi teknis yang terlambat dan dipersulit, sehingga menurunkan volume ekspor;
4. Pasar internasional beberapa komoditi utama ekspor yang sedang menurun karena terjadinya *Global Economic Slow-Down* sehingga berpengaruh pada volume ekspor.

Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor dan Peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang;
2. Perubahan kebijakan bea keluar, terutama berkaitan dengan tarif dan jenis barang kena bea keluar;
3. Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui pengembangan Risk Management peningkatan patroli darat dan laut dan Peningkatan pengawasan di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan.

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto
TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | (dalam rupiah) | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 50.311.496.985.161 | 54.683.020.967.284 | (4.371.523.982.123) | (7,99) |
| Pendapatan Bea Masuk | 28.890.244.732.223 | 25.729.831.343.200 | 3.160.413.389.023 | 12,28 |
| Pendapatan Bea Keluar | 21.421.252.252.938 | 28.953.189.624.084 | (7.531.937.371.146) | (26,01) |

Pendapatan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain: Nilai Devisa Bayar, Tarif Efektif Rata-rata dan Nilai Tukar Rupiah atau Kurs. Ketiga variabel tersebut berbanding lurus terhadap peningkatan nilai pendapatan Bea Masuk. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan meningkatkan Devisa Bayar yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan Bea Masuk. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan dampak penurunan terhadap penerimaan, yaitu antara lain: adanya komitmen perdagangan internasional, dimana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan. Kesepakatan seperti: ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), IJEPA dengan Jepang dan ASEAN-*China Free Trade Area* (ACFTA), berdampak pada penurunan tarif, demikian pula adanya berbagai fasilitas perdagangan dan industri yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing.

Variabel lain yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk adalah Nilai tukar Rupiah/kurs terhadap US\$, yang menjadi salah satu variabel Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM). Faktor nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk, dimana nilai tukar rupiah yang tinggi cenderung meningkatkan Bea Masuk, namun disisi lain dapat mempengaruhi tingkat importasi, yang berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. Terjadinya penurunan Tarif Efektif rata-rata dan nilai tukar Rupiah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk.

Realisasi Pendapatan Bea Masuk selama TA 2012 tercatat sebesar Rp28.890.244.732.223,00 atau 116,79 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar Rp24.737.900.000.000,00. Hal ini berarti Pendapatan Bea Masuk TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp3.160.413.389.023,00 atau 12,28 persen dari realisasi TA 2011.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2012 tersebut disebabkan oleh meningkatnya importasi yang ditunjukkan dengan naiknya *Dutiable impor* sebesar US\$146,14 Miliar (3,59%) dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping itu meningkatnya tarif efektif rata-rata sebesar 2,06% atau naik 0,02% dari periode sebelumnya.

Tujuan pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 antara lain adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Pengenaan Bea Keluar terhadap beberapa komoditi ekspor tidak semata-mata ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara

tetapi ada tujuan lain sebagaimana disebutkan di atas. Saat ini komoditi ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah ekspor komoditi CPO dan turunannya, kayu, kulit, rotan, dan biji kakao.

Realisasi Pendapatan Bea Keluar selama TA 2012 tercatat sebesar **Rp21.421.252.252.938,00** atau **92,31** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2012 sebesar **Rp23.206.200.000.000,00**. Rendahnya tingkat pencapaian Bea Keluar disebabkan harga pasaran internasional CPO dan Turunannya mengalami penurunan. Penerimaan Bea Keluar dari ekspor mineral yang mulai berlaku mulai Juni 2012 belum efektif menghasilkan penerimaan. Sampai dengan Desember 2012 Penerimaan Bea Keluar dari ekspor mineral logam sebesar Rp. 1.746,41 Miliar.

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2012 menurun cukup signifikan yaitu dari sebesar **Rp28.953.189.624.084,00** pada Tahun 2011 menjadi sebesar **Rp21.421.252.252.938,00** pada Tahun 2012. Penurunan Pendapatan Bea Keluar pada Tahun 2012 antara lain disebabkan:

- a. Tarif Bea Keluar dan Harga Patokan Eksport (HPE) Tahun 2012 lebih rendah dari Tahun 2011 menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan Bea Keluar selama Tahun 2012;
- b. Terjadinya pergeseran komoditi eksport dari CPO menjadi komoditi turunannya terutama *Refined Bleached Deodorized* (RBD) karena tarif Bea Keluarnya rendah;
- c. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat atas lalu lintas perdagangan CPO dan produk turunannya baik eksport maupun dalam negeri dari kemungkinan adanya upaya penghindaran Bea Keluar melalui berbagai modus penyelundupan mengingat harga CPO di pasaran internasional masih tinggi.

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp695.904.993.463,00

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 adalah sebesar **Rp695.904.993.463,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pend. Pajak Perdagangan Internasional | 695.904.993.463 | 687.921.486.205 | 7.983.507.258 | 1,16 |
| Pendapatan Bea Masuk | 510.208.505.567 | 586.812.093.834 | (76.603.588.267) | (13,05) |
| Pendapatan Bea Keluar | 185.696.487.896 | 101.109.392.371 | 84.587.095.525 | 83,66 |

B.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Neto)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto Rp2.359.109.958.283,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp2.359.109.958.283,00** atau **208,02** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp1.134.605.721.192,00**.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bruto)

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Bruto
Rp2.360.262.925.264,00*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp2.360.262.925.264,00** atau **208,02** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp1.134.605.721.192,00**. Besarnya realisasi PNBP TA 2012 dapat dilihat dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012

(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi | % |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pendapatan PNBP Lainnya | 355.648.561.192 | 857.577.231.710 | 241,13 |
| Pendapatan BLU | 778.957.160.000 | 1.502.685.693.554 | 192,91 |
| Jumlah | 1.134.605.721.192 | 2.360.262.925.264 | 208,02 |

Apabila dibandingkan dengan TA 2011, PNBP TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp590.556.917.659,00** atau **33,37** persen dari realisasi TA 2011. Kenaikan PNBP ini terjadi pada pos-pos PNBP yaitu PNBP Lainnya mengalami kenaikan sebesar **Rp209.436.027.294,00** atau **32,31** persen dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami kenaikan sebesar **Rp381.120.890.365,00** atau **33,98** persen.

Kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya berasal dari penerimaan Pendapatan Jasa Perbendaharaan yaitu pengelolaan *Treasury Single Account* (TSA). Adapun kenaikan Pendapatan Badan Layanan Umum terutama terjadi pada satuan kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yaitu Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya.

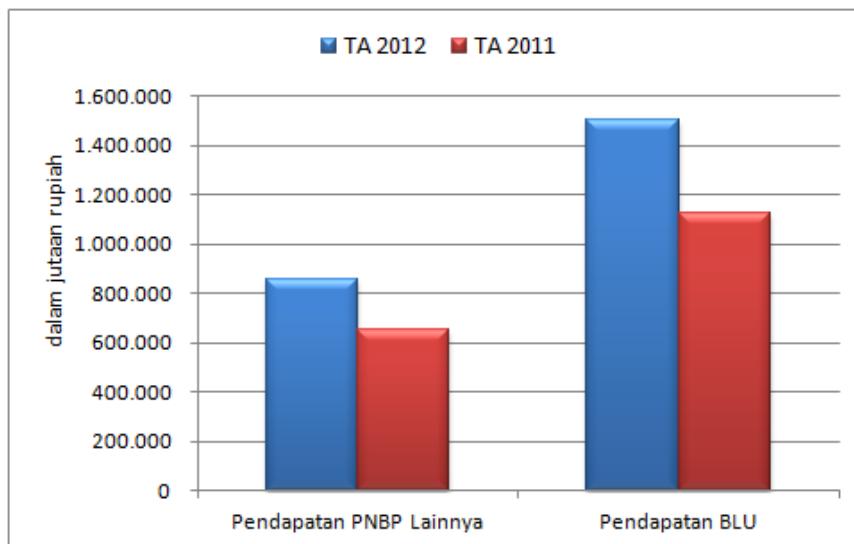
Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 21 dan Grafik 7 berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
TA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

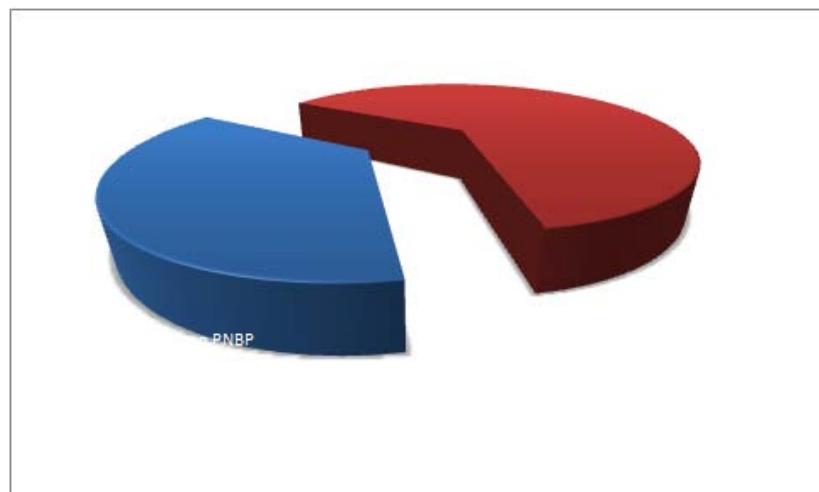
| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pendapatan PNBP Lainnya | 857.577.231.710 | 648.141.204.416 | 209.436.027.294 | 32,31 |
| Pendapatan BLU | 1.502.685.693.554 | 1.121.564.803.189 | 381.120.890.365 | 33,98 |
| Jumlah | 2.360.262.925.264 | 1.769.706.007.605 | 590.556.917.659 | 33,37 |

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
TA 2012 dan 2011



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 8 berikut.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2012



B.1.1.2.1. Pendapatan PNBP Lainnya (Neto)

*Realisasi Pendapatan
PNBP Lainnya Neto
Rp856.424.264.729,00*

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2012 adalah sebesar Rp856.424.264.729,00 atau 241,13 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012, yaitu sebesar Rp355.648.561.192,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2011, Pendapatan PNBP Lainnya TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp209.436.027.294,00 atau 32,31 persen dari realisasi TA 2011.

Pendapatan PNBP Lainnya (Bruto)

*Realisasi Pendapatan
PNBP Lainnya Bruto
Rp857.577.231.710,00*

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp857.577.231.710,00** atau **241,13** persen dari target sebesar **Rp355.648.561.192,00** yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012. Pendapatan PNBP Lainnya TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp209.436.027.294,00** atau **32,31** persen dari realisasi TA 2011. Besarnya realisasi Pendapatan PNBP Lainnya dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2012

| Uraian | Estimasi | Realisasi | (dalam rupiah) |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtempahan) serta Pendapatan dari Penjualan | 4.570.521.804 | 37.497.715.460 | 820,43 |
| Pendapatan Jasa | 348.833.272.800 | 659.283.528.662 | 189,00 |
| Pendapatan Bunga | 0 | 153.077 | 0,00 |
| Pendapatan Pendidikan | 0 | 174.000.000 | 0,00 |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 26.411.151 | 97.525.495.002 | 369.258,78 |
| Pendapatan Lain-lain | 2.218.355.437 | 63.096.339.509 | 2.844,28 |
| Jumlah | 355.648.561.192 | 857.577.231.710 | 241,13 |

Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Bruto
TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN | 37.497.715.460 | 37.537.226.245 | (39.510.785) | (0,11) |
| Pendapatan Jasa | 659.283.528.662 | 486.164.070.905 | 173.119.457.757 | 35,61 |
| Pendapatan Bunga | 153.077 | 16.021.292 | (15.868.215) | (99,04) |
| Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi | 0 | 506.880 | (506.880,00) | (100,00) |
| Pendapatan Pendidikan | 174.000.000 | 227.918.000 | (53.918.000,00) | (23,66) |
| Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi | 0 | 8.600.000 | (8.600.000,00) | (100,00) |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 97.525.495.002 | 105.887.365.290 | (8.361.870.288,00) | (7,90) |
| Pendapatan Lain-lain | 63.096.339.509 | 18.299.495.804 | 44.796.843.705,00 | 244,80 |
| Jumlah | 857.577.231.710 | 648.141.204.416 | 209.436.027.294,00 | 32,31 |

Jika dibandingkan dengan TA 2011, terjadi kenaikan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sebesar **Rp209.436.027.294,00** atau **32,31** persen. Kenaikan yang signifikan terutama terjadi pada pendapatan atas Pengelolaan *Treasury Single Account (TSA)* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengalami kenaikan sebesar **Rp83.699.976.987,00** akibat adanya implementasi PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, yang menyatakan bahwa PNBP yang dihasilkan dari penertiban SP2D dalam rangka TSA dibukukan pada SAI Bagian Anggaran 015.08

mulai 1 Januari 2012 (pada TA 2011 pendapatan TSA dibukukan sebagai pendapatan Bagian Anggaran 999). Kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya juga terjadi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, yaitu berupa pengembalian belanja lainnya TAYL atas nilai sisa pekerjaan renovasi gedung kantor DJPU TA 2011 yang belum diselesaikan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk sebesar **Rp768.258.211,00** dan pengembalian belanja lainnya TAYL atas perjalanan dinas TA 2011 sebesar **Rp40.098.100,00**.

*Realisasi Pengembalian
Pendapatan PNBP
Lainnya
Rp1.152.966.981,00*

Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2012 adalah sebesar **Rp1.152.966.981,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya
TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | (dalam rupiah) | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) | 11.695.463 | 158.674.456 | (146.978.993) | (92,63) |
| Pendapatan Jasa | 855.719.297 | 205.683.239 | 650.036.058 | 316,04 |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 15.577.884 | 0 | 15.577.884,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 269.974.337 | 2.241.345 | 267.732.992,00 | 11.945,19 |
| Jumlah | 1.152.966.981 | 366.599.040 | 786.367.941,00 | 214,50 |

B.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (Neto)

*Realisasi Pendapatan
BLU Neto
Rp1.502.685.693.554,00*

Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.502.682.693.554,00** atau mencapai **192,91** persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 yaitu sebesar **Rp778.957.160.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2011, Pendapatan BLU TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp381.120.890.365,00** atau **33,98** persen dari realisasi TA 2011.

Pendapatan Badan Layanan Umum (Bruto)

*Realisasi Pendapatan
BLU Bruto
Rp1.502.685.693.554,00*

Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.502.685.693.554,00** atau **192,91** persen dari target sebesar **Rp778.957.160.000,00** yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012. Pendapatan BLU TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp381.107.390.365,00** atau **33,98** persen dari realisasi TA 2011.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25
Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012

| Uraian | Estimasi | Realisasi | (dalam rupiah) | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--|
| | | | % | |
| Pendapatan Jasa Layanan Umum | 690.611.671.000 | 867.166.738.870 | 125,57 | |
| Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum | 0 | 13.500.000 | 0,00 | |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | 0 | 13.358.952.300 | 0,00 | |
| Pendapatan BLU Lainnya | 88.345.489.000 | 622.146.502.384 | 704,22 | |
| Jumlah | 778.957.160.000 | 1.502.685.693.554 | 192,91 | |

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| Pendapatan Jasa Layanan Umum | 867.166.738,870 | 60.856.130,119 | 806.310.608,751 | 1.324,95 |
| Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | 13.358.952,300 | 4.107.070,000 | 9.251.882,300 | 225,27 |
| Pendapatan BLU Lainnya | 622.146.502,384 | 1.056.601.603,070 | (434.455.100.686,00) | (41,12) |
| Jumlah | 1.502.685.693,554 | 1.121.564.803,189 | 381.120.890.365,00 | 33,98 |

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011 mencakup 3 (tiga) unit satker Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan TA 2011, Realisasi Pendapatan BLU TA 2012 mengalami kenaikan sebesar **Rp381.120.890.365,00** atau **33,98** persen karena adanya kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar **Rp806.310.608.751,00** atau sebesar **1.324,95** persen dan kenaikan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU sebesar **Rp9.251.882.300,00** atau **225,27** persen. Namun terjadi penurunan pada Pendapatan BLU lainnya sebesar **Rp434.455.100.686,00** atau **41,12** persen dari TA 2011.

Kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar **Rp806.310.608.751,00** terdiri dari kenaikan Pendapatan Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah sebesar **Rp384.482.753.505,00** terutama dari kenaikan Penerimaan Hasil Dana Kelolaan BLU PIP dari bunga pinjaman Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kenaikan Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya pada LPDP sebesar **Rp428.349.818.048,00**. Sedangkan Pendapatan Jasa Layanan Umum pada STAN mengalami penurunan sebesar **Rp6.521.962.802,00** yaitu berupa Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu tidak ada penerimaan mahasiswa baru Diploma I dan III reguler untuk TA 2012/2013.

Kenaikan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU sebesar **Rp9.251.882.300,00** seluruhnya merupakan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU pada STAN.

Penurunan Pendapatan BLU Lainnya sebesar **Rp434.455.100.686,00** atau sebesar **41,12** persen dari TA 2011 disebabkan terutama dari penurunan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU pada PIP, yaitu penerimaan bunga deposito jangka pendek yang dananya dialihkan menjadi pinjaman .

Realisasi Pendapatan BLU Bruto berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27
Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2012 Berdasarkan Satuan Kerja

(dalam rupiah)

| Uraian | Estimasi | Realisasi | % |
|---|------------------------|--------------------------|---------------|
| Pusat Investasi Pemerintah (PIP) | 759.112.160.000 | 1.058.537.639.078 | 139,44 |
| Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP) | 0 | 428.349.818.048 | 0,00 |
| Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) | 19.845.000.000 | 15.798.236.428 | 79,61 |
| Jumlah | 778.957.160.000 | 1.502.685.693.554 | 192,91 |

Realisasi Pengembalian Pendapatan BLU Rp0,00 Tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan BLU TA 2012 dan 2011.

B.1.2. HIBAH

Realisasi Penerimaan Hibah Rp0,00 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, oleh karena itu di dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

B.2.BELANJA

Realisasi Belanja Neto Rp16.325.448.043.171,00

Realisasi Belanja Kementerian KeuanganNetopadaTA 2012 adalah sebesar Rp16.325.448.043.171,00 atau 93,81persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp17.402.097.003.000.00. Adapun Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Bruto padaTA 2012 adalah sebesar Rp16.350.636.678.743,00 atau 93,96persen dari pagu belanja. Dalam Tahun Anggaran 2012 jumlah pengembalian belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp25.188.635.572,00sehingga jumlah Realisasi Belanja Kementerian Keuangan neto adalah sebesar Rp16.325.448.043.171,00.

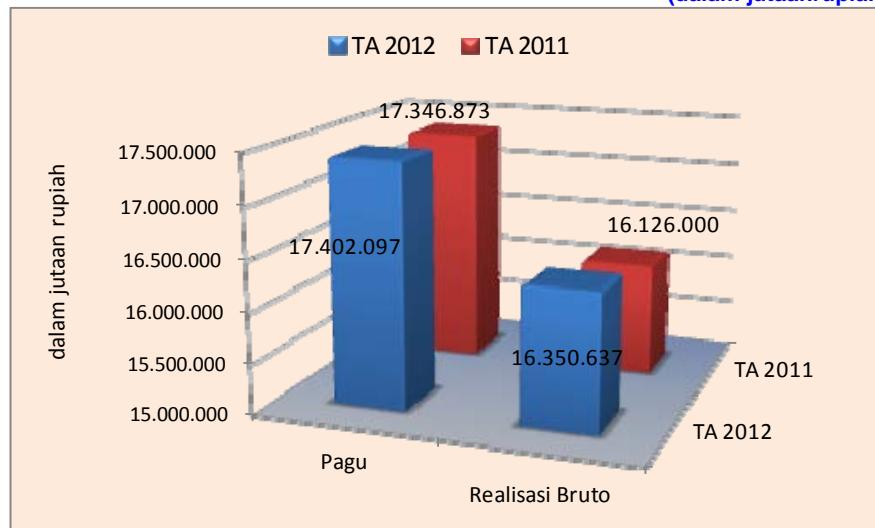
Realisasi belanja netoTA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp225.114.822.882,00 atau 1,40 persen dari realisasi belanja netoTA 2011 sebesar Rp16.100.333.220.289,00. Realisasi belanja tersebut termasuk belanja pembayaran imbalan bunga sebesar Rp615.634.747.251,00. Apabila angka ini dikeluarkan maka realisasi belanja Kementerian Keuangan (tidak memperhitungkan pengembalian belanja) adalah sebesar Rp15.735.001.931.492,00 atau 90,42persen dari pagu.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Kementerian Keuangan TA 2012 dan 2011

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Kementerian KeuanganTA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Grafik 9berikut.

**Grafik9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2012 dan 2011**

(dalam jutaanrupiah)



| URAIAN | TA 2012 | TA 2011 |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Pagu | 17.402.097.003.000 | 17.346.872.669.000 |
| Realisasi Bruto | 16.350.636.678.743 | 16.125.999.666.457 |

RealisasiBelanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan.

Belanja Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Sumber Dana, Unit Eselon I, Fungsi, Program dan Jenis Belanja.

1. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Sumber Dana

Realisasi Belanja Bruto TA 2012 Menurut Sumber Dana

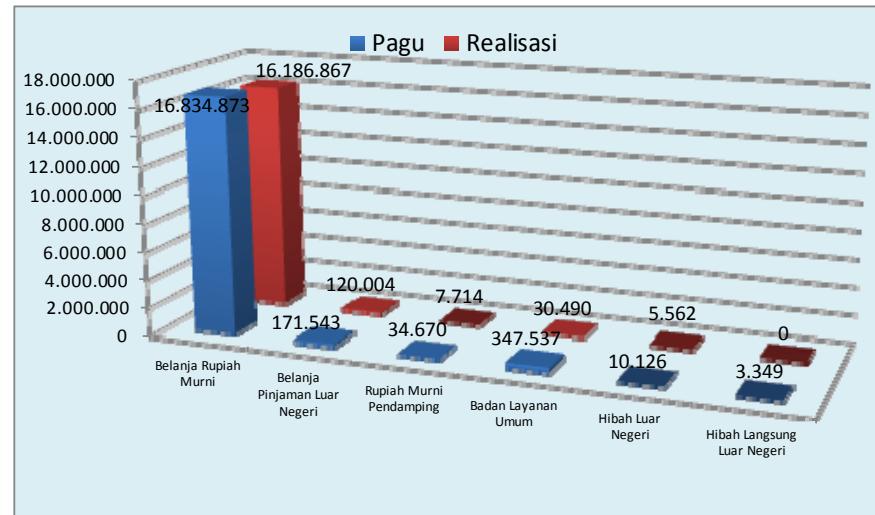
Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Bruto TA 2012 adalah sebesar Rp16.350.636.678.743,00, terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp16.186.866.897.680,00, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp120.004.000.377,00, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp7.713.769.933,00, Badan Layanan Umum sebesar Rp30.489.695.883,00, Hibah Luar Negeri sebesar Rp5.562.314.870,00. Realisasi tersebut dapat dirinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 28 dan Grafik 10 berikut.

Tabel 28
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Sumber Dana TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Belanja Transaksi Kas | | | |
| Belanja Rupiah Murni | 16.834.872.632.000 | 16.186.866.897.680 | 96,15 |
| Belanja Pinjaman Luar Negeri | 171.542.505.000 | 120.004.000.377 | 69,96 |
| Rupiah Murni Pendamping | 34.669.591.000 | 7.713.769.933 | 22,25 |
| Badan Layanan Umum | 347.537.304.000 | 30.489.695.883 | 8,77 |
| Hibah Luar Negeri | 10.126.208.000 | 5.562.314.870 | 54,93 |
| Hibah Langsung Luar Negeri | 3.348.763.000 | 0 | 0,00 |
| Hibah Langsung Jasa Luar Negeri | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |
| | | | |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | |
| Hibah Langsung Jasa Luar Negeri | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |

Grafik 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto
Menurut Sumber Dana TA 2012

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Bruto TA 2012 dan 2011 menurut Sumber Dana dapat dilihat pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | (dalamrupiah) | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rp | % |
| Belanja Transaksi Kas | | | | |
| Belanja Rupiah Murni | 16.186.866.897.680 | 15.969.969.008.138 | 216.897.889.542 | 1,36 |
| Belanja Pinjaman Luar Negeri | 120.004.000.377 | 101.364.595.447 | 18.639.404.930 | 18,39 |
| Rupiah Murni Pendamping | 7.713.769.933 | 4.090.811.443 | 3.622.958.490 | 88,56 |
| Badan Layanan Umum | 30.489.695.883 | 38.325.905.668 | (7.836.209.785) | (20,45) |
| Hibah Luar Negeri | 5.562.314.870 | 6.375.929.639 | (813.614.769) | (12,76) |
| Hibah Langsung Luar Negeri | 0 | 1.836.940.665 | (1.836.940.665) | (100,00) |
| Hibah Langsung Jasa Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 16.350.636.678.743 | 16.121.963.191.000 | 228.673.487.743 | 1,42 |
| Pengembalian Belanja | 25.188.635.572 | 25.666.446.168 | (477.810.596) | (1,86) |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | 16.325.448.043.171 | 16.096.296.744.832 | 229.151.298.339 | 1,42 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | |
| Hibah Langsung Jasa Luar Negeri | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Bruto | 0 | | (4.036.475.457) | 0,00 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Neto | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Neto | 16.325.448.043.171 | 16.100.333.220.289 | 225.114.822.882 | 1,40 |

2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I Bruto

*Realisasi Belanja
Per Eselon I Bruto*

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2012 dapat dirinci menurut Unit Eselon IBruto sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Setjen sebesar Rp6.064.064.989.816,00 atau 37,09 persen dari total Realisasi Belanja Kementerian Keuangan. Berdasarkan realisasi TA 2012, penyerapan terbesar terdapat pada DJP sebesar Rp5.224.198.081.849,00 atau 104,54 persen dari pagu belanja DJP. Adapun realisasi belanja DJP tersebut termasuk didalamnya pembayaran imbalan bunga sebesar Rp615.634.747.251,00 yang tidak tersedia pagu anggarannya di dalam DIPA. Apabila imbalan bunga ini dikeluarkan maka realisasi belanja DJP adalah sebesar Rp4.608.563.334.598,00 atau 92,22 persen dari pagu belanja DJP.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
Menurut Unit Eselon ITA 2012

(dalam rupiah)

| No | Unit Eselon I | Pagu | Realisasi | % |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Belanja Transaksi Kas | | | | |
| 1 | SETJEN | 6.787.055.145.000 | 6.064.064.989.816 | 89,35 |
| 2 | ITJEN | 94.741.699.000 | 88.873.285.659 | 93,81 |
| 3 | DJA | 139.374.773.000 | 126.019.645.030 | 90,42 |
| 4 | DJP | 4.997.443.575.000 | 5.224.198.081.849 | 104,54 |
| 5 | DJBC | 2.130.567.822.000 | 1.984.344.041.674 | 93,14 |
| 6 | DJPK | 117.463.308.000 | 113.380.175.841 | 96,52 |
| 7 | DJPU | 70.750.000.000 | 68.153.789.249 | 96,33 |
| 8 | DJPB | 1.534.467.641.000 | 1.415.197.849.226 | 92,23 |
| 9 | DJKN | 601.260.888.000 | 554.225.778.601 | 92,18 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 361.099.484.000 | 183.956.179.724 | 50,94 |
| 11 | BPPK | 421.882.973.000 | 396.654.114.466 | 94,02 |
| 12 | BKF | 145.989.695.000 | 131.568.747.608 | 90,12 |
| Jumlah Belanja Bruto | | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | |
| 1 | BAPEPAM-LK | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | BKF | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |

Perbandingan antara Realisasi Belanja per Unit Eselon I bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I Bruto TA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| No | Unit Eselon I | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Rp | % |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | |
| 1 | SETJEN | 6.064.064.989.816 | 5.963.937.082.788 | 100.127.907.028 | 1,68 |
| 2 | ITJEN | 88.873.285.659 | 93.791.092.203 | (4.917.806.544) | (5,24) |
| 3 | DJA | 126.019.645.030 | 114.765.543.793 | 11.254.101.237 | 9,81 |
| 4 | DJP | 5.224.198.081.849 | 5.397.033.396.680 | (172.835.314.831) | (3,20) |
| 5 | DJBC | 1.984.344.041.674 | 1.726.841.144.537 | 257.502.897.137 | 14,91 |
| 6 | DJPK | 113.380.175.841 | 115.201.678.220 | (1.821.502.379) | (1,58) |
| 7 | DJPU | 68.153.789.249 | 107.415.130.754 | (39.261.341.505) | (36,55) |
| 8 | DJPB | 1.415.197.849.226 | 1.385.436.301.213 | 29.761.548.013 | 2,15 |
| 9 | DJKN | 554.225.778.601 | 543.878.523.670 | 10.347.254.931 | 1,90 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 183.956.179.724 | 140.999.075.196 | 42.957.104.528 | 30,47 |
| 11 | BPPK | 396.654.114.466 | 396.304.767.440 | 349.347.026 | 0,09 |
| 12 | BKF | 131.568.747.608 | 136.359.454.506 | (4.790.706.898) | (3,51) |
| Jumlah Belanja Bruto | | 16.350.636.678.743 | 16.121.963.191.000 | 228.673.487.743 | 1,42 |
| Pengembalian | | 25.188.635.572 | 25.666.446.168 | (477.810.596) | (1,86) |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | | 16.325.448.043.171 | 16.096.296.744.832 | 229.151.298.339 | 1,42 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | | |
| 1 | BAPEPAM-LK | 0 | 3.050.373.457 | (3.050.373.457) | (100,00) |
| 2 | BKF | 0 | 986.102.000 | (986.102.000) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Bruto | | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Pengembalian | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Neto | | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Neto | | 16.325.448.043.171 | 16.100.333.220.289 | 225.114.822.882 | 1,40 |

3. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Fungsi

Belanja Kementerian Keuangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan Fungsi. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Bruto menurut Fungsi pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 32 dan Grafik 11 berikut.

Tabel 32
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Fungsi TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Belanja Transaksi Kas | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 17.313.711.996.000 | 16.281.052.008.574 | 94,04 |
| Belanja Pendidikan | 88.385.007.000 | 69.584.670.169 | 78,73 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pendidikan | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |

Grafik 11
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Fungsi TA 2012



Perbandingan Realisasi Belanja Bruto berdasarkan Fungsi dalam kurun waktu dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut FungsiTA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Transaksi Kas | | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 16.281.052.008.574 | 16.035.157.249.021 | 245.894.759.553 | 1,53 |
| Belanja Pendidikan | 69.584.670.169 | 86.805.941.979 | (17.221.271.810) | (19,84) |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 16.350.636.678.743 | 16.121.963.191.000 | 228.673.487.743 | 1,42 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Belanja Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Bruto | 16.350.636.678.743 | 16.125.999.666.457 | 224.637.012.286 | 1,39 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Realisasi Belanja Kementerian KeuanganTA 2012 menurut Fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar **Rp16.281.052.008.574,00** atau **99,57** persen dari total realisasi belanja Kementerian Keuangan.

4. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Program

*Realisasi Belanja
Bruto TA 2012
MenurutProgram*

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 menurut Program dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini:

Tabel 34
Rincian Anggaran danRealisasi Belanja Menurut ProgramTA 2012

(dalam rupiah)

| KODE | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % |
|------|--|-------------------|-------------------|-------|
| 01 | Program DukungandanManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaKementerianKeuangan | 6.787.055.145.000 | 6.064.064.989.816 | 89,35 |
| 03 | Program PengawasandanPeningkatanAkuntabilitasAparaturKementerianKeuangan | 94.741.699.000 | 88.873.285.659 | 93,81 |
| 04 | Program PendidikandanPelatihanAparaturKementerianKeuangan | 421.882.973.000 | 396.654.114.466 | 94,02 |
| 06 | Program PengaturanPembinaandanPengawasanPasar Modal danLembagaKeuanganNon Bank | 361.099.484.000 | 183.956.179.724 | 50,94 |
| 07 | Program PengelolaanAnggaran Negara | 139.374.773.000 | 126.019.645.030 | 90,42 |
| 08 | Program PeningkatanPengelolaanPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah | 117.463.308.000 | 113.380.175.841 | 96,52 |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 09 | Program PengelolaanPembendaharaan Negara | 1.534.467.641.000 | 1.415.197.849.226 | 92,23 |
| 10 | Program PengelolaanKekayaan Negara PengurusanPiutang Negara danPelayananLelang | 601.260.888.000 | 554.225.778.601 | 92,18 |
| 11 | Program PerumusanKebijakanFiskal | 145.989.695.000 | 131.568.747.608 | 90,12 |
| 12 | Program PengamananandPengamananPenerimaanPajak | 4.997.443.575.000 | 5.224.198.081.849 | 104,54 |
| 13 | Program PengawasanPelayananandPenerimaan di BidangKepabeandanCukai | 2.130.567.822.000 | 1.984.344.041.674 | 93,14 |
| 14 | Program PengelolaandanPembentukanUtang | 70.750.000.000 | 68.153.789.249 | 96,33 |
| | Jumlah | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |

Realisasi Belanja
Bruto TA 2012
Menurut Jenis
Belanja

5. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Keuangan Bruto menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (SPM-IB Pajak). Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada Tabel 35 dan Grafik 12.

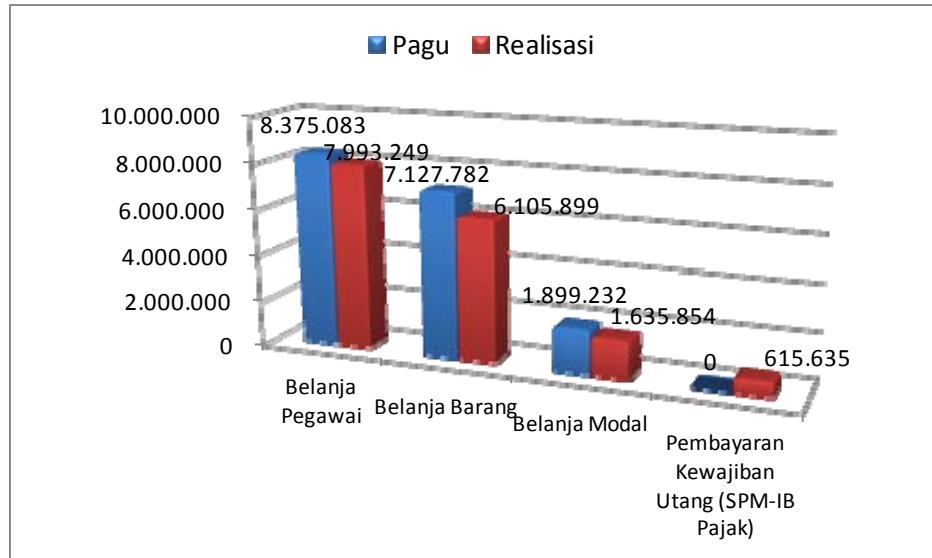
Tabel 35
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Belanja Transaksi Kas | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 17.313.711.996.000 | 16.281.052.008.574 | 94,04 |
| Belanja Pendidikan | 88.385.007.000 | 69.584.670.169 | 78,73 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | |
| Belanja Pelayanan Umum | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pendidikan | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 17.402.097.003.000 | 16.350.636.678.743 | 93,96 |

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 12 berikut.

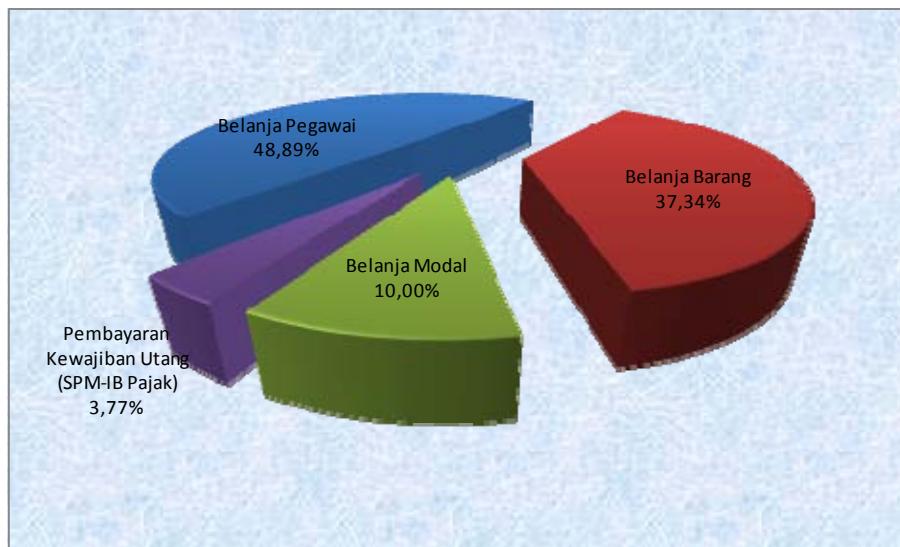
Grafik 12
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2012

(dalam jutaan rupiah)



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja Bruto untuk TA 2012 juga dapat dilihat pada Grafik 13 berikut.

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Bruto TA 2012



Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Bruto menurut Jenis Belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Bruto TA 2012 dan TA 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Rp | % |
| Transaksi Kas | | | | |
| Belanja Pegawai | 7.993.248.823.707 | 7.510.455.351.495 | 482.793.472.212 | 6,43 |
| Belanja Barang | 6.105.898.670.123 | 5.279.309.268.307 | 826.589.401.816 | 15,66 |
| Belanja Modal | 1.635.854.437.662 | 2.084.798.699.811 | (448.944.262.149) | (21,53) |
| Pembayaran Kewajiban Utang (SPM-IB Pajak) | 615.634.747.251 | 1.247.399.871.387 | (631.765.124.136) | (50,65) |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 16.350.636.678.743 | 16.121.963.191.000 | 228.673.487.743 | 1,42 |
| Pengembalian | 25.188.635.572 | 25.666.446.168 | (477.810.596) | (1,86) |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | 16.325.448.043.171 | 16.096.296.744.832 | 229.151.298.339 | 1,42 |
| Transaksi Non Kas | | | | |
| Belanja Barang | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Pengembalian | 0 | 0 | | |
| Jumlah Transaksi Non Kas Neto | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Neto | 16.325.448.043.171 | 16.100.333.220.289 | 225.114.822.882 | 1,40 |

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Rp7.976.346.217.823,00

Realisasi Belanja PegawaiNeto TA 2012adalah sebesar **Rp7.976.346.217.823,00** atau **95,24** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 sebesar **Rp8.375.082.920.608,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2011, Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 mengalami kenaikansebesar **Rp485.832.176.729,00** atau **6,49** persen dari Realisasi TA 2011. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji PNS tahun 2012 dan penerimaan pegawai baru yang menyebabkan naiknya pembayaran gaji, TKPKN dan pembayaran uang makan.

Realisasi Belanja PegawaiBruto TA 2012adalah sebesar **Rp7.993.248.823.707,00** atau **95,44** persen dari pagu. Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai pada TA 2012 adalah sebesar **Rp16.902.605.884,00** sehingga Realisasi Belanja PegawaiNeto TA 2012adalah sebesar **Rp7.976.346.217.823,00**.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 37.

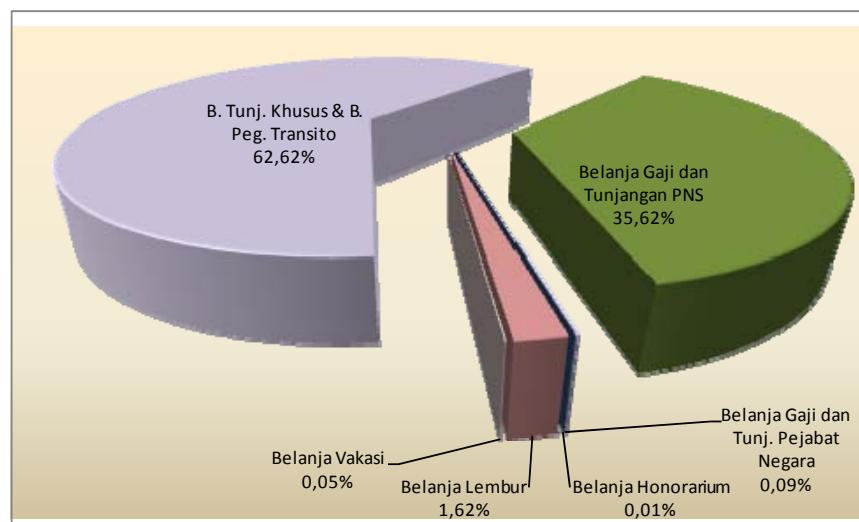
Tabel 37
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Transaksi Kas | | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2.987.789.417.564 | 2.847.113.253.870 | 95,29 |
| Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara | 7.045.140.000 | 7.044.300.920 | 99,99 |
| Belanja Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Honorarium | 666.000.000 | 643.500.000 | 96,62 |
| Belanja Lembur | 147.008.597.044 | 129.256.278.480 | 87,92 |
| Belanja Vakasi | 5.335.827.000 | 4.039.448.200 | 75,70 |
| B. Tunj. Khusus & B. Peg. Transito | 5.227.237.939.000 | 5.005.152.042.237 | 95,75 |
| Belanja Pegawai BLU | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 8.375.082.920.608 | 7.993.248.823.707 | 95,44 |
| Transaksi Non Kas | | | |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 8.375.082.920.608 | 7.993.248.823.707 | 95,44 |

Realisasi Belanja Pegawai Bruto BLU nihil karena gaji masih dibayar oleh satuan kerja asal pegawai BLU.

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 14 berikut.

Grafik 14
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012



Perbandingan antara Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut.

Tabel 38
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dan 2011
(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| | | | Rp | % |
| Transaksi Kas | | | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2.847.113.253.870 | 2.619.409.669.125 | 227.703.584.745 | 8,69 |
| Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara | 7.044.300.920 | 0 | 7.044.300.920 | 0,00 |
| Belanja Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Honorarium | 643.500.000 | 6.615.548.921 | (5.972.048.921) | (90,27) |
| Belanja Lembur | 129.256.278.480 | 93.882.789.620 | 35.373.488.860 | 37,68 |
| Belanja Vakasi | 4.039.448.200 | 0 | 4.039.448.200 | 0,00 |
| B. Tunj. Khusus & B. Peg. Transito | 5.005.152.042.237 | 4.790.547.343.829 | 214.604.698.408 | 4,48 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 7.993.248.823.707 | 7.510.455.351.495 | 482.793.472.212 | 6,43 |
| Pengembalian | 16.902.605.884 | 19.941.310.401 | (3.038.704.517) | (15,24) |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | 7.976.346.217.823 | 7.490.514.041.094 | 485.832.176.729 | 6,49 |
| Transaksi Non Kas | | | | |
| Jumlah Belanja Neto | 7.976.346.217.823 | 7.490.514.041.094 | 485.832.176.729 | 6,49 |

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2012

| No | Unit Eselon I | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|
| | | | | % | |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | |
| 1 | SETJEN | 5.341.984.127.000 | 5.107.223.659.495 | 95,61 | |
| 2 | ITJEN | 28.762.337.000 | 24.938.779.824 | 86,71 | |
| 3 | DJA | 47.402.050.000 | 45.109.247.514 | 95,16 | |
| 4 | DJP | 1.552.002.135.608 | 1.488.993.656.113 | 95,94 | |
| 5 | DJBC | 539.708.990.000 | 495.294.389.085 | 91,77 | |
| 6 | DJPK | 21.986.792.000 | 21.734.076.324 | 98,85 | |
| 7 | DJPU | 16.635.827.000 | 15.932.387.495 | 95,77 | |
| 8 | DJPB | 499.680.535.000 | 485.148.515.235 | 97,09 | |
| 9 | DJKN | 186.833.330.000 | 177.963.597.667 | 95,25 | |
| 10 | BAPEPAM-LK | 54.096.491.000 | 48.819.456.916 | 90,25 | |
| 11 | BPPK | 63.512.958.000 | 59.694.456.166 | 93,99 | |
| 12 | BKF | 22.477.348.000 | 22.396.601.873 | 99,64 | |
| | Jumlah Belanja Bruto | 8.375.082.920.608 | 7.993.248.823.707 | 95,44 | |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Jumlah Belanja Bruto | 8.375.082.920.608 | 7.993.248.823.707 | 95,44 | |

Perbandingan Belanja Pegawai Kementerian Keuangan per Unit Eselon I TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut:

Tabel 40
Perbandingan Belanja Pegawai Bruto TA 2012 dan TA 2011
(dalam rupiah)

| No | Unit Eselon I | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | |
| 1 | SETJEN | 5.107.223.659.495 | 4.878.316.572.393 | 228.907.087.102 | 4,69 |
| 2 | ITJEN | 24.938.779.824 | 23.571.787.195 | 1.366.992.629 | 5,80 |
| 3 | DJA | 45.109.247.514 | 39.682.719.229 | 5.426.528.285 | 13,67 |
| 4 | DJP | 1.488.993.656.113 | 1.354.681.299.686 | 134.312.356.427 | 9,91 |
| 5 | DJBC | 495.294.389.085 | 453.640.814.986 | 41.653.574.099 | 9,18 |
| 6 | DJPK | 21.734.076.324 | 18.968.838.639 | 2.765.237.685 | 14,58 |
| 7 | DJPU | 15.932.387.495 | 14.396.946.704 | 1.535.440.791 | 10,67 |
| 8 | DJPB | 485.148.515.235 | 450.427.443.892 | 34.721.071.343 | 7,71 |
| 9 | DJKN | 177.963.597.667 | 160.682.419.341 | 17.281.178.326 | 10,75 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 48.819.456.916 | 45.035.140.949 | 3.784.315.967 | 8,40 |
| 11 | BPPK | 59.694.456.166 | 50.781.153.373 | 8.913.302.793 | 17,55 |
| 12 | BKF | 22.396.601.873 | 20.270.215.108 | 2.126.386.765 | 10,49 |
| | Jumlah Belanja Bruto | 7.993.248.823.707 | 7.510.455.351.495 | 482.793.472.212 | 6,43 |
| | Pengembalian | 16.902.605.884 | 19.941.310.401 | (3.038.704.517) | (15,24) |
| | Jumlah Transaksi Kas Neto | 7.976.346.217.823 | 7.490.514.041.094 | 485.832.176.729 | 6,49 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Neto | 7.976.346.217.823 | 7.490.514.041.094 | 485.832.176.729 | 6,49 |

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 adalah sebesar Rp6.097.847.421.003,00 yang berarti 85,55 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp7.127.781.800.025,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2011, realisasi Belanja Barang TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp819.514.592.821,00 atau 15,53 persen dari TA 2011. Kenaikan berasal dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume kerja/kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya dan adanya kenaikan indeks/harga satuan sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2012.

Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2012 adalah sebesar Rp6.105.898.670.123,00 yang berarti 85,66 persen dari pagu. Jumlah Pengembalian Belanja Barang TA 2012 adalah sebesar Rp8.051.249.120,00 sehingga Realisasi Belanja Barang Neto TA 2012 adalah sebesar Rp6.097.847.421.003,00.

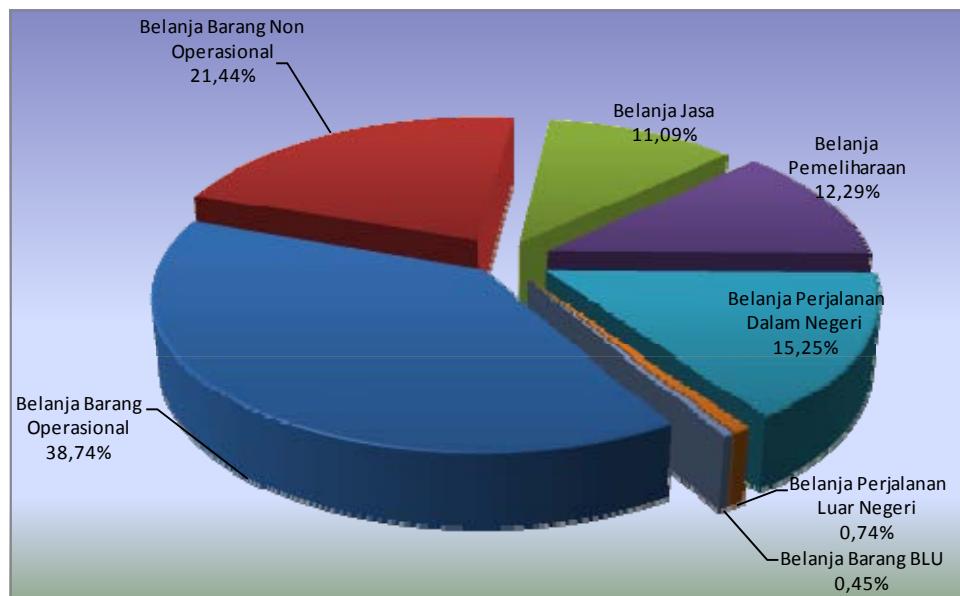
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) % |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Transaksi Kas | | | |
| Belanja Barang Operasional | 2.479.307.813.385 | 2.365.429.344.632 | 95,41 |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.496.839.815.583 | 1.309.144.116.812 | 87,46 |
| Belanja Jasa | 936.722.461.903 | 677.050.374.892 | 72,28 |
| Belanja Jasa untuk Hibah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 803.597.043.304 | 750.141.678.122 | 93,35 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.013.223.337.650 | 931.189.826.825 | 91,90 |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | 55.587.380.200 | 45.250.041.882 | 81,40 |
| Belanja Barang BLU | 342.503.948.000 | 27.693.286.958 | 8,09 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 7.127.781.800.025 | 6.105.898.670.123 | 85,66 |
| Belanja Transaksi Non Kas | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bruto | 7.127.781.800.025 | 6.105.898.670.123 | 85,66 |

Komposisi Belanja Barang Bruto TA 2012 dapat dilihat dalam Grafik 15.

Grafik 15
Komposisi Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2012



Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 42 berikut.

Tabel 42
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2012 dan 2011

| Uraian | TA 2012 | TA 2011 | (dalam rupiah) | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Rp | % |
| Transaksi Kas | | | | |
| Belanja Barang Operasional | 2.365.429.344.632 | 2.096.014.777.419 | 269.414.567.213 | 12,85 |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.309.144.116.812 | 1.069.287.145.857 | 239.856.970.955 | 22,43 |
| Belanja Jasa | 677.050.374.892 | 567.381.655.911 | 109.668.718.981 | 19,33 |
| Belanja Jasa untuk Hibah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 750.141.678.122 | 661.590.235.968 | 88.551.442.154 | 13,38 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 931.189.826.825 | 815.902.481.274 | 115.287.345.551 | 14,13 |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | 45.250.041.882 | 36.806.266.398 | 8.443.775.484 | 22,94 |
| Belanja Barang BLU | 27.693.286.958 | 32.326.705.480 | (4.633.418.522) | (14,33) |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 6.105.898.670.123 | 5.279.309.268.307 | 826.589.401.816 | 15,66 |
| Pengembalian | 8.051.249.120 | 5.508.465.517 | 2.542.783.603 | 46,16 |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | 6.097.847.421.003 | 5.273.800.802.790 | 824.046.618.213 | 15,63 |
| Transaksi Non Kas | | | | |
| Belanja Jasa untuk Hibah | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Pengembalian | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Bruto | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Neto | 6.097.847.421.003 | 5.277.837.278.247 | (4.036.475.457) | (0,08) |

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I Bruto dapat dilihat pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Barang Per Eselon I TA 2012

| No | Unit Eselon I | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|
| | | | | % | |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | |
| 1 | SETJEN | 912.342.718.000 | 501.155.727.611 | 54,93 | |
| 2 | ITJEN | 59.565.061.000 | 57.554.093.890 | 96,62 | |
| 3 | DJA | 74.507.679.000 | 64.742.235.160 | 86,89 | |
| 4 | DJP | 3.068.304.026.025 | 2.825.943.594.865 | 92,10 | |
| 5 | DJBC | 1.210.977.144.000 | 1.149.475.435.272 | 94,92 | |
| 6 | DJPK | 77.326.004.000 | 74.051.441.413 | 95,77 | |
| 7 | DJPU | 43.604.353.000 | 42.111.016.243 | 96,58 | |
| 8 | DJPB | 705.469.035.000 | 648.575.035.271 | 91,94 | |
| 9 | DJKN | 291.232.034.000 | 262.338.806.792 | 90,08 | |
| 10 | BAPEPAM-LK | 280.987.737.000 | 109.939.181.696 | 39,13 | |
| 11 | BPPK | 302.792.532.000 | 282.490.114.575 | 93,29 | |
| 12 | BKF | 100.673.477.000 | 87.521.987.335 | 86,94 | |
| | Jumlah Belanja Bruto | 7.127.781.800.025 | 6.105.898.670.123 | 85,66 | |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | | |
| 1 | BAPEPAM-LK | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | BKF | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Jumlah Belanja Bruto | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Jumlah Belanja Bruto | 7.127.781.800.025 | 6.105.898.670.123 | 85,66 | |

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.

**Tabel 44
Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I TA 2012 dan TA 2011**

| No | Unit Eselon I | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | (dalam rupiah) Rp | % |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | |
| 1 | SETJEN | 501.155.727.611 | 402.180.191.697 | 98.975.535.914 | 24,61 |
| 2 | ITJEN | 57.554.093.890 | 60.576.192.520 | (3.022.098.630) | (4,99) |
| 3 | DJA | 64.742.235.160 | 56.184.593.724 | 8.557.641.436 | 15,23 |
| 4 | DJP | 2.825.943.594.865 | 2.370.575.755.219 | 455.367.839.646 | 19,21 |
| 5 | DJBC | 1.149.475.435.272 | 923.844.690.772 | 225.630.744.500 | 24,42 |
| 6 | DJPK | 74.051.441.413 | 80.537.799.012 | (6.486.357.599) | (8,05) |
| 7 | DJPU | 42.111.016.243 | 50.596.233.720 | (8.485.217.477) | (16,77) |
| 8 | DJPB | 648.575.035.271 | 679.370.514.810 | (30.795.479.539) | (4,53) |
| 9 | DJKN | 262.338.806.792 | 251.272.820.620 | 11.065.986.172 | 4,40 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 109.939.181.696 | 67.506.248.657 | 42.432.933.039 | 62,86 |
| 11 | BPPK | 282.490.114.575 | 228.580.025.303 | 53.910.089.272 | 23,58 |
| 12 | BKF | 87.521.987.335 | 108.084.202.253 | (20.562.214.918) | (19,02) |
| Jumlah Belanja Bruto | | 6.105.898.670.123 | 5.279.309.268.307 | 826.589.401.816 | 15,66 |
| Pengembalian | | 8.051.249.120 | 5.508.465.517 | 2.542.783.603 | 46,16 |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | | 6.097.847.421.003 | 5.273.800.802.790 | 824.046.618.213 | 15,63 |
| Belanja Transaksi Non Kas | | | | | |
| 1 | BAPEPAM-LK | 0 | 3.050.373.457 | (3.050.373.457) | (100,00) |
| 2 | BKF | 0 | 986.102.000 | (986.102.000) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Bruto | | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Pengembalian | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Transaksi Non Kas Neto | | 0 | 4.036.475.457 | (4.036.475.457) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Neto | | 6.097.847.421.003 | 5.277.837.278.247 | 820.010.142.756 | 15,54 |

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Neto TA 2012 Rp1.635.619.657.094,00

Realisasi Belanja Modal Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.635.619.657.094,00** yang berarti **86,12**persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 sebesar **Rp1.899.232.282.367,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2011, realisasi Belanja Modal TA 2012 mengalami penurunan sebesar **Rp448.962.372.467,00** atau **21,54**persen dari TA 2011. Penurunan terbesar berasal dari belanja modal tanah yaitu pada tahun 2011 terdapat pembayaran angsuran atas tanah pada PT Taspen oleh Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

Sedangkan Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.635.854.437.662,00** yang berarti **86,13**persen dari pagu. Terdapat pengembalian belanja modal pada TA 2012 sebesar **Rp234.780.568,00** sehingga Realisasi Belanja Modal Neto TA 2012 adalah sebesar **Rp1.635.619.657.094,00**.

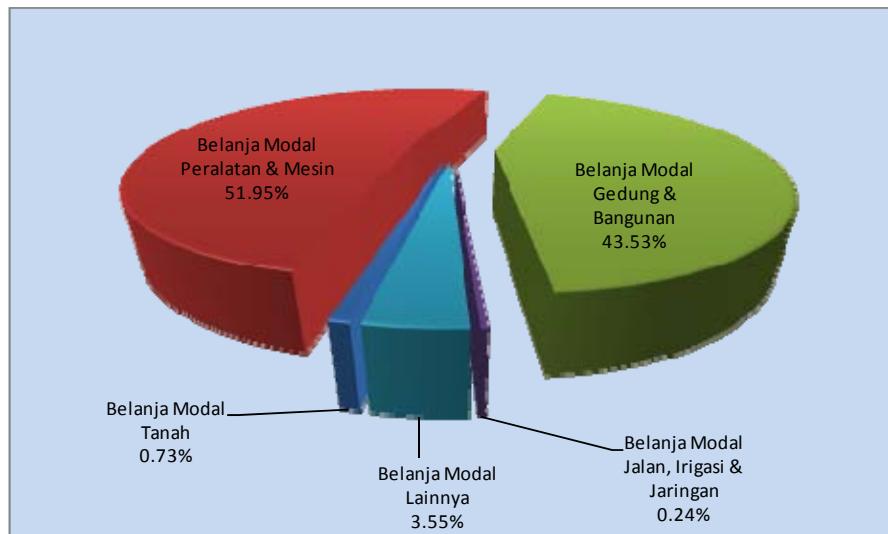
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Modal TA 2012

| Uraian | Pagu | Realisasi | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Transaksi Kas | | | |
| Belanja Modal Tanah | 13,587,533,000 | 11,905,150,600 | 87.62 |
| Belanja Modal Peralatan & Mesin | 938,771,911,000 | 848,335,043,486 | 90.37 |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan | 835,601,651,000 | 710,862,344,644 | 85.07 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan | 30,989,834,367 | 3,961,122,061 | 12.78 |
| Belanja Modal Lainnya | 75,247,997,000 | 57,994,367,946 | 77.07 |
| Belanja Modal BLU | 5,033,356,000 | 2,796,408,925 | 55.56 |
| Jumlah Transaksi Kas Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |
| Transaksi Non Kas | | | |
| Jumlah Belanja Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |

Komposisi Belanja Modal Bruto TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 16 berikut.

Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2012



Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 46 berikut.

Tabel 46
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| No | Unit Eselon I | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Belanja Transaksi Kas | | | |
| 1 | SETJEN | 532,728,300,000 | 455,685,602,710 | 85.54 |
| 2 | ITJEN | 6,414,301,000 | 6,380,411,945 | 99.47 |
| 3 | DJA | 17,465,044,000 | 16,168,162,356 | 92.57 |
| 4 | DJP | 377,137,413,367 | 293,626,083,620 | 77.86 |
| 5 | DJBC | 379,881,688,000 | 339,574,217,317 | 89.39 |
| 6 | DJPK | 18,150,512,000 | 17,594,658,104 | 96.94 |
| 7 | DJPU | 10,509,820,000 | 10,110,385,511 | 96.20 |
| 8 | DJPB | 329,318,071,000 | 281,474,298,720 | 85.47 |
| 9 | DJKN | 123,195,524,000 | 113,923,374,142 | 92.47 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 26,015,256,000 | 25,197,541,112 | 96.86 |
| 11 | BPPK | 55,577,483,000 | 54,469,543,725 | 98.01 |
| 12 | BKF | 22,838,870,000 | 21,650,158,400 | 94.80 |
| | Jumlah Belanja Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |
| | Belanja Transaksi Non Kas | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47
Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Bruto TA 2012

| No | Unit Eselon I | Pagu | Realisasi | (dalam rupiah) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Belanja Transaksi Kas | | | |
| 1 | SETJEN | 532,728,300,000 | 455,685,602,710 | 85.54 |
| 2 | ITJEN | 6,414,301,000 | 6,380,411,945 | 99.47 |
| 3 | DJA | 17,465,044,000 | 16,168,162,356 | 92.57 |
| 4 | DJP | 377,137,413,367 | 293,626,083,620 | 77.86 |
| 5 | DJBC | 379,881,688,000 | 339,574,217,317 | 89.39 |
| 6 | DJPK | 18,150,512,000 | 17,594,658,104 | 96.94 |
| 7 | DJPU | 10,509,820,000 | 10,110,385,511 | 96.20 |
| 8 | DJPB | 329,318,071,000 | 281,474,298,720 | 85.47 |
| 9 | DJKN | 123,195,524,000 | 113,923,374,142 | 92.47 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 26,015,256,000 | 25,197,541,112 | 96.86 |
| 11 | BPPK | 55,577,483,000 | 54,469,543,725 | 98.01 |
| 12 | BKF | 22,838,870,000 | 21,650,158,400 | 94.80 |
| | Jumlah Belanja Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |
| | Belanja Transaksi Non Kas | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Bruto | 1,899,232,282,367 | 1,635,854,437,662 | 86.13 |

Perbandingan Belanja Modal per Unit Eselon I Kementerian Keuangan TA 2012 dan TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

| No | Unit Eselon I | TA 2012 | TA 2011 | Kenaikan (Penurunan) | | (dalam rupiah) |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Rp | % | |
| Belanja Transaksi Kas | | | | | | |
| 1 | SETJEN | 455,685,602,710 | 683,440,318,698 | (227,754,715,988) | (33.32) | |
| 2 | ITJEN | 6,380,411,945 | 9,643,112,488 | (3,262,700,543) | (33.83) | |
| 3 | DJA | 16,168,162,356 | 18,898,230,840 | (2,730,068,484) | (14.45) | |
| 4 | DJP | 293,626,083,620 | 424,376,470,388 | (130,750,386,768) | (30.81) | |
| 5 | DJBC | 339,574,217,317 | 349,355,638,779 | (9,781,421,462) | (2.80) | |
| 6 | DJPK | 17,594,658,104 | 15,695,040,569 | 1,899,617,535 | 12.10 | |
| 7 | DJPU | 10,110,385,511 | 42,421,950,330 | (32,311,564,819) | (76.17) | |
| 8 | DJPB | 281,474,298,720 | 255,638,342,511 | 25,835,956,209 | 10.11 | |
| 9 | DJKN | 113,923,374,142 | 131,923,283,709 | (17,999,909,567) | (13.64) | |
| 10 | BAPEPAM-LK | 25,197,541,112 | 28,457,685,590 | (3,260,144,478) | (11.46) | |
| 11 | BPPK | 54,469,543,725 | 116,943,588,764 | (62,474,045,039) | (53.42) | |
| 12 | BKF | 21,650,158,400 | 8,005,037,145 | 13,645,121,255 | 170.46 | |
| Jumlah Belanja Bruto | | 1,635,854,437,662 | 2,084,798,699,811 | (448,944,262,149) | (21.53) | |
| Pengembalian | | 234,780,568 | 216,670,250 | 18,110,318 | 8.36 | |
| Jumlah Transaksi Kas Neto | | 1,635,619,657,094 | 2,084,582,029,561 | (448,962,372,467) | (21.54) | |
| Belanja Transaksi Non Kas | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jumlah Belanja Neto | | 1,635,619,657,094 | 2,084,582,029,561 | (448,962,372,467) | (21.54) | |

B.2.4. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 Rp 615.634.747.251,00
Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2012 sebesar Rp 615.634.747.251,00

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 adalah sebesar Rp 615.634.747.251,00, yaitu merupakan imbalan bunga kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayarpajakatakeputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan wajib pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 631.765.124.136,00 atau 50,65 persen apabila dibandingkan dengan pengeluaran yang sama untuk TA 2011.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1 Program PINTAR Direktorat Jenderal Pajak

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) adalah program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan fondasi sistem informasi yang terintegrasi. PINTAR mengadopsi praktik administrasi perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. PINTAR bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost*. Selain itu, PINTAR bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

PINTAR mencakup pengembangan dan penyempurnaan empat komponen yaitu:

1. Sistem perpajakan inti, yang terdiri dari Pendaftaran Wajib Pajak, Pengolahan Surat Pemberitahuan, Rekening Wajib Pajak, Manajemen Dokumen, dan Arsitektur Sistem yang terintegrasi;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari Pemeriksaan, Penagihan, serta Keberatan dan Banding; dan
4. Manajemen Proyek.

Total pendanaan PINTAR pada Tahun Anggaran 2012 sebesar USD146,262,000.00. Dana sebesar USD110,000,000.00 dibiayai oleh pinjaman lunak dari World Bank Nomor 7631 ID. Sedangkan sisa dana sebesar USD36,262,000.00 dibiayai oleh APBN. *Loan Agreement* PINTAR (*Loan Number* 7631 ID) ditandatangani 9 Februari 2009 dan berlaku efektif (*Loan Effectiveness*) sejak 7 Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah 31 Desember 2015.

Pengadaan PINTAR Tahun Anggaran 2012 dibagi menjadi 3 (tiga) paket pengadaan yaitu :

- Paket *Core Tax* dengan nilai sebesar USD109,419,000.00 (berdasarkan *procurement plan*), Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada World Bank mengenai pembatalan pengadaan Paket *Core Tax* PINTAR dan World Bank telah memberikan jawaban atas surat Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa World Bank dapat menerima alasan pembatalan pengadaan. Berdasarkan hal tersebut, DJP mengajukan revisi anggaran Paket *Core Tax* tahun anggaran 2012;
- Paket *Human Resources Management Information System* dengan nilai sebesar USD4,736,000.00 (berdasarkan *procurement plan*), perubahan *scope* paket *Human Resources Management Information System* (HRMIS) melalui revisi DGT AD HRMIS belum mencapai kesepakatan; dan
- Paket *Owner's Agent* dengan nilai sebesar USD7,116,000.00 (berdasarkan *procurement plan*), Sehubungan dengan pembatalan pengadaan Paket *Core Tax* PINTAR, DJP mengajukan permohonan pembatalan Paket *Owner's Agent* yang merupakan salah satu paket pendukung *Core Tax*. Permohonan pembatalan ini telah mendapatkan persetujuan World Bank. Berdasarkan hal tersebut, DJP mengajukan revisi anggaran Paket *Owner's Agent* Tahun Anggaran 2012.

DIPA PINTAR dan CTF-7 telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Revisi ke-1 tanggal 29 Februari 2012, mengubah pagu DIPA dari semula Rp350.688.294.000,00 menjadi Rp158.416.314.000,00;
- Revisi ke-2 tanggal 9 April 2012, mengubah Kode Nomor Perjanjian Pinjaman (NPP) dan Kantor Bayar / KPPN;

Revisi ke-3 tanggal 20 November 2012, mengubah pagu DIPA dari semula Rp158.416.314.000,00 menjadi Rp33.540.928.000,00, dengan mengurangi alokasi pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp113.556.159.000,00 dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp11.319.227.000,00.

B.3.2 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan pada DJP

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan BAR Penerimaan Pajak nomor BAR-112/SM II/PB.64/2013 tanggal 6 Mei 2013. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp888.593.147.044.415,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Hasil rekonsiliasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Uraian | SAU | SAI | Selisih |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Rupiah | Rupiah | Rupiah |
| MPN | 722.314.613.327.188 | 722.310.059.773.188 | 4.553.554.000 |
| Pemotongan SPM | 49.819.704.366.049 | 49.818.232.812.250 | 1.471.553.799 |
| BUN | 116.464.854.458.978 | 116.464.854.458.978 | 0 |
| Pengembalian Pajak | 52.765.219.385.640 | 52.765.219.385.640 | 0 |
| Total Penerimaan Bruto | 888.599.172.152.215 | 888.593.147.044.416 | 6.025.107.799 |
| Total Penerimaan Netto | 835.833.952.766.575 | 835.827.927.658.776 | 6.025.107.799 |

Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2012 adalah sebesar Rp1.400.997.781.312,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp52.765.219.385.640,00 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAI dengan data SAU. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAI dan SAU sebagai berikut:

| Uraian | SAI | SAU | Selisih |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. SAI dan SAU sama (semua elemen) | 52.653.565.493.224 | 52.653.565.493.224 | - |
| 2. SAI dan SAU beda MAP (nilai sama) | 2.025.981.345 | 2.025.981.345 | - |
| 3. SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama) | 17.849.387.723 | 17.849.387.723 | - |
| 4. SAI dan SAU beda nomor KPPN (nilai sama) | 38.240.721.999 | 38.240.721.999 | - |
| 5. SAI dan SAU beda nominal | 4.124.032.946 | 4.124.032.946 | - |
| 6. Data Hanya ada di SAI | 247.296.891 | - | (247.296.891) |
| 7. Data Hanya ada di SAU | 53.853.524.499 | 53.944.766.109 | 91.241.610 |
| 8. SAI dan SAU beda dua variabel atau lebih | 11.050.258 | 11.050.258 | - |
| 9. Bukan Satker DJP | 6.961.934 | 106.252.934 | 99.291.000 |
| Total | 52.769.924.450.819 | 52.769.867.686.538 | (56.764.281) |

Dari hasil rekonsiliasi tersebut terdapat perubahan data terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2012 Eselon I *Unaudited* dengan rincian sebagai berikut:

| FLAG | URAIAN | SELISIH | KOREKSI PENYUSUNAN LK | | MENJADI | | SELISIH AKHIR |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | SAI | SAU | SAI | SAU | |
| 1 | SAU dan SAI Sama | - | - | - | 52.653.565.493.224 | 52.653.565.493.224 | - |
| 2 | SAU dan SAI Beda MAP | - | - | - | 2.025.981.345 | 2.025.981.345 | - |
| 3 | SAU dan SAI Beda Nomor Dokumen | - | - | - | 17.849.387.723 | 17.849.387.723 | - |
| 4 | SAU dan SAI Beda Nomor KPPN | - | - | - | 38.240.721.999 | 38.240.721.999 | - |
| 5 | SAU dan SAI Beda Nominal | - | - | - | 4.124.032.946 | 4.124.032.946 | - |
| 6 | Data Hanya Ada di SAI | (247.296.891) | (102.914.489) | - | 144.382.402 | - | (144.382.402) |
| 7 | Data Hanya Ada di SAU | 91.241.610 | 84.634.002 | - | 53.944.766.109 | 53.944.766.109 | - |
| 8 | SAU dan SAI Beda Dua Variabel / Lebih | - | - | - | 11.050.258 | 11.050.258 | - |
| 9 | Data Bukan Satker DJP | 99.291.000 | - | - | 7.541.934 | 106.252.934 | 98.711.000 |
| Grand Total | | (56.764.281) | (18.280.487) | - | 52.765.219.385.640 | 52.769.867.686.538 | (45.671.402) |

Selanjutnya atas data tersebut diatas terdapat perubahan data terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2012 Eselon I – Audited dengan rincian sebagai berikut:

| Trn | Uraian | SAI | SAU | SELISIH |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 24.780 | SAU dan SAI Sama | 52.765.219.385.640 | 52.765.219.385.640 | - |
| 24.780 | Grand Total | 52.765.219.385.640 | 52.765.219.385.640 | - |

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2012 sebesar Rp52.765.219.385.640,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp45.122.108.432.543,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak (SKPLB)/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp21.168.709.416.540,00.

B.3.3. Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan SPN merupakan program ekstensifikasi yang proaktif yaitu dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan atau tempat tinggal mereka. Kegiatan SPN juga diikuti dengan kegiatan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam pidato presiden pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011 Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Menindaklanjuti pidato presiden tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang SPN. Beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim SPN.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis SPN.

Launching SPN dilakukan pada 30 September 2011 oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo. Metodologi yang digunakan dalam SPN secara umum sebagai berikut:

1. dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air Indonesia oleh 299 KPP Pratama.
2. pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil pemetaan (*mapping*) dan monografi fiskal dengan skala prioritas: sentra ekonomi/ kawasan bisnis, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*) dan kawasan pemukiman (potensial).
3. pelaksanaan sensus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pada lokasi sensus menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan diikuti dengan penyuluhan dan himbauan.
5. Pemasangan sticker di tempat usaha dan/atau tempat tinggal WP setelah dilakukan sensus.
6. perekaman/ pemutakhiran data atau hasil sensus
7. pemilihan waktu sensus disesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang, sore atau malam hari).

Dengan pelaksanaan SPN diharapkan seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki serta pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian basis pajak akan semakin luas, kepatuhan penyampaian SPT akan semakin meningkat, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan basis data perpajakan akan semakin mutakhir.

B.3.4. Rekonsiliasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan pada DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencatat penerimaan berdasarkan bukti setor SSPCP/SSBP secara berjenjang (*bottom-up*) dari tingkat UAKPA ke UAPPA-W dan ke UAPPA-Es-1, dan telah dilakukan rekonsiliasi internal secara periodik dan berjenjang dari tingkat Satker, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-58/BC/2012.

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan tingkat Eselon I tahun anggaran 2012 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara melalui Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal selaku Kompilator Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah dilakukan pada tanggal 25 April 2013 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-5.1/SJ.1/2013.

1. Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan

Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan antara SAI dengan SAU dilakukan dengan 8 metode dan key rekon unik dalam setiap metodenya. Key rekon unik dalam setiap level digunakan untuk menghindari hasil rekon ganda. 8 Metode tersebut yaitu:

1. **Metode-1** dengan elemen kunci *NTPN, TGL NTPN, AKUN, NILAI*;
2. **Metode-2** dengan elemen kunci *NTPN, AKUN, NILAI*;
3. **Metode-3** dengan elemen kunci *NTPN, TGL NTPN, NILAI*;
4. **Metode-4** dengan elemen kunci *NTB/NTP, AKUN, NILAI*;
5. **Metode-5** dengan elemen kunci *NTPN, NILAI*;
6. **Metode-6** dengan elemen kunci *TGL NTPN, AKUN, NILAI*;
7. **Metode-7** dengan elemen kunci *BULAN NTPN, AKUN, NILAI*;
8. **Metode-8** dengan elemen kunci *NTPN*.

Hasil Rekonsiliasi :

| URAIAN | trx SAI | Jumlah SAI (Rp) | trx SAU | Jumlah SAU (Rp) | trx Selisih | Jumlah Selisih (Rp) |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-2 | 7 = 5-3 |
| Data Awal | 1,542,087 | 145,242,043,037,038 | 1,561,176 | 145,283,354,490,808 | 19,089 | 41,311,453,770 |
| Hasil Rekonsiliasi | | | | | | |
| Metode 1 | 1,541,592 | 145,236,684,642,063 | 1,541,592 | 145,236,684,642,063 | 0 | 0 |
| Metode 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metode 3 | 39 | 1,794,524,120 | 39 | 1,794,524,120 | 0 | 0 |
| Metode 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metode 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metode 6 | 67 | 24,601,874 | 67 | 24,601,874 | 0 | 0 |
| Metode 7 | 60 | 72,533,200 | 60 | 72,533,200 | 0 | 0 |
| Metode 8 | 112 | 1,203,943,174 | 112 | 982,651,703 | 0 | (221,291,471) |
| SAI Unmatch | 217 | 2,262,792,607 | 0 | 0 | (217) | (2,262,792,607) |
| SAU Unmatch | 0 | 0 | 19,306 | 43,795,537,848 | 19,306 | 43,795,537,848 |

*) Data SAI tidak termasuk Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah senilai Rp 99.813.751.137,00

Keterangan :

1. Metode 3 (NTPN, Tgl. NTPN, Nilai) merupakan metode yang mengabaikan akun sehingga data yang dihasilkan adalah data penerimaan dimana akun pada SAI tidak sesuai dengan akun pada SAU dan telah dilakukan penelitian atas data tersebut didapati 12 transaksi senilai Rp 1.719.909.000,00 pada data SAU *unaudited* tercatat sebagai akun Bea Masuk (412111) namun pada data SAU *audited* tercatat sebagai akun Bea Masuk KITE (412114) serta 27 transaksi senilai Rp74.615.120,00 merupakan kesalahan akun pada data bank yang tidak dapat diajukan koreksi karena keterbatasan waktu koreksi data *audited*;
2. Metode 6 (Tgl. NTPN, Akun, Nilai) 55 transaksi senilai Rp23.460.874,00 merupakan hasil metode 6 yang belum dapat ditelusuri, 1 transaksi senilai Rp172.000,00 merupakan SAI *Unmatch* yang disebabkan atas NTPN tersebut pada data SAU digabung, 11 transaksi senilai Rp969.000,00 merupakan SAI *Unmatch* yang belum dapat ditelusuri (hasil kk.b);
3. Metode 7 (Bln. NTPN, Akun, Nilai) 43 transaksi senilai Rp63.403.200,00 merupakan hasil metode 7 yang belum dapat ditelusuri, 1 transaksi senilai Rp274.000,00 merupakan SAI *Unmatch* yang disebabkan atas NTPN tersebut pada data SAU ada pada akun 411222 yang karena keterbatasan waktu koreksi maka pada data *audited* belum terkoreksi, 10 transaksi senilai Rp8.856.000,00 merupakan SAI *Unmatch* yang belum dapat ditelusuri (hasil kk.b);

4. Metode 8 (NTPN) merupakan metode yang mengabaikan Nilai sehingga data yang dihasilkan adalah data penerimaan dimana Nilai pada SAI tidak sesuai dengan Nilai pada SAU dan telah dilakukan penelitian terdapat data tersebut didapati dari 112 transaksi senilai Rp1.203.943.174,00 :
 - a. 11 transaksi senilai Rp403.577.000,00 Nilai pada SAI telah sesuai dengan BPN yang dicetak oleh bank namun nilai pada SAU lebih tinggi;
 - b. 2 transaksi senilai Rp11.143.000,00 Nilai pada data SAU merupakan gabungan tagihan Pabean, PDRI dan PNBP;
 - c. 99 transaksi senilai Rp789.223.174,00 pada SAI dan Rp558.660.903,00 pada SAU merupakan data hasil rekonsiliasi yang belum dapat ditelusuri perbedaananya.
5. Terdapat SAI *Unmatch* 217 transaksi senilai Rp2.262.792.607,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 transaksi senilai Rp554.460,00 pada data SAU *unaudited* ada namun pada data SAU *audited* tidak ada;
 - b. 7 transaksi senilai Rp57.448.000,00 telah diajukan koreksi akun namun tidak dapat dilakukan koreksi pada data SAU *audited*;
 - c. 21 transaksi senilai Rp678.853.634 terjadi kesalahan akun pada data SAU namun tidak dimintakan koreksi karena keterbatasan waktu koreksi data *audited*;
 - d. 187 transaksi senilai Rp1.525.393.513,00 merupakan data SAI *unmatch* yang belum dapat ditelusuri.

2. Rekonsiliasi Pengembalian Penerimaan Perpajakan

Adapun hasil rekonsiliasi Pengembalian Penerimaan Perpajakan Kepabeanan dan Cukai antara data SAU dan SAI terdapat perbedaan dengan rincian hasil sebagai berikut:

| AKUN | NAMA AKUN | SAI | | SAU | | Selisih | |
|---------------|---|-------|------------------------|-------|------------------------|---------|---------------------|
| | | trx | Nilai | trx | Nilai | trx | Nilai |
| 411511 | Pendapatan Cukai Hasil Tembakau | 6 | 3.057.355.600 | 6 | 3.057.355.600 | - | - |
| 412111 | Pendapatan Bea Masuk | 2.636 | 158.776.928.047 | 2.637 | 159.055.048.210 | (1) | (278.120.163) |
| 412113 | Pendapatan Denda Administrasi | 2.022 | 71.133.493.541 | 2.022 | 71.133.493.541 | - | - |
| 412114 | Pendapatan BM dalam rangka | 780 | 279.308.882.636 | 779 | 279.038.587.364 | 1 | 270.295.272 |
| 412115 | Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau) | - | - | 1 | 23.036.653 | (1) | (23.036.653) |
| 412119 | Pendapatan Pabean Lainnya | 39 | 989.201.343 | 39 | 989.201.343 | - | - |
| 412211 | Pendapatan Bea Keluar | 305 | 185.696.487.896 | 305 | 185.696.487.896 | - | - |
| JUMLAH | | #### | 698.962.349.063 | #### | 698.993.210.607 | (1) | (30.861.544) |

Keterangan :

1. Pengembalian pendapatan dengan nomor SP2D 038890X senilai Rp30.861.544,00 tidak tercatat di DJBC karena kode satker bukan kode satker DJBC;
2. Pengembalian pendapatan dengan nomor SP2D 040458Y senilai Rp23.036.653,00 pada SAI tercatat pada akun 412111 (sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK) sedangkan pada SAU tercatat pada akun 412115;
3. Pengembalian pendapatan dengan nomor SP2D 044231Y senilai Rp270.295.272,00 pada SAI tercatat pada akun 412114 (sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK) sedangkan pada SAU tercatat pada akun 412111.

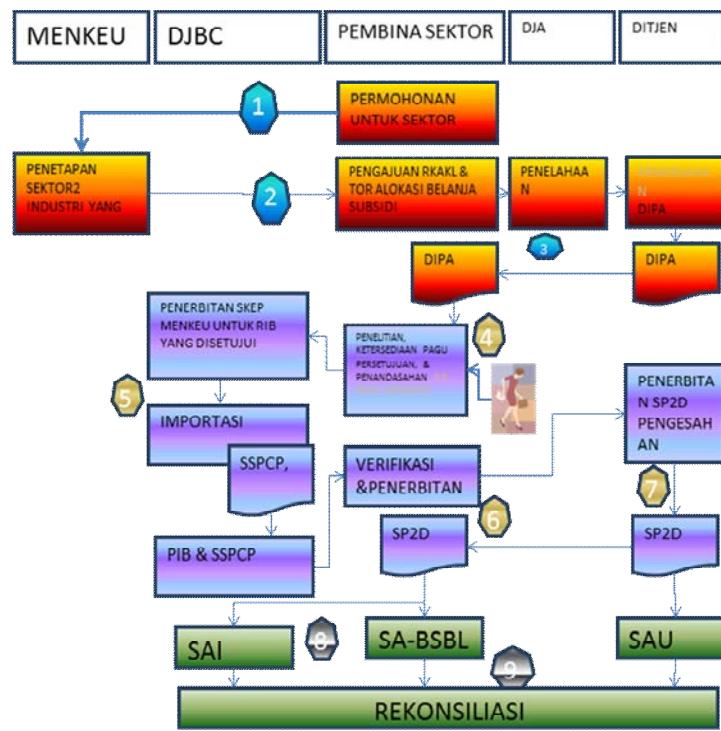
B.3.5. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan dunia usaha dan meningkatkan daya saing usaha dan industri, Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk yang ditanggung pemerintah (BM DTP). Pemberian BM DTP diawali sejak krisis pertengahan tahun 2008 yang sampai dengan sampai saat ini. Melalui pemberian BM DTP diharapkan penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan umum dapat terpenuhi. Selain itu, sektor riil yang sempat terguncang dapat bertahan dan meningkatkan daya saingnya.

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas BM DTP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 72/PMK.05/2012 secara umum yaitu:

- a. Proses *Planning* (Perencanaan) yaitu berdasarkan permohonan dari Instansi Pembina Sektor, Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM DTP sesuai kriteria penilaian tertentu;
- b. Proses *Budgeting* (Penganggaran) yaitu berdasarkan penetapan insentif fiskal per sektor, masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Instansi Pembina Sektor mengajukan RKAKL alokasi belanja subsidi insentif BM DTP yang akan diberikan kepada perusahaan penerima kepada Ditjen Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan DIPA Belanja Subsidi BM DTP;
- c. Proses *Execution* (Pelaksanaan) yaitu:
 1. Perusahaan calon penerima insentif BM DTP mengajukan penandasahan RIB (Rencana Impor Barang) kepada Instansi Pembina Sektor (IPS). Selanjutnya RIB yang telah ditandasahkan oleh perusahaan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) pemberian BM DTP.
 3. Berdasarkan SKMK pemberian BM DTP tersebut, perusahaan melaksanakan importasi barang dan menyelesaikan formalitas kepabeanan di KPPBC pelabuhan bongkar;
 4. KPPBC pelabuhan bongkar melakukan pemotongan quota BM DTP dan memberikan stempel BM DTP pada PIB dan SSPCP. Setiap bulan KPPBC mengirimkan laporan realisasi BM DTP beserta dokumen PIB dan SSPCP yang telah distempel BM DTP kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur PPKC;
 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan menatausahaan Laporan realisasi BM DTP beserta dokumen PIB dan SSPCP yang telah distempel BM DTP dan menyampaikan kepada Instansi Pembina Sektor sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Proses *Accountability & Reporting* (Pertanggungjawaban dan Pelaporan):
 1. Setelah menerima PIB dan SSPSCP yang telah distempel BM DTP, Instansi Pembina Sektor menerbitkan SPM kepada Kuasa BUN dalam hal ini KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D Pengesahan;
 2. SPM dan SP2D Pengesahan tersebut dicatat sebagai realisasi belanja subsidi BM DTP oleh Instansi Pembina Sektor dan dicatat sebagai realisasi pendapatan BM DTP oleh Kantor Pusat DJBC;
 3. Setiap Triwulan dilakukan rekonsiliasi antara realisasi penerimaan BM DTP Satker Kantor Pusat DJBC, realisasi belanja subsidi BM DTP Satker Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor, dan Kuasa BUN;
 4. Belanja subsidi BM DTP dan penerimaan BM DTP merupakan transaksi yang mempengaruhi kas pemerintah dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Alur Proses Bisnis BM DTP



BM DTP TAHUN 2012

Pemberian Insentif Bea Masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tanggal 2 Februari 2012. BM DTP diberikan kepada Industri Sektor tertentu dengan kriteria penilaian:

- memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;
- meningkatkan daya saing;
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- meningkatkan pendapatan negara.

BM DTP tidak diberikan atas :

- Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen)
- Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
- Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/ Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan
- Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
- Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Alokasi Pagu BM DTP Tahun 2012

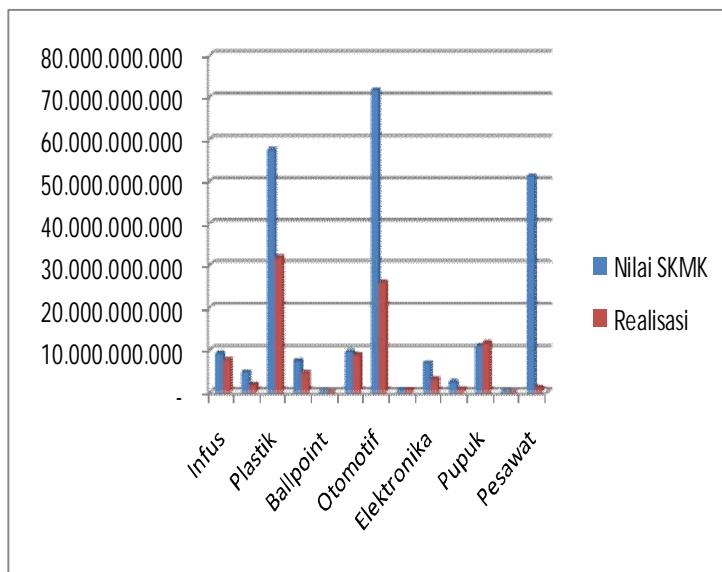
Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan pagu BM DTP tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2012 sebesar Rp600 Miliar. Sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan berdasarkan usulan dari Instansi Pembina Sektor Industri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi BM DTP tahun 2012 yaitu:

- a. PMK No. 96/PMK.011/2012 untuk Industri Plastik;
- b. PMK No. 97/PMK.011/2012 untuk Industri Telekomunikasi;
- c. PMK No. 98/PMK.011/2012 untuk Industri Tinta Toner;
- d. PMK No. 99/PMK.011/2012 untuk Industri Infus;
- e. PMK No. 100/PMK.011/2012 untuk Industri Pesawat;
- f. PMK No. 101/PMK.011/2012 untuk Industri Resin;
- g. PMK No. 102/PMK.011/2012 untuk Industri Pupuk;
- h. PMK No. 103/PMK.011/2012 untuk Industri Serat Optik;
- i. PMK No. 104/PMK.011/2012 untuk Industri Elektronika;
- j. PMK No. 105/PMK.011/2012 untuk Industri Kapal;
- k. PMK No. 106/PMK.011/2012 untuk Industri Kereta Api;
- l. PMK No. 107/PMK.011/2012 untuk Industri Otomotif.
- m. PMK No. 108/PMK.011/2012 untuk Industri Karpet;
- n. PMK No. 109/PMK.011/2012 untuk Industri Ballpoint;
- o. PMK No. 110/PMK.011/2012 untuk Alat Besar.

Realisasi BM DTP 2012

Dari alokasi pagu BM DTP tersebut, nilai Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) pemberian BM DTP tahun 2012 yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp234.620.154.172,00. Dari jumlah tersebut direalisasikan impornya sebesar Rp99.813.751.138,00 atau sebesar 42,54% dengan rincian sebagai berikut:

| PMK Sektor | Instansi Pembina Sektor | Industri | Nilai SKMK | Realisasi | % |
|------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 99/PMK.011/2012 | BPOM | Infus | 9.206.063.500 | 7.844.566.138 | 85,21% |
| 97/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Telekomunikasi | 4.905.853.773 | 1.908.864.000 | 38,91% |
| 96/PMK.011/2012 | Ditjen Basis Industri Manufaktur | Plastik | 57.619.879.162 | 31.909.882.000 | 55,38% |
| 110/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Alat Besar | 7.542.096.556 | 4.785.777.000 | 63,45% |
| 109/PMK.011/2012 | Ditjen Basis Industri Manufaktur | Ballpoint | 544.169.908 | 248.821.000 | 45,72% |
| 108/PMK.011/2012 | Ditjen Basis Industri Manufaktur | Karpet | 9.685.664.962 | 8.932.515.000 | 92,22% |
| 107/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Otomotif | 71.769.485.705 | 26.026.424.000 | 36,26% |
| 105/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Kapal | 728.565.419 | 735.176.000 | 100,91% |
| 104/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Elektronika | 7.078.082.593 | 3.239.772.000 | 45,77% |
| 103/PMK.011/2012 | Ditjen IUBTT | Serat Optik | 2.528.455.018 | 904.486.000 | 35,77% |
| 102/PMK.011/2012 | Ditjen Basis Industri Manufaktur | Pupuk | 11.057.803.350 | 11.799.918.000 | 106,71% |
| 101/PMK.011/2012 | Ditjen Basis Industri Manufaktur | Resin | 544.362.973 | 271.361.000 | 49,85% |
| 100/PMK.011/2012 | Ditjen Perhubungan Udara | Pesawat | 51.409.671.254 | 1.206.189.000 | 2,35% |
| | | | 234.620.154.172 | 99.813.751.138 | 42,54% |

Tabel Perbandingan Nilai SKMK yang terbit dengan realisasi impor

Realisasi importasi BM DTP tersebut telah terbit SP2D pengesahannya sehingga oleh Kantor Pusat DJBC dicatat sebagai pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah (412116) sebesar Rp99.813.751.138,00.

Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (412116) 106 transaksi SP2D senilai Rp99.813.751.137,00 sesuai dengan data SAU.

Realisasi BM DTP tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan jenis industri adalah sebagai berikut:

| Industri | 2012 | 2011 | 2010 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Pesawat | 1.206.189.000 | 1.178.584.000 | 10.291.768.000 |
| Resin | 271.361.000 | 1.817.763.000 | 0 |
| Pupuk | 11.799.918.000 | 0 | 0 |
| Serat Optik | 904.486.000 | 0 | 2.297.403.000 |
| Elektronika | 3.239.772.000 | 1.981.864.000 | 16.054.782.000 |
| Kapal | 735.176.000 | 1.327.722.000 | 3.156.020.000 |
| Otomotif | 26.026.424.000 | 0 | 0 |
| Karpet | 8.932.515.000 | 438.740.000 | 0 |
| Ballpoint | 248.821.000 | 593.544.000 | 1.016.720.000 |
| Alat Besar | 4.785.777.000 | 12.201.434.000 | 58.023.114.000 |
| Plastik | 31.909.882.000 | 15.797.883.000 | 47.468.206.957 |
| Telekomunikasi | 1.908.864.000 | 4.282.967.000 | 15.282.588.000 |
| Infus | 7.844.566.138 | 1.685.576.000 | 7.118.574.000 |
| kendaraan bermotor | | 32.004.599.000 | 124.763.755.000 |
| Kawat Ban (Steel Cord) | | | 7.911.192.000 |
| PLTU | | | 57.516.000 |
| Sorbitol | | | 650.546.000 |
| | 99.813.751.138 | 73.310.676.000 | 294.092.184.957 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari Aset sebesar **Rp93.150.323.894.383,00**, Kewajiban sebesar **Rp814.697.948.478,00**, dan Ekuitas Dana sebesar **Rp92.335.625.945.905,00**.

Nilai Aset per 31 Desember 2012 sebesar **Rp93.150.323.894.383,00** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp53.004.852.749.265,00**, Aset Tetap sebesar **Rp39.244.462.867.245,00**, Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp170.783.795,00**, dan Aset Lainnya sebesar **Rp900.837.494.078,00**.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2012 sebesar **Rp814.697.948.478,00** terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp814.697.948.478,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**.

Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 sebesar **Rp92.335.625.945.905,00** terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar **Rp52.190.154.800.787,00** dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp40.145.471.145.118,00**.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 49 berikut.

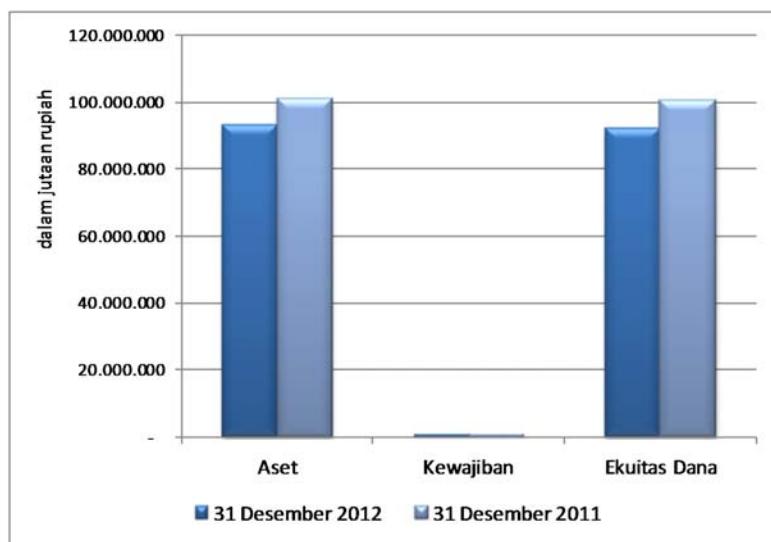
Tabel 49
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | Rupiah | % |
| Aset | 93.150.323.894.383 | 101.349.409.297.605 | (8.199.085.403.222) | (8,09) |
| Kewajiban | 814.697.948.478 | 806.982.593.139 | 7.715.355.339 | 0,96 |
| Ekuitas Dana | 92.335.625.945.905 | 100.542.426.704.466 | (8.206.800.758.561) | (8,16) |

Komposisi Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Grafik 17 berikut.

Grafik 17
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011



PENJELASAN PER POS NERACA**C.1. Aset Lancar****C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp8.796.459.747,00*

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp8.796.459.747,00** dan **Rp1.439.660.756,00**. Saldo tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 50 berikut.

Tabel 50
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | (dalam rupiah) | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| SETJEN | 4.149.790.622 | (1.279.591.407) | 5.429.382.029 | (424,31) |
| DJA | 1.399.376.816 | - | 1.399.376.816 | - |
| DJP | 1.786.093.794 | 1.325.869.577 | 460.224.217 | 34,71 |
| DJBC | 319.734.538 | 991.716.122 | (671.981.584) | (67,76) |
| DJPB | 242.392.866 | 210.947.593 | 31.445.273 | 14,91 |
| DJKN | 279.532.097 | 190.631.871 | 88.900.226 | 46,63 |
| BAPEPAM-LK | 574.739.014 | - | 574.739.014 | - |
| BPPK | 44.800.000 | 87.000 | 44.713.000 | 51.394,25 |
| JUMLAH | 8.796.459.747 | 1.439.660.756 | 7.356.798.991 | 511,01 |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp8.796.459.747,00** merupakan saldo rekening koran bank yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran untuk kepentingan operasional, saldo kas tunai (brankas), dan kuitansi-kuitansi yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian daftar rekening bank dapat dilihat pada Lampiran Daftar Rekening Dipertahankan.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp6.659.080.618,00*

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp6.659.080.618,00** dan **Rp3.060.880.248,00**. Nilai tersebut mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 51 berikut.

Tabel 51
Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | (dalam rupiah) | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| DJBC | 1.343.412.007 | 884.854.990 | 458.557.017 | 51,82 |
| DJKN | 5.315.668.611 | 2.176.025.158 | 3.139.643.453 | 144,28 |
| BPPK | - | 100 | (100) | (100,00) |
| JUMLAH | 6.659.080.618 | 3.060.880.248 | 3.598.200.370 | 117,55 |

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp20.739.677.126,00*

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp20.739.677.126,00** dan **Rp8.115.195.871,00**. Nilai tersebut terdiri dari bunga dan jasa giro rekening Bendahara Pengeluaran yang belum menerapkan *Treasury Notional Pooling* (TNP) dan uang pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Pendapatan bunga jasa giro yang berasal dari rekening Bendahara Penerimaan yang belum disetor dapat dilihat di akun Kas di Bendahara Penerimaan.

Posisi Kas Lainnya dan Setara Kas pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 52 berikut.

Tabel 52
Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 1.373.855.852 | 3.406.882.454 | (2.033.026.602) | (59,67) |
| ITJEN | - | 4.537.500 | (4.537.500) | (100,00) |
| DJA | 1.415.967.753 | 801.369.450 | 614.598.303 | 76,69 |
| DJP | 682.852.812 | 287.441.232 | 395.411.580 | 137,56 |
| DJBC | 60.985.716 | 344.534.657 | (283.548.941) | (82,30) |
| DJPK | 374.788.740 | - | 374.788.740 | - |
| DJPU | - | - | - | - |
| DJPB | 15.020.274.450 | 838.930.772 | 14.181.343.678 | 1.690,41 |
| DJKN | 62.087.803 | 1.999.836.105 | (1.937.748.302) | (96,90) |
| BAPEPAM-LK | 938.841.656 | 315.151.750 | 623.689.906 | 197,90 |
| BPPK | 4.446.804 | 9.045.651 | (4.598.847) | (50,84) |
| BKF | 805.575.540 | 107.466.300 | 698.109.240 | 649,61 |
| JUMLAH | 20.739.677.126 | 8.115.195.871 | 12.624.481.255 | 155,57 |

C.1.4. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp3.641.157.122.268,00*

Nilai Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp3.641.157.122.268,00** dan **Rp2.168.961.124.597,00**.

Posisi Kas pada Badan Layanan Umum pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 53 berikut.

Tabel 53
Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 3.616.542.724.834 | 2.152.191.089.517 | 1.464.351.635.317 | 68,04 |
| BPPK | 24.614.397.434 | 16.770.035.080 | 7.844.362.354 | 46,78 |
| JUMLAH | 3.641.157.122.268 | 2.168.961.124.597 | 1.472.195.997.671 | 67,88 |

Penjelasan Kas pada Badan Layanan Umum

1. Kas pada Badan Layanan Umum pada Setjen terdiri dari Kas Pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar **Rp3.193.448.804.264,00** dan Kas Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar **Rp423.093.920.570,00**. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum pada Setjen dapat dilihat pada tabel 54 berikut ini:

Tabel 54
Rincian Kas pada BLU Sekretariat Jenderal

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| PIP | 3.193.448.804.264 | 2.152.191.089.517 | 1.041.257.714.747 | 48,38 |
| LPDP | 423.093.920.570 | - | 423.093.920.570 | - |
| JUMLAH | 3.616.542.724.834 | 2.168.961.124.597 | 1.464.351.635.317 | 68,04 |

Kas pada PIP sebesar **Rp3.193.448.804.264,00** terdiri atas Kas pada BLU dan Kas di Bendahara Penerimaan yang disimpan dalam bentuk giro, deposito pada bank umum maupun kas pada pihak ketiga untuk pembayaran belanja yang sudah dibayar secara kas oleh PIP tetapi belum disahkan untuk pencatatan pada kas negara. Nilai tersebut merupakan besaran kas milik PIP (baik dalam bentuk giro maupun deposito jangka pendek) yang terdiri dari kas tunai, kas di rekening pendapatan giro dollar AS (bank BRI dengan nomor rekening 0329.02.0002255.30.2), kas di rekening bendahara penerimaan (bank BRI dengan nomor rekening 0329.01.002911.30.6) dan tercatat pada kas Negara serta kas di bendahara pengeluaran. Pengelolaan kas untuk pendapatan dan belanja yang telah disahkan dan belum disahkan dikelola dalam rekening bersama. Untuk pendapatan dikelola dalam rekening pendapatan dan untuk belanja dikelola dalam rekening bendahara pengeluaran. Kas BLU yang dibukukan pada Giro Dollar AS merupakan pendapatan bunga atas giro Dollar AS pada bank BRI pada Bank BRI sebesar USD200.226,24 yang merupakan bagian dari BA 999.03, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah menghasilkan pendapatan bunga yang sebesar USD912,04 atau setara dengan Rp8.819.427,00. sedangkan untuk kas di Rekening Pendapatan adalah sebesar Rp9.000.000,00 atau setara USD1.048,34 pada saat rekening tersebut dibuka pada tanggal 25 Mei 2011 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah mendapatkan bunga total sebesar USD6,56 atau setara Rp63.435,00 dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca sebesar Rp9.670/USD. Rincian Kas baik untuk Kas pada BLU maupun Kas di Bendahara Penerimaan disajikan secara gabungan pada Tabel 55 berikut.

Tabel 55
Rincian Kas pada PIP

| Nomor | Nama Bank | Jumlah Rupiah (dalam rupiah) |
|---------------|---|---------------------------------|
| 1 | Deposito BRI (16 bilyet) | Rp 1.145.000.000.000 |
| 2 | Deposito Bank Mandiri (5 bilyet) | Rp 601.000.000.000 |
| 3 | Deposito BTN (7 bilyet) | Rp 280.000.000.000 |
| 4 | Deposito Bank Bukopin (7 bilyet) | Rp 690.500.000.000 |
| 5 | Deposito Bank Muamalat (4 bilyet) | Rp 139.000.000.000 |
| 6 | Deposito Bank BJB Syariah (1 bilyet) | Rp 37.500.000.000 |
| 7 | Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet) | Rp 40.500.000.000 |
| 8 | Deposito Bank Sumut (2 bilyet) | Rp 91.500.000.000 |
| 9 | Deposito Bank Sulut (1 bilyet) | Rp 20.000.000.000 |
| 10 | Deposito Bank BRI Syariah (2 bilyet) | Rp 95.000.000.000 |
| 11 | Kas di Bendahara pengeluaran | Rp 619.715.015 |
| 12 | Kas di Rekening Pendapatan | Rp 6.044.313.421 |
| 13 | Kas di Rekening Pendapatan Giro Dollar AS | Rp 19.020.310 |
| 14 | Kas di Rek. Pendapatan Dana Geothermal | Rp 46.767.421.430 |
| 15 | Kas yang berada pada pihak ketiga | Rp - |
| 16 | Selisih Kurs | Rp (1.666.014) |
| 17 | Pembulatan | Rp 101 |
| Jumlah | | Rp 3.193.448.804.264 |

Kas pada BLU-LPDP sebesar **Rp423.093.920.570,00** disimpan dalam bentuk tunai, giro, dan deposito pada bank umum.

Rincian Kas pada BLU – LPDP disajikan pada Tabel 56 berikut.

Tabel 56
Rincian Kas pada LPDP

| No | Jenis | Saldo 31 Desember 2012 (dalam rupiah) |
|---------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Deposito pada Bank Umum | Rp420.600.000.000 |
| 2 | Kas di Rekening Operasional DPPN | Rp2.328.584.241 |
| 3 | Kas di Rekening Dana Endowment Fund | Rp26.271 |
| 4 | Kas di Rekening Induk DPPN | Rp4.109.809 |
| 5 | Kas Tunai | Rp161.200.252 |
| 6 | Pembulatan | (Rp3) |
| JUMLAH | | Rp423.093.920.570 |

2. Nilai sebesar **Rp24.614.397.434,00** di BPPK merupakan Saldo Kas pada BLU STAN. Rincian Saldo Kas pada BLU STAN disajikan pada Tabel 57 berikut.

Tabel 57
Rincian Kas pada LPDP

(dalam rupiah)

| No. | Bank/No Rekening | Nama Rekening | Jumlah |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Mandiri/1280005548885 | Bendahara Administrasi Keuangan BLU | Rp 1.880.767.426,00 |
| 2 | Mandiri/1010006650434 | Dana Kelolaan BLU | Rp 3.833.677.808,00 |
| 3 | BTN/00044.01.30.000408.3 | Pengelolaan Kas BLU | Rp 8.208.225.932,89 |
| 4 | Deposito Berjangka* | | Rp 12.000.000.000,00 |
| 5 | Uang Tunai | | Rp 99.397.500,00 |
| 6 | Cek yang masih beredar | | Rp (1.407.670.782,00) |
| 7 | Kesulitan pecahan | | Rp (451,00) |
| Jumlah | | | Rp 24.614.397.433,89 |

*) Pada tanggal neraca, STAN memiliki 2 deposito berjangka yaitu:

- a. Deposito berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 17 Desember 2012 senilai Rp7.000.000.000,00, tingkat bunga 6,25%, jatuh tempo 17 Maret 2013, dan
- b. Deposito berjangka 5 hari pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 28 Desember 2012 senilai Rp5.000.000.000,00 tingkat bunga 6,25%, jatuh tempo 2 Januari 2013.

C.1.5. Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja Dibayar Di Muka
Rp23.212.842.494,00*

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp23.212.842.494,00** dan **Rp10.002.522.352,00**.

Posisi Belanja Dibayar Dimuka per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 58 berikut.

Tabel 58
Belanja Dibayar Dimuka Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 2.724.137.221 | - | 2.724.137.221 | - |
| DJP | 17.724.276.407 | 5.531.094.158 | 12.193.182.249 | 220,45 |
| DJBC | 78.733.696 | 53.431.433 | 25.302.263 | 47,35 |
| DJPB | 1.808.910.061 | 2.782.161.134 | (973.251.073) | (34,98) |
| DJKN | 709.210.065 | 902.191.699 | (192.981.634) | (21,39) |
| BKF | 167.575.044 | 733.643.928 | (566.068.884) | (77,16) |
| JUMLAH | 23.212.842.494 | 10.002.522.352 | 13.210.320.142 | 132,07 |

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012 sebesar **Rp23.212.842.494,00** terdiri dari:

- Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (*prepaid*) Rp 1.844.120.654,00
- Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (*prepaid*) Rp 21.368.721.840,00

C.1.6. Uang Muka Belanja

*Uang Muka Belanja
Rp3.723.250.772,00*

Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp3.723.250.772,00** dan **Rp16.924.326.150,00**.

Posisi Uang Muka Belanja per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 59 berikut.

Tabel 59
Uang Muka Belanja Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Rupiah | % |
| DJP | 3.723.250.772 | 16.885.041.667 | (13.161.790.895) | (77,95) |
| DJKN | - | 39.284.483 | (39.284.483) | (100,00) |
| JUMLAH | 3.723.250.772 | 16.924.326.150 | (13.201.075.378) | (78,00) |

Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2012 sebesar **Rp3.723.250.772,00** terdiri dari:

- Uang Muka Belanja Pegawai (*prepayment*) Rp 37.712.105,00
- Uang Muka Belanja Barang (*prepayment*) Rp3.685.538.667,00

C.1.7. Piutang Pajak

Piutang Pajak
Rp93.468.526.344.200,00

Nilai Piutang Pajak bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp93.468.526.344.200,00** dan **Rp108.063.462.383.641,00**. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar **Rp14.594.936.039.441,00** atau **13,51** persen.

Posisi Piutang Pajak bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 60 berikut.

Tabel 60
Piutang Pajak Bruto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Rupiah | % |
| DJP | 70.721.181.887.660 | 86.801.366.456.341 | (16.080.184.568.681) | (18,53) |
| DJBC | 22.747.344.456.540 | 21.262.095.927.300 | 1.485.248.529.240 | 6,99 |
| JUMLAH | 93.468.526.344.200 | 108.063.462.383.641 | (14.594.936.039.441) | (13,51) |

Sedangkan Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2012 setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang dapat dilihat pada Tabel 61 berikut.

Tabel 61
Piutang Pajak Neto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Rupiah | % |
| DJP | 27.792.164.525.637 | 40.595.674.369.318 | (12.803.509.843.681) | (31,54) |
| DJBC | 21.125.419.187.619 | 19.650.478.923.984 | 1.474.940.263.635 | 7,51 |
| JUMLAH | 48.917.583.713.256 | 60.246.153.293.302 | (11.328.569.580.046) | (18,80) |

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2012 sebesar **Rp48.917.583.713.256,00** merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang. Adapun nilai Piutang Pajak bruto per 31 Desember 2012 sebesar **Rp93.468.526.344.200,00** dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Nilai Piutang Pajak pada DJP per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp70.721.181.887.660,00** dan **Rp86.801.366.456.341,00** merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2012.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 62 berikut.

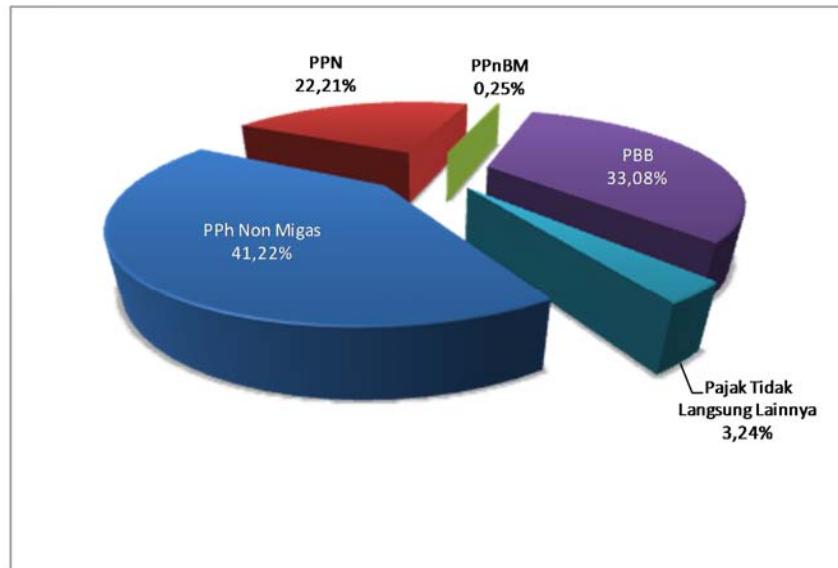
Tabel 62
Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJP
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Rupiah | % |
| Piutang PPh Pasal 21 | 1.391.617.937.283 | 1.085.067.767.115 | 306.550.170.168 | 28,25 |
| Piutang PPh Pasal 22 | 468.432.815.179 | 466.665.742.712 | 1.767.072.467 | 0,38 |
| Piutang PPh Pasal 23 | 4.918.350.082.956 | 1.971.735.365.857 | 2.946.614.717.099 | 149,44 |
| Piutang PPh Pasal 25/29 OP | 1.218.354.326.211 | 1.011.913.424.152 | 206.440.902.059 | 20,40 |
| Piutang PPh Pasal 25/29 Badan | 18.473.224.608.353 | 14.272.978.070.717 | 4.200.246.537.636 | 29,43 |
| Piutang PPh Pasal 26 | 2.093.962.968.364 | 2.831.091.117.252 | (737.128.148.888) | (26,04) |
| Piutang PPN Final | 589.715.652.211 | 517.874.742.847 | 71.840.909.364 | 13,87 |
| Jumlah Piutang PPh Non Migas | 29.153.658.390.557 | 22.157.326.230.652 | 6.996.332.159.905 | 31,58 |
| Piutang PPN Dalam Negeri | 15.704.901.728.808 | 42.235.408.556.549 | (26.530.506.827.741) | (62,82) |
| Jumlah Piutang PPN | 15.704.901.728.808 | 42.235.408.556.549 | (26.530.506.827.741) | (62,82) |
| Piutang PPnBM dalam Negeri | 176.236.958.386 | 208.754.851.900 | (32.517.893.514) | (15,58) |
| Jumlah Piutang PPnBM | 176.236.958.386 | 208.754.851.900 | (32.517.893.514) | (15,58) |
| Piutang PBB Pedesaan | 2.996.934.810.829 | 2.401.365.978.916 | 595.568.831.913 | 24,80 |
| Piutang PBB Perkotaan | 11.591.237.794.772 | 11.291.484.268.102 | 299.753.526.670 | 2,65 |
| Piutang PBB Perkebunan | 661.307.597.823 | 394.209.918.227 | 267.097.679.596 | 67,76 |
| Piutang PBB Kehutanan | 558.001.107.117 | 630.580.993.822 | (72.579.886.705) | (11,51) |
| Piutang PBB Pertambangan | 7.587.645.821.758 | 5.602.915.905.581 | 1.984.729.916.177 | 35,42 |
| Jumlah Piutang PBB | 23.395.127.132.299 | 20.320.557.064.648 | 3.074.570.067.651 | 15,13 |
| Piutang Pajak Tidak Langsung Lain | 15.396.781 | 691.914.937 | (676.518.156) | (97,77) |
| Piutang Bunga Penagihan PPh | 2.291.242.280.829 | 1.878.627.837.655 | 412.614.443.174 | 21,96 |
| Jumlah Piutang Pajak Lainnya | 2.291.257.677.610 | 1.879.319.752.592 | 411.937.925.018 | 21,92 |
| JUMLAH | 70.721.181.887.660 | 86.801.366.456.341 | (16.080.184.568.681) | (18,53) |

Komposisi Piutang Pajak per Jenis Pajak pada DJP per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Grafik 18 berikut.

**Grafik 18
Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2012**



Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 63 berikut.

**Tabel 63
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2012**

(dalam rupiah)

| Umur Piutang | Jumlah |
|--|---------------------------|
| Sampai dengan 1 Tahun | 20.573.515.583.316 |
| Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun | 6.881.679.095.571 |
| Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun | 7.430.393.929.500 |
| Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun | 8.059.452.008.491 |
| Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun | 4.844.915.814.960 |
| Lebih dari 5 Tahun | 22.931.225.455.842 |
| Jumlah* | 70.721.181.887.681 |

* Selisih antara neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp20,00 karena pembulatan

*Barang Sitaan dalam
Rangka Penagihan Pajak*

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp1.613.884.528.878,00. dan dari piutang pajak sebesar Rp1.111.018.063.133,00. Dari aset Wajib Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp133.363.003.763,00.

DJBC telah menyampaikan data SP3DRI selama tahun 2012 dari DJBC kepada DJP sebagai berikut:

SP3DRI

- a. DJBC telah menyampaikan data SP3DRI kepada DJP yang dikompilasi dari hasil validasi piutang selama tahun 2012 di lingkungan DJBC yaitu sebanyak 438 dokumen, dengan nilai sebesar Rp76.346.618.686,00 dengan rincian sebagai berikut :

| Nama Akun | Akun | Nilai (Rp) |
|-------------------------------|--------|-----------------------|
| PPN Impor | 115132 | 43.151.217.289 |
| PPN Lain | 115139 | - |
| PPnBM | 115142 | 20.070.959.856 |
| PPH Pasal 22 Impor | 115123 | 8.326.951.567 |
| Piutang Bunga Penagihan PPnBM | 115173 | - |
| Piutang Bunga Penagihan PPN | 115174 | 4.767.089.974 |
| Piutang Bunga Penagihan PPh | 115175 | 30.400.000 |
| JUMLAH | | 76.346.618.686 |

- b. Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama 2012 senilai Rp76.346.618.686,00. Atas nilai tersebut dapat dijelaskan dengan data sebagai berikut:

| Tindak Lanjut | Tahun 2012 | | Tahun 2011 | | Tahun 2010 | | Jumlah |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| | Jml SP3DRI | Nilai (Rp) | Jml SP3DRI | Nilai (Rp) | Jml SP3DRI | Nilai (Rp) | |
| Lunas | 31 | 5.419.426.389 | 38 | 4.665.761.528 | 37 | 15.248.688.112 | 24.769.338.029 |
| Telah diterbitkan SKPKB | 10 | 10.307.536.360 | 42 | 63.186.748.159 | 84 | 19.680.125.824 | 93.174.410.343 |
| Himbauan | 8 | 40.531.000 | 12 | 10.120.223.058 | 13 | 4.271.135.559 | 14.431.889.617 |
| Masih dalam proses penelitian | 390 | 60.579.124.937 | 155 | 247.675.079.078 | 311 | 23.742.697.798 | 331.996.901.813 |
| Total | 439 | 76.346.618.686 | 247 | 325.647.811.823 | 445 | 62.942.647.293 | 464.372.539.802 |

2. Nilai Piutang Pajak bruto pada DJBC per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp22.747.344.456.540,00** dan **Rp21.262.095.927.300,00**. Piutang pajak merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 64 berikut.

Tabel 64
Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJBC
Per 31 Desember 2012

| Uraian | 31 Desember 2012 (dalam rupiah) |
|--|------------------------------------|
| Piutang PPh Pasal 22 | 6.545.000 |
| Piutang PPh Pasal 22 Impor | 38.935.638.305 |
| Piutang PPN Dalam Negeri | 3.208.801.445.758 |
| Piutang PPN Impor | 203.237.408.922 |
| Piutang PPN Lainnya | 0 |
| Piutang PPnBM Impor | 62.468.918.221 |
| Piutang Cukai Hasil Tembakau | 17.033.037.355.284 |
| Piutang Cukai Ethyl Alkohol | 889.000.000 |
| Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol | 3.130.764.100 |
| Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai | 106.520.802.678 |
| Piutang Pendapatan Cukai Lainnya | 46.852.066.615 |
| Piutang Bunga Penagihan PPH | 0 |
| Piutang Bunga Penagihan PPN | 4.652.265.594 |
| Piutang Bunga Penagihan PPnBM | 0 |
| Piutang Bea masuk | 902.381.234.997 |
| Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean | 800.768.267.334 |
| Piutang Pendapatan Pabean Lainnya | 177.749.777.036 |
| Piutang Pajak/pungutan ekspor | 149.477.642.624 |
| Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar | 8.143.652.172 |
| Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar | 291.671.900 |
| Jumlah | 22.747.344.456.540 |

Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 65 berikut.

Tabel 65
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

| AKUN | 0 s.d. 1 Thn | 1 s.d. 2 Thn | 2 s.d. 3 Thn | > 3 Tahun | JUMLAH |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 115122 PPh Pasal 22 | 6.545.000 | - | - | - | 6.545.000 |
| 115123 PPh Pasal 22 Impor | 16.362.200.392 | 1.912.033.199 | 359.810.057 | 20.301.594.657 | 38.935.638.305 |
| 115131 PPN Dalam Negeri | 3.208.801.445.758 | - | - | - | 3.208.801.445.758 |
| 115132 PPN Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115139 PPN Lain | 82.086.680.936 | 7.294.116.637 | 2.823.515.938 | 111.033.095.411 | 203.237.408.921 |
| 115142 PPN-BM | 60.266.071.500 | 0 | 14.391.000 | 2.188.455.721 | 62.468.918.221 |
| 115161 Cukai Hasil Tembakau | 17.015.075.010.600 | - | 2.966.480.724 | 14.995.863.960 | 17.033.037.355.284 |
| 115162 Cukai Etil Alkohol | 0 | 889.000.000 | 0 | 0 | 889.000.000 |
| 115163 Cukai MMEA | 22.717.500 | 146.592.000 | 351.009.600 | 2.610.445.000 | 3.130.764.100 |
| 115164 Denda Administrasi Cukai | 1.749.662.680 | 774.437.680 | 1.897.430.771 | 102.099.271.547 | 106.520.802.678 |
| 115169 Cukai Lainnya | 346.878.410 | 209.503.436 | 705.856.444 | 45.589.828.325 | 46.852.066.615 |
| 115174 Piutang Bunga Penagihan PPN | 308.583.323 | 0 | 0 | 4.343.682.271 | 4.652.265.594 |
| 115175 Piutang Bunga Penagihan PPnBM | - | - | - | - | - |
| 115181 Bea Masuk | 284.364.342.472 | 86.084.017.693 | 9.375.790.594 | 522.557.084.238 | 902.381.234.997 |
| 115183 Denda Administrasi Pabean | 86.429.390.685 | 385.079.141.624 | 9.279.698.839 | 319.980.036.186 | 800.768.267.334 |
| 115184 Pabean Lainnya | 2.282.414.215 | 27.913.735.050 | 5.463.227.451 | 142.090.400.320 | 177.749.777.036 |
| 115185 Bea Keluar | 9.077.038.085 | 9.442.070.668 | 6.322.914.220 | 124.635.619.651 | 149.477.642.624 |
| 115186 Denda Administrasi Bea Keluar | 82.774.482 | 2.178.280.000 | 3.598.596.892 | 2.284.000.798 | 8.143.652.172 |
| 115187 Bunga Bea Keluar | 1.744.540 | 98.079.833 | - | 191.847.527 | 291.671.900 |
| JUMLAH | 20.767.263.500.578 | 522.021.007.821 | 43.158.722.530 | 1.414.901.225.612 | 22.747.344.456.541 |

C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Rp44.550.942.630.944,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp44.550.942.630.944,00** dan **Rp47.817.309.090.339,00** yang terdiri atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak pada DJP sebesar **Rp42.929.017.362.023,00** dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak pada DJBC sebesar **Rp1.621.925.268.921,00**.

Adapun nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak per 31 Desember 2012 sebesar **Rp44.550.942.630.944,00** dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak pada DJP sebesar **Rp42.929.017.362.023,00** per 31 Desember 2012. Perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

| Uraian | Kualitas Piutang | | | | Total |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | |
| Piutang Pajak (Rp) | 13.813.564.537.647 | 9.941.825.452.568 | 10.157.461.798.694 | 36.808.330.098.772 | 70.721.181.887.681* |
| Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan | 71.891.509.057** | 31.771.327.253 | 23.166.592.278 | 6.533.575.174 | 133.363.003.763 |
| Dasar Penghitungan Penyisihan | 13.813.564.537.647 | 9.910.054.125.315 | 10.134.295.206.415 | 36.801.796.523.597 | 70.659.710.392.975 |
| Prosentasi Penyisihan | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| Nilai Penyisihan Piutang Pajak | 69.067.822.688 | 991.005.412.531 | 5.067.147.603.208 | 36.801.796.523.597 | 42.929.017.362.025*** |

Keterangan: * Selisih antara neraca dengan data piutang per kualitas sebesar Rp21.00 karena pembulatan

** Barang sitaan/agunan tidak mengurangi kualitas piutang lancar

*** Selisih pembulatan atas penyisihan Rp2,00 dengan Neraca

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

| | <u>2012</u> |
|---|--------------------------------|
| Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (2011) | Rp46.205.692.087.049,00 |
| Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih | Rp28.075.790.794.612,00 |
| Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-akhir | Rp42.929.017.362.025,00 |
| Penambahan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2012 | Rp24.799.116.069.588,00 |

*Penyisihan, Daluwarsa,
Penghapusan Piutang
Pajak, dan Sengketa
Pajak*

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp36.808.330.098.772,00 tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.638.230.038.255,00. Selama tahun anggaran 2012 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp1.176.047.212.013,00 dan termasuk didalamnya piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp805.985.347.953,00 dan terdapat nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukkan.

Pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2011 *Audited*, terdapat piutang pajak yang berasal dari 5 (lima) SKPKB pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang dicatat dalam neraca pada akun piutang pajak dan telah disisihkan sebesar Rp28.075.790.794.612,00.

Rincian 5 (lima) SKPKB pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sebagai berikut:

| <i>(dalam rupiah)</i> | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------|
| No | Tahun Terbit | Nilai Pokok Piutang |
| 1 | 2010 | 10.756.581.796.425,00 |
| 2 | 2010 | 7.864.054.879.049,00 |
| 3 | 2010 | 1.285.884.600.000,00 |
| 4 | 2011 | 5.040.345.700.138,00 |
| 5 | 2011 | 3.128.923.819.000,00 |
| Jumlah | | 28.075.790.794.612,00 |

Dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, terhadap piutang sebesar Rp28.075.790.794.612,00 di atas, dikategorikan dalam kualitas piutang pajak macet.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah disimpulkan bahwa piutang pajak tersebut sudah tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi syarat untuk dihapuskan.

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pengusulan penghapusan piutang tersebut di atas kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2012.

Berdasarkan usulan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.03/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penghapusan Piutang Pajak sebesar Rp28.075.790.794.612,00 pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Berdasarkan KMK penghapusan tersebut, maka untuk Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pajak telah menghapus penyisihan piutang pajak sebesar Rp28.075.790.794.612,00.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp55.217.723.152.085,00. Dari nilai nominal ketetapan pajak kurang bayar tersebut, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.518.524.812.804,00.

Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak Per 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

- Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak pada DJBC sebesar **Rp1.621.925.268.921,00** per 31 Desember 2012. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada DJBC per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 66 berikut.

Tabel 66
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Akun | Uraian Akun | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Total |
|--------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 116112 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPn Non Migas | 79.749.786 | 132.082.320 | 120.902.205 | 20.686.840.247 | 21.019.574.558 |
| 116113 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPn | 16.446.064.870 | 525.927.914 | 816.555.737 | 113.357.176.149 | 131.145.724.668 |
| 116114 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM | 301.330.358 | - | - | 2.188.455.721 | 2.489.786.079 |
| 116116 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Meterai | 85.084.734.947 | 172.348.243 | 635.480.080 | 170.485.856.893 | 256.378.420.163 |
| 116117 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya | 1.542.916 | - | - | 4.343.682.271 | 4.345.225.187 |
| 116118 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Cukai Lainnya | 1.897.634.453 | 44.776.701.877 | 10.674.994.371 | 1.149.197.207.568 | 1.206.546.538.268 |
| | Jumlah | 103.811.057.329 | 45.607.060.353 | 12.247.932.392 | 1.460.259.218.848 | 1.621.925.268.923 |

C.1.9. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp96.450.818.001,00*

Nilai Piutang Bukan Pajak bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp96.450.818.001,00** dan **Rp85.849.145.052,00**. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Posisi Piutang Bukan Pajak bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan per unit Eselon I per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 67 berikut.

**Tabel 67
Piutang PNBP Bruto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012**

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | (dalam rupiah) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| SETJEN | 66.292.680 | 544.011.696 | (477.719.016) | (87,81) |
| DJP | 6.708.240 | 3.183.687.618 | (3.176.979.378) | (99,79) |
| DJBC | 18.021.785.000 | 25.004.513.000 | (6.982.728.000) | (27,93) |
| DJPK | 100.803.067 | - | 100.803.067 | - |
| DJPB | 14.485.227.455 | 138.308.846 | 14.346.918.609 | 10.373,10 |
| DJKN | - | 6.252.903 | (6.252.903) | (100,00) |
| BAPEPAM-LK | 63.379.536.332 | 56.508.964.892 | 6.870.571.440 | 12,16 |
| BPPK | 390.465.227 | 463.406.097 | (72.940.870) | (15,74) |
| JUMLAH | 96.450.818.001 | 85.849.145.052 | 10.601.672.949 | 12,35 |

Sedangkan Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang dapat dilihat pada Tabel 68 berikut

**Tabel 68
Piutang PNBP Neto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | (dalam rupiah) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rupiah | % |
| SETJEN | 65.961.217 | 541.291.638 | (475.330.421) | (87,81) |
| DJP | 6.674.789 | 3.167.769.180 | (3.161.094.391) | (99,79) |
| DJBC | 7.790.755.075 | 19.658.449.460 | (11.867.694.385) | (60,37) |
| DJPK | 100.299.052 | - | 100.299.052 | - |
| DJPB | 14.412.801.301 | 137.617.302 | 14.275.183.999 | 10.373,10 |
| DJKN | - | 6.221.639 | (6.221.639) | (100,00) |
| BAPEPAM-LK | 22.114.233.860 | 17.242.320.313 | 4.871.913.547 | 28,26 |
| BPPK | 151.119.064 | 226.096.000 | (74.976.936) | (33,16) |
| JUMLAH | 44.641.844.358 | 40.979.765.532 | 3.662.078.826 | 8,94 |

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp44.641.844.358,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang.

Saldo Piutang Bukan Pajak bruto per Eselon I per 31 Desember 2012 sebesar Rp96.450.818.001,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Bukan Pajak di Setjen per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp66.292.680,00 dan Rp544.011.696,00 Jumlah Piutang Bukan Pajak (netto) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp65.961.217,00 dan Rp541.291.638,00 merupakan nilai Piutang Bukan Pajak yang dihitung setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Piutang Bukan Pajak.

2. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJP per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp6.708.240,00 dan Rp3.183.687.618,00. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat penyisihan piutang bukan pajak yang dikategorikan lancar karena diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun berikutnya.

| Uraian | 31 Des 2012 | 31 Des 2011 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------|
| Piutang PNBP | 6.708.240 | 3.183.687.618 | (3.176.979.378) | (99,79) |

3. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJBC per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp18.021.785.000,00 dan Rp25.004.513.000,00. Piutang PNBP pada DJBC pada umumnya disebabkan adanya fasilitas penundaan pembayaran pita cukai dimana PNBP atas penerimaan cukai tersebut juga dibayarkan bersamaan dengan pembayaran piutang cukai hasil tembakau. Selain itu juga disebabkan adanya fasilitas PNBP berkala kepada beberapa importir.

Daftar Kualitas Piutang PNBP pada DJBC per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

| kdkanwil | Kanwil | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Jumlah |
|---------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 002 | SUMUT | 134.910.000 | | | | 134.910.000 |
| 003 | RIAU SUMBAR | 13.760.000 | | | | 13.760.000 |
| 004 | KEP. RIAU | 1.140.000 | | | | 1.140.000 |
| 005 | SUMBAGSEL | 2.790.000 | | | | 2.790.000 |
| 006 | BANTEN | 53.400.000 | 558.500.000 | | | 611.900.000 |
| 007 | JAKARTA | 99.090.000 | 9.670.000 | 7.110.000 | 20.130.000 | 136.000.000 |
| 008 | JAWA BARAT | 94.200.000 | | | | 94.200.000 |
| 009 | JATENG & DIY | 41.340.000 | | | | 41.340.000 |
| 010 | JATIM 1 | 737.020.000 | 300.000 | | | 737.320.000 |
| 011 | JATIM 2 | 21.060.000 | | 300.000 | 330.000 | 21.690.000 |
| 013 | KALBAGBAR | 2.070.000 | | | | 2.070.000 |
| 014 | KALBAGTIM | 18.005.000 | | | | 18.005.000 |
| 017 | KPU BC PRIOK | | | | 16.206.660.000 | 16.206.660.000 |
| JUMLAH | | 1.218.785.000 | 568.470.000 | 7.410.000 | 16.227.120.000 | 18.021.785.000 |

4. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJPK per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp100.806.607,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak DJKN TA 2012 terdiri dari kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp3.106.377,00 dan belanja sewa mesin fotocopy sebesar Rp97.696.690,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada TA 2012.
5. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJPB per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp14.485.227.455,00 dan Rp138.308.846,00. Saldo per 31 Desember 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp14.346.918.609,00 atau 10.373,1 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Adapun posisi saldo Piutang Bukan Pajak di DJPB per wilayah adalah sebagai berikut:

| No | UAKPA/UAPPA-W | 31 Des 2012 | 31 Des 2011 |
|----|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Kantor Pusat | 432.568.132 | 86.384.844 |
| 2 | KSAP | - | - |
| 3 | SPAN | - | - |
| 4 | PPAKP | - | - |
| 5 | Kanwil DJPBN Prov NAD | 308.782.161 | - |
| 6 | Kanwil DJPBN Prov Sumut | 215.656.224 | 8.196.800 |
| 7 | Kanwil DJPBN Prov Sumbar | 174.018.875 | - |
| 8 | Kanwil DJPBN Prov Riau | 126.057.400 | - |
| 9 | Kanwil DJPBN Prov Jambi | 36.732.545 | 8.224.000 |
| 10 | Kanwil DJPBN Prov Sumsel | 90.937.850 | - |
| 11 | Kanwil DJPBN Prov Lampung | 23.680.230 | - |
| 12 | Kanwil DJPBN Prov Bengkulu | 90.025.000 | - |
| 13 | Kanwil DJPBN Prov Babel | 6.158.145 | - |
| 14 | Kanwil DJPBN Prov Banten | 35.362.925 | 504.900 |
| 15 | Kanwil DJPBN Prov DKI Jakarta | 6.863.476.370 | 2.803.200 |
| 16 | Kanwil DJPBN Prov Jabar | 874.071.320 | 152.000 |
| 17 | Kanwil DJPBN Prov Jateng | 753.981.353 | 17.958.100 |
| 18 | Kanwil DJPBN Prov DI Yogyakarta | 70.173.675 | - |
| 19 | Kanwil DJPBN Prov Jatim | 858.253.950 | 284.000 |
| 20 | Kanwil DJPBN Prov Kalbar | 303.694.575 | 341.632 |
| 21 | Kanwil DJPBN Prov Kalteng | 201.912.863 | - |
| 22 | Kanwil DJPBN Prov Kalsel | 349.784.688 | 240.000 |
| 23 | Kanwil DJPBN Prov Kaltim | 318.050.659 | - |
| 24 | Kanwil DJPBN Prov Bali | 69.700.150 | - |
| 25 | Kanwil DJPBN Prov NTB | 241.250.610 | 6.706.830 |
| 26 | Kanwil DJPBN Prov NTT | 114.359.850 | - |
| 27 | Kanwil DJPBN Prov Sulsel | 319.464.395 | 715.675 |
| 28 | Kanwil DJPBN Prov Sulteng | 192.178.800 | - |
| 29 | Kanwil DJPBN Prov Sultra | 198.344.474 | 180.000 |
| 30 | Kanwil DJPBN Prov Gorontalo | 139.304.660 | 771.856 |
| 31 | Kanwil DJPBN Prov Sulut | 212.975.400 | 1.352.640 |
| 32 | Kanwil DJPBN Prov Malut | 176.676.225 | 2.952.369 |
| 33 | Kanwil DJPBN Prov Maluku | 98.690.709 | - |
| 34 | Kanwil DJPBN Prov Papua | 588.903.242 | 540.000 |
| | JUMLAH | 14.485.227.455 | 138.308.846 |

- Saldo Piutang Bukan Pajak di DJKN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.252.903,00. Piutang Bukan Pajak DJKN TA 2011 merupakan kelebihan pembayaran uang makan yang telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada TA 2012.

7. Saldo Piutang Bukan Pajak di Bapepam LK per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp63.379.536.332,00 dan Rp56.508.964.892,00. Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK berasal dari Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun) serta piutang yang berasal dari Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp63.379.536.332,00, terdiri dari:

- 1) Piutang Denda di Bidang Pasar Modal sebesar Rp31.299.807.887,00 meliputi:
 - Piutang denda yang belum jatuh tempo sebesar Rp2.566.730.000,00.
 - Piutang denda yang sudah jatuh tempo, tetapi belum terbayar dan belum dilimpahkan ke DJKN sebesar Rp1.065.621.600,00, terdiri dari pokok sebesar Rp1.048.660.000,00 dan bunga sebesar Rp16.961.600,00
 - Piutang yang telah dilimpahkan ke DJKN sebesar Rp27.667.456.287,00 merupakan piutang dimana jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- 2) Piutang Denda di Bidang Perasuransian sebesar Rp11.760.017.265,00 merupakan piutang yang telah dilimpahkan ke DJKN (piutang dimana jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)).
- 3) Piutang Denda di Bidang Dana Pensiun sebesar Rp694.258.909,00 merupakan piutang yang telah dilimpahkan ke DJKN (piutang dimana jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)).
- 4) Piutang dari iuran badan usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp19.625.452.271,00. Pembayaran iuran tahunan ini akan dilakukan paling lambat tanggal 15 Januari 2013.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | 31-Des-12 | 31-Des-11 | Naik/(Turun) | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal | 31.299.807.887 | 28.676.057.338 | 2.623.750.549 | 9,15 |
| 2 | Piutang atas Denda di Bidang Perasuransian | 11.760.017.265 | 10.055.118.180 | 1.704.899.085 | 16,96 |
| 3 | Piutang atas Denda di Bidang Dana Pensiun | 694.258.909 | 720.658.909 | (26.400.000) | (3,66) |
| 4 | Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan | 19.625.452.271 | 17.057.130.465 | 2.568.321.806 | 15,06 |
| Jumlah | | 63.379.536.332 | 56.508.964.892 | 6.870.571.440 | 12,15 |

Berdasarkan tabel di atas, maka piutang bukan pajak Bapepam-LK per 31 Desember 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp6.870.571.440,00 atau 12,15 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2011. Adapun perubahan/mutasi tersebut berasal dari :

- a. Bidang Pasar Modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.750.549,00 atau 9,15 persen.
- b. Bidang Perasuransian mengalami kenaikan sebesar Rp1.704.899.085,00 atau 16,96 persen.
- c. Bidang Dana Pensiun mengalami penurunan sebesar Rp26.400.000,00 atau 3,66 persen.
- d. Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.568.321.806,00 atau 15,06 persen.

Perubahan/mutasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bidang Pasar Modal

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Saldo Awal (1 Januari 2012) | Rp 28.676.057.338 |
| 2. Penambahan (a+b) | Rp 21.160.323.200 |
| a. Tambahan Piutang Bidang Pasar Modal | Rp 21.160.323.200 |
| 3. Pengurangan (a+b) | Rp 18.536.572.651 |
| a. Pembayaran Piutang Bidang Pasar Modal | Rp 18.177.954.251 |
| b. Penyesuaian | Rp 358.618.400 |
| Saldo Akhir 31 Desember 2012 (1+2-3) | Rp 31.299.807.887 |

Adapun rincian atas penyesuaian tersebut sebesar Rp358.618.400,00 adalah sebagai berikut.

| | |
|--|-------------------------|
| A. Penambahan | Rp - |
| B. Pengurangan | Rp 358.618.400 |
| 1 Penyesuaian pembayaran a.n. PT. Capital Bridge Indonesia | Rp 400.000 |
| 2 Ralat denda PT Inovisi Intracom | Rp 2.000.000 |
| 3 Pembatalan Sanksi PT Ladang Ira Panen | Rp 100.000.000 |
| 4 Pembatalan Sanksi PT Diantala Bahana | Rp 74.400.000 |
| 5 Pembatalan Sanksi PT Gira Sole | Rp 74.400.000 |
| 6 Pembatalan Sanksi PT Lucasta Murni Cemerlang | Rp 64.200.000 |
| 7 Ralat Bunga PT Bank CIMB Niaga | Rp 25.400 |
| 8 Ralat Bunga PT Bank CIMB Niaga | Rp 17.000 |
| 9 Ralat Bunga PT Bank CIMB Niaga | Rp 8.000 |
| 10 Ralat denda a.n. Fofo Sariatmaja | Rp 20.600.000 |
| 11 Pembatalan Sanksi PT Indosetu Bara Resources Tbk | Rp 17.000.000 |
| 12 Ralat denda dan bunga a.n. PT Bank DBS Indonesia | Rp 324.000 |
| 13 Ralat bunga a.n. PT Bank OCBC NISP | Rp 5.000 |
| 14 Ralat denda dan bunga a.d. HSBC Bank | Rp 4.636.800 |
| 15 Ralat denda dan bunga a.n. PT Bank Permata | Rp 602.200 |
| Total (A-B) | Rp (358.618.400) |

b. Bidang Perasuransian

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Saldo Awal (1 Januari 2012) | Rp 10.055.118.180 |
| 2. Penambahan Piutang Bidang Perasuransian | Rp 2.100.670.000 |
| 3. Pengurangan (a+b) | Rp 395.770.915 |
| a. Pembayaran Piutang | Rp 395.770.915 |
| b. Pelimpahan Piutang ke DJKN | Rp - |
| 4 Penyesuaian | Rp - |
| Saldo Akhir 31 Desember 2012 (1+2-3+4) | Rp 11.760.017.265 |

c. Bidang Dana Pensiun

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Saldo Awal (1 Januari 2012) | Rp 720.658.909 |
| 2. Penambahan (a) | Rp 27.330.000 |
| a. Tambahan Piutang Bidang Dana Pensiun | Rp 27.330.000 |
| 3. Pengurangan (a+b+c) | Rp 53.730.000 |
| a. Pembayaran Piutang Bidang Dana Pensiun | Rp 53.484.000 |
| b Penyesuaian | Rp 246.000 |
| Saldo Akhir 31 Desember 2012 (1+2-3) | Rp 694.258.909 |

d. Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Saldo Awal (1 Januari 2012) | Rp 17.057.130.465 |
| 2. Penambahan (a) | Rp 71.968.852.582 |
| a. Tambahan Piutang SRO (iuran bulan April-Des 2012) | Rp 71.968.852.582 |
| 3. Pengurangan (a) | Rp 69.400.530.776 |
| a. Pembayaran Iuran SRO (Triwulan 4 tahun 2011 dan triwulan 1 s.d triwulan III tahun 2012) | Rp 69.400.530.776 |
| Saldo Akhir 31 Desember 2012 (1+2-3) | Rp 19.625.452.271 |

8. Piutang Bukan Pajak di BPPK per 31 Desember2012 dan 31 Desember 2011masing-masing sebesar Rp390.465.227,00 dan Rp463.406.097,00. Mutasi piutang PNBP dapat dilihat pada Tabel 69 berikut.

Tabel 69
Mutasi Piutang Bukan Pajak di BPPK
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

| Saldo per 31 Desember 2011 | Rp 463.406.097 |
|---|-----------------------|
| Mutasi tambah: | |
| - Kelebihan pembayaran uang makan Des 2012 | Rp 135.223.900 |
| - Piutang sewa tanah, gedung, dan bangunan | Rp 3.376.400 |
| - Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan PBJ | Rp 7.107.750 |
| - Piutang atas denda keterlambatan | Rp 1.023.000 |
| - Piutang dari Kelebihan Pembayaran Tunjangan | Rp 2.840.000 |
| - Piutang dari Penerimaan Kembali Uang Muka Gaji | Rp 4.720.240 |
| Mutasi kurang: | |
| - Pelunasan Uang Makan Tahun 2011 | Rp (114.577.000) |
| - Pelunasan Piutang Lainnya di Tahun 2012 | Rp (106.653.360) |
| - Overvalued Nilai Piutang per 31 Des 2011 | Rp (6.001.800) |
| Saldo per 31 Desember 2012 | Rp 390.465.227 |

Nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp390.465.227,00 diatas merupakan nilai bruto, Nilai Piutang Bukan Pajak neto adalah Rp151.119.064,00 setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp239.346.163,00. Rincian penyisihan piutang bukan pajak adalah sebagaimana Tabel 70 berikut.

**Tabel 70
Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak di BPPK
Per 31 Desember 2012**

(dalam rupiah)

| Uraian | Kualitas | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|-------------------|---------------|----------------|------------|--------------------|
| Sekretariat Badan | Lancar | 26.130.100,00 | 0,5% | 130.651 |
| | Macet | 7.219.940,00 | 100,00% | 7.219.940 |
| Pusdiklat AP | Lancar | 23.140.000,00 | 0,5% | 115.700 |
| Pusdiklat BC | Lancar | 4.221.450,00 | 0,5% | 21.107 |
| Pusdiklat PSDM | Lancar | 7.037.750,00 | 0,5% | 35.189 |
| Pusdiklat KNPK | Lancar | 11.231.150,00 | 0,5% | 56.156 |
| Pusdiklat KU | Lancar | 13.027.100,00 | 0,5% | 65.136 |
| Pusdiklat Pajak | Lancar | 19.689.000,00 | 0,5% | 98.445 |
| STAN | Lancar | 8.684.000,00 | 0,5% | 43.420 |
| BDK Medan | Lancar | 1.184.000,00 | 0,5% | 5.920 |
| BDK Palembang | Lancar | 5.729.250,00 | 0,5% | 28.646 |
| BDK Pekanbaru | Lancar | 1.432.800,00 | 0,5% | 7.164 |
| BDK Cimahi | Lancar | 9.002.750,00 | 0,5% | 45.014 |
| BDK Yogyakarta | Lancar | - | 0,5% | - |
| BDPim Magelang | Lancar | - | 0,5% | - |
| BDK Malang | Lancar | 5.878.490,00 | 0,5% | 29.392 |
| BDK Denpasar | Lancar | 2.342.700,00 | 0,5% | 11.714 |
| BDK Makasar | Lancar | 1.794.000,00 | 0,5% | 8.970 |
| | Kurang Lancar | 2.900.000,00 | 10,00% | 290.000 |
| BDK Manado | Lancar | 3.888.350,00 | 0,5% | 19.442 |
| | Macet | 231.080.397,00 | 100,00% | 231.080.397 |
| BDK Pontianak | Lancar | 1.579.000,00 | 0,5% | 7.895 |
| | Kurang Lancar | 100.000,00 | 10,00% | 10.000 |
| BDK Balikpapan | Lancar | 3.173.000,00 | 0,5% | 15.865 |
| Jumlah | | | | 239.346.163 |

C.1.10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp51.808.973.643,00** dan **Rp44.869.379.520,00**.

Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Kualitas Piutang per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 71 berikut.

Tabel 71
Rincian Penyisihan Piutang PNBP Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | (331.463) | (2.720.058) | 2.388.595 | (87,81) |
| DJP | (33.451) | (15.918.438) | 15.884.987 | (99,79) |
| DJBC | (10.231.029.925) | (5.346.063.540) | (4.884.966.385) | 91,38 |
| DJPK | (504.015) | - | (504.015) | - |
| DJPB | (72.426.154) | (691.544) | (71.734.610) | 10.373,11 |
| DJKN | - | (31.264) | 31.264 | (100,00) |
| BAPEPAM-LK | (41.265.302.472) | (39.266.644.579) | (1.998.657.893) | 5,09 |
| BPPK | (239.346.163) | (237.310.097) | (2.036.066) | 0,86 |
| JUMLAH | (51.808.973.643) | (44.869.379.520) | (6.939.594.123) | 15,47 |

C.1.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Bagian Lancar TGR
Rp9.625.650.721,00*

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp9.625.650.721,00** dan **Rp9.874.029.786,00**. Saldo per 31 Desember 2012 merupakan saldo Tagihan TGR Kementerian Keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca (sampai dengan 31 Desember 2012) dengan memperhitungkan penyisihan nilai piutang.

Posisi Bagian Lancar TGR bruto per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 72 berikut

Tabel 72
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bruto Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 1.813.534.683 | 1.902.459.183 | (88.924.500) | (4,67) |
| ITJEN | 38.622.100 | 47.022.100 | (8.400.000) | (17,86) |
| DJP | 570.740.541 | 654.527.261 | (83.786.720) | (12,80) |
| DJBC | 3.950.057.583 | 3.940.212.411 | 9.845.172 | 0,25 |
| DJPK | - | 12.000.000 | (12.000.000) | (100,00) |
| DJPB | 2.149.670.048 | 2.242.691.993 | (93.021.945) | (4,15) |
| DJKN | 11.519.600 | 7.200.000 | 4.319.600 | 59,99 |
| BAPEPAM-LK | 79.983.182 | 80.165.000 | (181.818) | (0,23) |
| BPPK | 1.011.522.984 | 987.751.838 | 23.771.146 | 2,41 |
| JUMLAH | 9.625.650.721 | 9.874.029.786 | (248.379.065) | (2,52) |

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 sebesar **Rp9.625.650.721,00** merupakan nilai bruto, adapun nilai neto setelah dilakukan penyisihan Bagian lancar TGR adalah sebesar **Rp210.976.023,00**.

C.1.12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar TGR
Rp9.414.674.698,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar sebesar Rp9.414.674.698,00 dan Rp9.478.786.128,00.

Adapun rincian nilai bruto dan penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilihat pada Tabel 73 berikut.

Tabel 73
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I
Per 31 Desember 2012

| Eselon I | Nilai Bruto | Penyisihan | Nilai Neto (dalam rupiah) |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| SETJEN | 1.813.534.683 | (1.809.977.061) | 3.557.622 |
| ITJEN | 38.622.100 | (38.025.100) | 597.000 |
| DJP | 570.740.541 | (520.879.683) | 49.860.858 |
| DJBC | 3.950.057.583 | (3.820.321.518) | 129.736.065 |
| DJPB | 2.149.670.048 | (2.133.907.572) | 15.762.476 |
| DJKN | 11.519.600 | (57.598) | 11.462.002 |
| BAPEPAM-LK | 79.983.182 | (79.983.182) | - |
| BPPK | 1.011.522.984 | (1.011.522.984) | - |
| JUMLAH | 9.625.650.721 | (9.414.674.698) | 210.976.023 |

C.1.13. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

*Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp20.520.519.164,00*

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp20.520.519.164,00 dan Rp14.938.119.944,00.

Posisi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU bruto yang diperkirakan dapat direalisasikan per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 74 berikut

Tabel 74
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Bruto Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) (dalam rupiah) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 16.576.174.712 | 11.451.919.944 | 5.124.254.768 | 44,75 |
| BPPK | 3.944.344.452 | 3.486.200.000 | 458.144.452 | 13,14 |
| JUMLAH | 20.520.519.164 | 14.938.119.944 | 5.582.399.220 | 37,37 |

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2012 sebesar Rp20.520.519.164,00 merupakan nilai bruto, adapun nilai neto setelah dilakukan penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebesar Rp20.408.376.193,00.

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.576.174.712,00. Nilai tersebut merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Operasional PIP berupa investasi jangka panjang. Investasi yang dilakukan berupa investasi langsung maupun

investasi dalam bentuk Surat Berharga menghasilkan piutang yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun anggaran. Nilai sebesar Rp16.576.174.712,00 merupakan piutang yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2012.

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2012 merupakan piutang penerimaan bukan pajak dari Kegiatan Operasional BLU STAN sebesar Rp3.943.344.452,00.

C.1.14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp112.142.971,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp112.142.971,00 dan Rp95.448.100,00.

Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 75 berikut.

Tabel 75
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Eselon I | Nilai Bruto | Penyisihan | Nilai Neto |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SETJEN | 16.576.174.712 | (82.880.874) | 16.493.293.838 |
| BPPK | 3.944.344.452 | (29.262.097) | 3.915.082.355 |
| JUMLAH | 20.520.519.164 | (112.142.971) | 20.408.376.193 |

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 76 berikut.

Tabel 76
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Setjen-PIP
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Nama Mitra | Uraian | | | Penyisihan Piutang |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Fee | Bunga | Denda | |
| 1. Pemprov Sulawesi Tenggara | | | | |
| a. RSUD | | Rp 6,525,118,350 | | Rp 32,625,591,75 |
| b. Jalan dan Jembatan | | Rp 57,877,255 | | Rp 289,386,28 |
| 2. Pemkot Surakarta | | Rp 23,423,864 | | Rp 117,119,32 |
| 3. Pemkab Muko-Muko | | Rp 111,550,184 | | Rp 557,750,92 |
| 4. Pemkab. Karangasem | | Rp 44,342,592 | | Rp 221,712,96 |
| 5. Pemkab Lombok Timur | | Rp 32,937,651 | Rp 300 | Rp 164,689,76 |
| 6. Pemkot Bandar Lampung | | Rp 255,924,516 | | Rp 1,279,622,58 |
| 7. Pemkot Palu | Rp 1,500,000,000 | | | Rp 7,500,000,00 |
| 8. Pemkot Gorontalo | Rp 525,000,000 | | | Rp 2,625,000,00 |
| 9. Pemprov Sulawesi Selatan | Rp 7,500,000,000 | | | Rp 37,500,000,00 |
| Jumlah | Rp 9,525,000,000 | Rp 7,051,174,412 | Rp 300 | |
| Jumlah Piutang | Rp | | 16,576,174,712 | Rp 82,880,874 |

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 77 dan Tabel 78 berikut.

Tabel 77
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| No. | Debitur | Jumlah |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi | Rp 206.425.000,00 |
| 2 | Pendapatan Hasil kerjasama lembaga / Badan Usaha | Rp 45.000.000,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil kerjasama Pemerintah Daerah | Rp 3.677.440.000,00 |
| 4 | Pendapatan jasa layanan perbankan | Rp 15.479.452,00 |
| | Jumlah | Rp 3.944.344.452,00 |

Tabel 78
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN
Per 31 Desember 2012

| Uraian | Kualitas | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|--|---------------|----------------------|------------|-------------------|
| Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan | lancar | 151.000.000 | 0,50% | 755.000 |
| | kurang lancar | 55.425.000 | 10,00% | 5.542.500 |
| Pendapatan Hasil kerjasama lembaga / Badan Usaha | kurang lancar | 45.000.000 | 10,00% | 4.500.000 |
| Pendapatan Hasil kerjasama Pemerintah Daerah | lancar | 3.677.440.000 | 0,50% | 18.387.200 |
| Pendapatan jasa layanan perbankan | lancar | 15.479.452 | 0,50% | 77.397 |
| Total | | 3.944.344.452 | | 29.262.097 |

C.1.15. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

*Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Rp32.766.356.150,00*

Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU bruto yang diperkirakan terealisasi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp32.766.356.150,00 dan Rp22.027.746.408,00.

Posisi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU bruto yang diperkirakan terealisasi per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 disajikan pada Tabel 79 berikut.

Tabel 79
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Bruto Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 31.771.667.295 | 21.573.963.222 | 10.197.704.073 | 47,27 |
| BPPK | 994.688.855 | 453.783.186 | 540.905.669 | 119,20 |
| JUMLAH | 32.766.356.150 | 22.027.746.408 | 10.738.609.742 | 48,75 |

Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2012 sebesar Rp32.766.356.150,00 merupakan nilai bruto adapun nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang adalah sebesar Rp32.133.263.900,00.

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2012 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional PIP sebesar **Rp31.771.667.295,00**. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sehingga memiliki penyisihan dengan kategori lancar (5 permil). Piutang tersebut berasal dari kekurangan setor bunga deposito yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2011 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional PIP sebesar **Rp21.466.093.406,00**.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di SETJEN-PIP per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 80 dan Tabel 81 berikut.

Tabel 80
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP
berupa Bunga Akrual Deposito
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Kode akun | Uraian | Jumlah | Rupiah |
|-----------|--|--------|----------------|
| 11391 | Bunga Deposito Bank BRI - 27 bilyet | Rp | 16.531.502.055 |
| | Bunga Deposito Bank Mandiri - 9 bilyet | Rp | 4.316.280.822 |
| | Bunga Deposito Bank BTN - 13 bilyet | Rp | 1.883.013.499 |
| | Bunga Deposito Bank Bukopin - 12 bilyet | Rp | 2.170.890.411 |
| | Bunga Deposito Bank BJB Syariah - 2 bilyet | Rp | 200.136.986 |
| | Bunga Deposito Bank Sumut - 3 bilyet | Rp | 684.895.833 |
| | Bunga Deposito Bank Sulut - 1 bilyet | Rp | 123.287.671 |
| | Bunga Deposito Bank Muamalat - 6 bilyet | Rp | 727.917.808 |
| | Bunga Deposito Bank Syariah Bukopin - 4 bilyet | Rp | 302.931.507 |
| | Bunga Deposito Bank BRI Syariah - 4 bilyet | Rp | 283.493.151 |
| | Jumlah | Rp | 27.224.349.943 |

Tabel 81
Rincian Piutang Dari
Selain Bunga Akrual Deposito
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Kode akun | Uraian | Jumlah | Rupiah |
|-----------|-----------------------------|--------|---------------|
| 11391 | Bunga Deposito Bank Mandiri | Rp | 2.130.650.685 |
| | Bunga Deposito Bank Sumut | Rp | 2.416.666.667 |
| | Jumlah | Rp | 4.547.317.352 |

Nilai Bruto Piutang dari Kegiatan Non Operasional pada Eselon I BPPK per 31 Desember 2012 sebesar **Rp994.688.855,00** merupakan Piutang Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional BLU STAN. Piutang tersebut berasal dari perkiraan ketidaktertagihan piutang atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2011 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional STAN sebesar **Rp453.783.186,00** yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU
Rp633.092.250,00*

C.1.16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp633.092.250,00 dan Rp553.181.649,00.

Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 82 berikut.

Tabel 82
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2012

| Eselon I | Nilai Bruto | Penyisihan | Nilai Neto |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SETJEN | 31.771.667.295 | (158.858.336) | 31.612.808.959 |
| BPPK | 994.688.855 | (474.233.914) | 520.454.941 |
| JUMLAH | 32.766.356.150 | (633.092.250) | 32.133.263.900 |

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Rincian | Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (5/1000) | Saldo Bagian Lancar TGR (Netto) |
|---------|---|---|------------------------------------|
| PIP | 31.771.667.295 | 158.858.336 | 31.612.808.959 |

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di BPPK-STAN per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 83 berikut.

Tabel 83
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-STAN
Per 31 Desember 2012

| Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|--|---------------|--------------------|------------|--------------------|
| PT Sarana Karya Jasa (sudah dilimpahkan ke DJKN) | Macet | 286.664.703 | 100,00% | 286.664.703 |
| Desada Theamada | Lancar | 2.774.772 | 0,50% | 13.874 |
| PT Karya Cipta Mandiri Se | Lancar | 479.715.470 | 0,50% | 2.398.577 |
| Asuransi Jasindo | Kurang Lancar | 44.863.500 | 10,00% | 4.486.350 |
| PT Nugraha Adi Taruna | Macet | 180.670.410 | 100,00% | 180.670.410 |
| Total | | 814.018.445 | | 474.233.914 |

C.1.17. Persediaan

*Persediaan
Rp284.672.873.440,00*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp284.672.873.440,00** dan **Rp282.731.013.941,00**. Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan Akuntansi Persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Posisi Persediaan per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 84 berikut.

Tabel 84
Persediaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 4.243.288.524 | 3.964.923.629 | 278.364.895 | 7,02 |
| ITJEN | 728.412.186 | 566.024.806 | 162.387.380 | 28,69 |
| DJA | 842.657.415 | 863.820.154 | (21.162.739) | (2,45) |
| DJP | 180.039.374.560 | 184.170.135.826 | (4.130.761.266) | (2,24) |
| DJBC | 66.905.917.117 | 61.001.391.665 | 5.904.525.452 | 9,68 |
| DJPK | 1.124.302.813 | 502.722.419 | 621.580.394 | 123,64 |
| DJPU | 2.386.784.473 | 1.248.899.154 | 1.137.885.319 | 91,11 |
| DJPB | 19.649.686.572 | 21.271.969.657 | (1.622.283.085) | (7,63) |
| DJKN | 5.366.720.077 | 5.231.507.835 | 135.212.242 | 2,58 |
| BAPEPAM-LK | 619.888.330 | 968.660.948 | (348.772.618) | (36,01) |
| BPPK | 1.827.050.501 | 2.137.225.952 | (310.175.451) | (14,51) |
| BKF | 938.790.872 | 803.731.896 | 135.058.976 | 16,80 |
| JUMLAH | 284.672.873.440 | 282.731.013.941 | 1.941.859.499 | 0,69 |

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2012 per jenis persediaan dapat dilihat pada Tabel 85 berikut.

Tabel 85
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Kode Akun | Uraian | 31 Desember 2012 |
|-----------|--|------------------------|
| 115111 | Barang konsumsi | 177.471.748.400 |
| 115112 | Amunisi | 1.367.687.832 |
| 115113 | Bahan untuk pemeliharaan | 12.136.261.906 |
| 115114 | Suku cadang | 15.972.027.346 |
| 115121 | Pita cukai, materai dan leges | 55.878.349.038 |
| 115124 | Peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan masyarakat | 459.757.580 |
| 115127 | Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat | 2.045.000 |
| 115128 | Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat | 15.941.807.424 |
| 115131 | Bahan baku | 2.926.192.395 |
| 115191 | Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga | 79.942.465 |
| 115199 | Persediaan lainnya | 2.437.054.054 |
| | JUMLAH | 284.672.873.440 |

Dari nilai persediaan sebesar Rp284.672.873.440,00, terdapat beberapa persediaan yang sudah kadaluwarsa, usang atau dalam kondisi rusak yang tidak termasuk dalam nilai persediaan tersebut. Nilai persediaan tersebut terdiri dari :

- a. Persediaan berupa stiker lunas PPN pada DJP yang merupakan desain lama sebanyak 8.826.130 buah dengan nilai persediaan sebesar Rp159.926.678,00
- b. Persediaan berupa meterai tempel desain 2005 pada DJP sebanyak 602.435 keping untuk kopur Rp3.000,00 dan 233.001 keping untuk kopur Rp6.000,00 dengan nilai pengadaan Rp159,00 per kopur senilai Rp132.834.324,00
- c. Persediaan berupa toner dan alat tulis kantor (ATK) yang sudah rusak atau using pada DJP, ATK sebanyak 12.504 buah senilai Rp113.352.200,00 dan toner sebanyak 620 buah senilai Rp349.879.073,00.

C.1.18. Persediaan BLU

Persediaan BLU
Rp913.269.070,00

Nilai Persediaan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp913.269.070,00** dan **Rp1.107.526.185,00**. Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja BLU lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan akuntansi persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Posisi Persediaan BLU per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 86 berikut.

Tabel 86
Persediaan BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Rupiah | % |
| SETJEN | 40.662.037 | 27.660.665 | 13.001.372 | 47,00 |
| BPPK | 872.607.033 | 1.079.865.520 | (207.258.487) | (19,19) |
| JUMLAH | 913.269.070 | 1.107.526.185 | (194.257.115) | (17,54) |

ASET TETAP

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp39.244.462.867,2
45,00

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing–masing sebesar Rp39.244.462.867,245,00 dan Rp37.731.845.000.870,00.

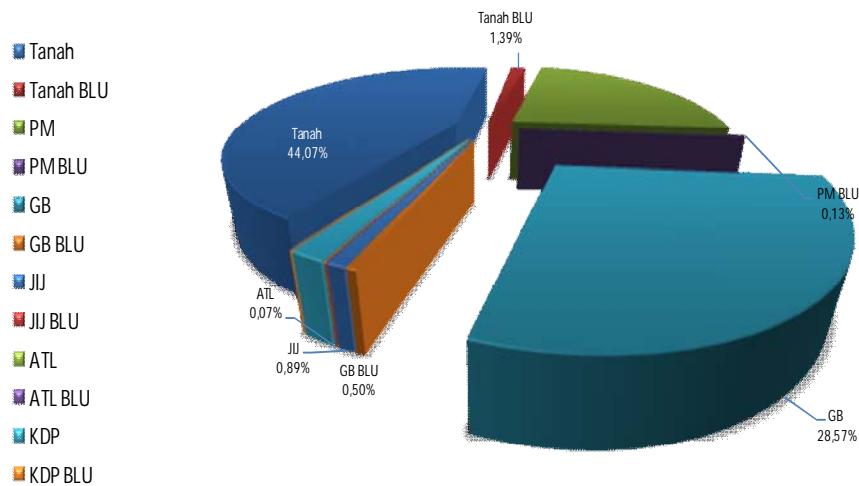
Adapun rincian Aset Tetap menurut jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 87 berikut.

Tabel 87
Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | (dalam rupiah) | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | Kenaikan (Penurunan) Rp | % |
| Tanah | 17.296.534.823,816 | 17.210.633.268,536 | 85.901.555.280 | 0,00 |
| Tanah BLU | 545.192.062,827 | 545.192.062,827 | 0 | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin | 8.849.450.471,389 | 8.021.195.465,644 | 828.255.005,745 | 0,10 |
| Peralatan dan Mesin BLU | 51.293.956,632 | 43.188.928,397 | 8.105.028,235 | 0,19 |
| Gedung dan Bangunan | 11.211.918.159,435 | 10.635.543.677,167 | 576.374.482,268 | 0,05 |
| Gedung dan Bangunan BLU | 196.710.647,484 | 194.255.849,179 | 2.454.798,305 | 0,01 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 348.573.649,280 | 332.477.687,395 | 16.095.961,885 | 0,05 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU | 18.437.121,332 | 18.437.121,332 | 0 | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 26.339.299,995 | 21.169.879,443 | 5.169.420,552 | 0,24 |
| Aset Tetap Lainnya BLU | 11.807.907,831 | 11.467.292,040 | 340.615,791 | 0,03 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 677.317.480,494 | 698.283.768,910 | (20.966.288,416) | (0,03) |
| KDP BLU | 10.887.286,730 | 0 | 10.887.286,730 | 0,00 |
| Jumlah | 39.244.462.867,245 | 37.731.845.000,870 | 1.533.672.221,654 | 4,06 |

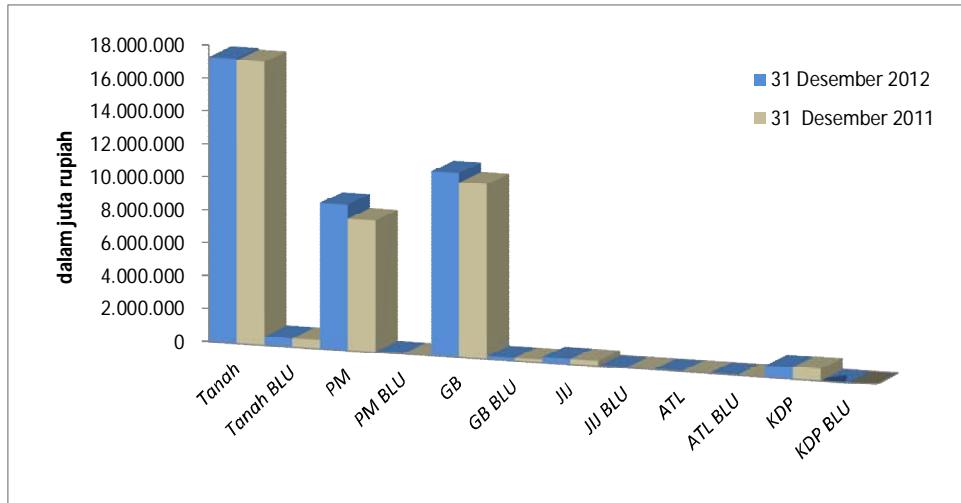
Komposisi Aset Tetap menurut Jenis Aset per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Grafik 19 berikut

Grafik 19
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2012



Perkembangan Aset Tetap per jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Grafik 20 berikut.

Grafik 20
Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap



Mutasi Aset Tetap selain Aset Tetap BLU Kementerian Keuangan selama periode TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 88 berikut.

Tabel 88
Mutasi/Perubahan Aset Tetap
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN TRN | | Uraian |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | | 37.731.845.000.870 |
| | Koreksi SAK | 20.236.317 |
| | Reklasifikasi BLU Periode Sebelumnya | 812.541.253.775 |
| | Aset yang dihentikan BLU | -62.258.000 |
| SALDO AWAL (SIMAK BMN) | | 38.544.344.232.962 |
| MUTASI TAMBAH : | | |
| 100 | Penambahan Saldo Awal | 103.308.620.121 |
| 101 | Pembelian | 705.253.264.965 |
| 102 | Transfer Masuk | 811.635.639.818 |
| 103 | Hibah (Masuk) | 2.748.061.271 |
| 104 | Rampasan | 920.215.400 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 596.817.105.045 |
| 106 | Pembatalan Penghapusan | 264.698.000 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 2.420.704.832.956 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 13.501.096.129 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | 4.165.269.748 |
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T | 24.321.632.892 |
| 199 | Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks | 5.789.532.913 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset | 60.252.581.549 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | 66.187.961.787 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | 119.602.656.131 |
| 206 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 67.522.158.097 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 232.402.005.106 |
| | Mutasi Tambah KDP | 846.224.962.703 |
| | Jumlah Mutasi Tambah | 6.081.622.294.631 |
| MUTASI KURANG : | | |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | -133.595.283.786 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | -45.439.598.653 |
| 301 | Penghapusan | -88.163.388.081 |
| 302 | Transfer Keluar | -799.701.277.083 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | -2.400.085.682.927 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | -23.154.348.050 |
| 399 | Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Intra ke ekstra | -1.599.449.057 |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | -210.018.972.216 |
| | Mutasi kurang KDP | -845.416.677.659 |
| | Jumlah Mutasi Kurang | -4.547.174.677.512 |
| SALDO AKHIR (SIMAK BMN) | | 40.078.791.850.081 |
| | Reklasifikasi BLU | -834.328.982.836 |
| | SALDO AKHIR (SAK) | 39.244.462.867.245 |

Rincian mutasi aset dari belanja modal dapat dilihat pada Tabel 89 berikut.

Tabel 89
Rincian Belanja Modal
Sampai dengan 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| MAK | URAIAN | JUMLAH |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 5311 | Belanja Modal Tanah | 11.905.150.600 |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 848.335.043.486 |
| 5331 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 710.862.344.644 |
| 5341 | Belanja Modal Jalan dan jembatan | 3.961.122.061 |
| 5342 | Belanja Modal irigasi | - |
| 5343 | Belanja Modal Jaringan | - |
| 5361 | Belanja Modal Lainnya | 57.994.367.946 |
| 5371 | Belanja Modal BLU | 2.796.408.925 |

Posisi saldo awal aset tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 90 berikut.

Tabel 90
Perbandingan Saldo Awal Aset Tetap
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012

| Uraian | SIMAK | SAK | Selisih |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tanah | 17,755,825,331,363 | 17,210,633,268,536 | 545,192,062,827 |
| Tanah BLU | 0 | 545,192,062,827 | (545,192,062,827) |
| Peralatan dan Mesin | 8,064,384,394,041 | 8,021,195,465,644 | 43,188,928,397 |
| Peralatan dan Mesin BLU | 0 | 43,188,928,397 | (43,188,928,397) |
| Gedung dan Bangunan | 10,737,179,222,226 | 10,635,543,677,165 | 101,635,545,061 |
| Gedung dan Bangunan BLU | 0 | 194,255,849,179 | (194,255,849,179) |
| Jalan dan Jembatan | 192,327,764,014 | 181,212,780,653 | 11,114,983,361 |
| Irigasi | 45,639,342,276 | 43,403,172,596 | 2,236,169,680 |
| Jaringan | 112,947,702,437 | 107,861,734,146 | 5,085,968,291 |
| Jalan Irigasi dan Jaringan BLU | 0 | 18,437,121,332 | (18,437,121,332) |
| Aset Tetap dalam Renovasi | 96,300,665,435 | 89,810,000 | 96,210,855,435 |
| Aset Tetap Lainnya | 28,945,917,483 | 21,080,069,443 | 7,865,848,040 |
| Aset Tetap Lainnya BLU | 0 | 11,467,292,040 | (11,467,292,040) |
| Konstruksi Dalam pengerjaan | 698,283,768,910 | 698,283,768,910 | 0 |
| KDP BLU | 0 | 0 | 0 |

Penjelasan selisih aset tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

1. Selisih kurang Tanah sebesar **Rp545.192.062.827,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK, Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).
2. Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp43.188.928.397,00** terdiri dari merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Peralatan dan Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
3. Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp101.635.545.059,00** terdiri dari:
 - Selisih kurang sebesar **Rp194.255.849.179,00** merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan Gedung dan Bangunan BLU.
 - Selisih kurang sebesar **Rp14.646.317,00** adalah Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen (lapangan tenis) pada Pusdiklat Keuangan Umum yang sudah direkonstruksi namun masih menunggu SK penghapusan.
 - Selisih kurang sebesar **Rp5.590.000,00** adalah nilai denda atas instalasi listrik pada KPPBC Selat Panjang. Nilai tersebut pada SAK telah dikurangkan dan nilai dendanya telah diakui sebagai piutang, sedangkan pada SIMAK nilai tersebut akan dikurangkan pada saat denda dibayar sesuai rekomendasi BPK.
 - Selisih tambah sebesar **Rp92.640.540.435,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang pada SAK Kementerian direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan, sedangkan pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.

4. Selisih kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp18.437.121.332,00** merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Jalan, Irigasi, dan Jaringan diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kelompok akun 1317) dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU (kode akun 135411).
5. Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp7.865.848.040,00** terdiri atas :
 - Selisih kurang sebesar **Rp7.865.848.040,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU. Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Tanah diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511)
 - Selisih pada Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511) sebesar **Rp11.467.292.040,00** antara lain terdiri dari Aset BLU sebesar **Rp7.865.848.040,00** yang diklasifikasikan ke Aset Tetap Lainnya, Aset BLU sebesar **Rp31.129.000,00** yang diklasifikasikan pada Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (kode akun 154112) dan Aset BLU sebesar **Rp3.570.315.000** yang diklasifikasikan pada Aset Tetap dalam Renovasi (kode akun 131911).

Posisi aset tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

Tabel 91
Perbandingan Posisi Aset Tetap
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2012

| Uraian | SAK | SIMAK | (dalam rupiah) Selisih |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Tanah | 17.296.534.823.816 | 17.841.726.886.643 | (545.192.062.827) |
| Tanah BLU | 545.192.062.827 | 0 | 545.192.062.827 |
| Peralatan dan Mesin | 8.849.450.471.389 | 8.900.744.428.021 | (51.293.956.632) |
| Peralatan dan Mesin BLU | 51.293.956.632 | 0 | 51.293.956.632 |
| Gedung dan Bangunan | 11.211.918.159.435 | 11.321.182.345.283 | (109.264.185.848) |
| Gedung dan Bangunan BLU | 196.710.647.484 | 0 | 196.710.647.484 |
| Jalan dan Jembatan | 188.835.578.812 | 199.950.562.173 | (11.114.983.361) |
| Irigasi | 38.471.716.958 | 40.707.886.638 | (2.236.169.680) |
| Jaringan | 121.266.353.510 | 126.352.321.801 | (5.085.968.291) |
| Jalan Irigasi dan Jaringan BLU | 18.437.121.332 | 0 | 18.437.121.332 |
| Aset Tetap dalam Renovasi | 5.779.374.000 | 106.697.255.736 | (100.917.881.736) |
| Aset Tetap Lainnya | 20.559.925.995 | 28.797.518.826 | (8.237.592.831) |
| Aset Tetap Lainnya BLU | 11.807.907.831 | 0 | 11.807.907.831 |
| Konstruksi Dalam pengerjaan | 677.317.480.494 | 688.204.767.224 | (10.887.286.730) |
| KDP BLU | 10.887.286.730 | 0 | 10.887.286.730 |

Penjelasan selisih aset tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

1. Selisih kurang Tanah sebesar **Rp545.192.062.827,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK, Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).

2. Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp51.293.956.632,00** merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Peralatan dan Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
3. Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp109.264.185.848,00** terdiri dari:
 - Selisih kurang sebesar Rp196.710.647.484,00 merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan Gedung dan Bangunan BLU.
 - Selisih lebih sebesar **Rp87.446.461.636,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang pada SAK Kementerian direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan, sedangkan pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.
4. Selisih kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp18.437.121.332,00** merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Jalan, Irigasi, dan Jaringan diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kelompok akun 1317) dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU (kode akun 135411).
5. Selisih kurang Aset Tetap Renovasi **Rp100.917.881.736,00** dan Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp8.237.592.831,00** terdiri atas:
 - Selisih lebih sebesar **Rp87.446.461.636,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang pada SAK Kementerian direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan, sedangkan pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi
 - Aset Tetap Renovasi yang dimiliki BLU sebesar **Rp3.570.315.000** yang diklasifikasikan pada SAK menjadi Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511)
 - Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp8.237.592.831,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511). Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Tanah diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511).

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp17.296.534.823,8
16,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp17.296.534.823,816,00** dan **Rp17.210.633.268.536,00**. Terdapat peningkatan nilai aset tanah pada TA 2012 sebesar **Rp85.901.555.280,00** atau **0,50 persen**.

Perbandingan rincian nilai Tanah yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 92 berikut.

Tabel 92
Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 5.393.010.958.623 | 5.310.790.595.138 | 82.220.363.485 | 1,55 |
| 02 | ITJEN | 8.183.833.948 | 8.183.833.948 | 0 | 0,00 |
| 03 | DJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 | DJP | 6.053.832.477.708 | 6.014.980.591.166 | 38.851.886.542 | 0,65 |
| 05 | DJBC | 2.925.383.710.153 | 2.874.333.716.251 | 51.049.993.902 | 1,78 |
| 06 | DJPK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 | DJPU | 89.500.950.000 | 89.500.950.000 | 0 | 0,00 |
| 08 | DJPB | 2.104.657.852.206 | 2.088.140.787.498 | 16.517.064.708 | 0,79 |
| 09 | DJKN | 249.012.953.712 | 244.585.425.022 | 4.427.528.690 | 1,81 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 0 | 99.961.416.247 | (99.961.416.247) | -100,00 |
| 11 | BPPK | 471.828.087.466 | 479.031.953.266 | (7.203.865.800) | -1,50 |
| 12 | BKF | 1.124.000.000 | 1.124.000.000 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 17.296.534.823.816 | 17.210.633.268.536 | 85.901.555.280 | 0,50 |

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 93 berikut.

Tabel 93
Mutasi/Perubahan Tanah
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Uraian Transaksi | Jumlah |
|--|----------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | 17.210.633.268.536 |
| Reklasifikasi BLU TAYL | 545.192.062.827 |
| SALDO AWAL (SIMAK BMN) | 17.755.825.331.363 |
| MUTASI TAMBAH : | |
| Penambahan Saldo Awal | 22.962.459.869 |
| Pembelian | 8.792.840.000 |
| Transfer Masuk | 219.762.535.213 |
| Reklasifikasi Masuk | 1.534.391.127.150 |
| Perolehan Lainnya | 10.939.762.229 |
| Pengembangan Nilai Aset | 1.381.914.834 |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | 23.523.818.851 |
| Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | 78.981.527.987 |
| Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 32.573.900 |
| Pengembangan Melalui KDP | 2.332.023.553 |
| Jumlah Mutasi Tambah | 1.903.100.583.586 |
| MUTASI KURANG : | |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | (62.080.195.809) |
| Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | (16.976.301.455) |
| Transfer Keluar | (196.263.486.523) |
| Reklasifikasi Keluar | (1.520.631.770.909) |
| Koreksi Pencatatan | (12.610.648.610) |
| Penghentian Aset Dari Penggunaan | (8.636.625.000) |
| Jumlah Mutasi Kurang | (1.817.199.028.306) |
| SALDO AKHIR (SIMAK BMN) | 17.841.726.886.643 |
| Reklasifikasi BLU | (545.192.062.827) |
| SALDO AKHIR (SAK) | 17.296.534.823.816 |

Adapun rincian mutasi Tanah dari belanja modal pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 94 berikut.

Tabel 94
Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| BELANJA ASSET TANAH : | | |
|--|----------------------|----------------|
| 531 | Belanja Modal Tanah | 11.905.150.600 |
| MUTASI : | | |
| Pembelian | 5.460.787.273 | - |
| Penyelesaian pembangunan langsung | - | - |
| Pengembangan langsung | 725.148.545 | - |
| Perolehan KDP | 247.494.100 | - |
| Pengembangan KDP | 2.625.281.300 | - |
| TOTAL MUTASI ASSET | 9.058.711.218 | - |
| SELISIH | 2.846.439.382 | - |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| BM Tanah untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain | 3.178.557.032 | - |
| Perolehan/Pengembangan Tanah dari BM lain | (332.117.650) | - |
| Perolehan/Pengembangan Tanah dari Bel Barang/Bel pegawai | - | - |
| Kurang/ lebih kapitalisasi | (460.000) | - |
| Selisih SPM Sakpa-Simak (Koreksi Nilai Karena Pengembalian BM) | 460.000 | - |

Telah dibentuk Tim Internal Penyelesaian Aset Berupa Tanah di Kelapa Dua dan Jati Rawamangun yang terdiri dari unsur Pejabat/Pegawai DJBC, Setjen dan Itjen Kemenkeu dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 55/BC/2013 tanggal 30 April 2013. Salinan AJB Tanah Jati Rawamangun telah berhasil didapatkan, selanjutnya akan dilakukan penentuan batas-batas lokasi tanah tersebut, sedangkan untuk tanah di Kelapa Dua masih dalam proses penelusuran dokumen melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap kedua tanah tersebut telah direklasifikasi ke akun aset lainnya

Luas tanah yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan senilai Rp17.296.534.823.816,00 berdasarkan Aplikasi SIMAK BMN UAPB adalah 10.238.582 M2. Dari luas tanah tersebut seluas 1.852.144 M2 pada 803 satuan kerja belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Keuangan bersama Badan Pertanahan Nasional telah bekerjasama untuk menyelesaikan masalah persertifikatan tanah ini dengan membuat *Memorandum of Understanding* dengan nomor MOU-7/MK.01/2012 mengenai Persertifikatan Tanah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rincian tanah dalam proses pensertifikatan dapat dilihat pada Lampiran LK BA 015.

C.2.2. Tanah BLU

Tanah BLU
Rp545.192.062.827,00

Nilai Tanah BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp545.192.062.827,00** dan **Rp545.192.062.827,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Tanah BLU STAN pada BPPK. Tidak terdapat penambahan/penurunan nilai aset Tanah BLU pada TA 2012.

Perbandingan rincian Tanah BLU yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 95 berikut.

Tabel 95
Aset Tetap Tanah BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|--------|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | | | Rp | % |
| 01 | BPPK | 545.192.062.827 | 545.192.062.827 | 0 | 0 |

Selama TA 2012 tidak terdapat mutasi/perubahan Tanah BLU.

C.2.3. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp8.849.450.471.389,
00*

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp8.849.450.471.389,00** dan **Rp8.021.195.465.644,00**. Terdapat peningkatan nilai aset peralatan dan mesin pada TA 2012 sebesar **Rp828.255.005.745,00** atau **10,33 persen**.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 96 berikut.

Tabel 96
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | | (dalam rupiah) |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| | | | | Rp | % | |
| 01 | SETJEN | 1.003.616.999.971 | 569.946.033.968 | 433.670.966.003 | 76,09 | |
| 02 | ITJEN | 39.527.010.841 | 33.693.923.953 | 5.833.086.888 | 17,31 | |
| 03 | DJA | 69.583.972.759 | 59.678.724.279 | 9.905.248.480 | 16,60 | |
| 04 | DJP | 3.909.210.659.511 | 3.822.116.114.333 | 87.094.545.178 | 2,28 | |
| 05 | DJBC | 2.371.993.416.332 | 2.209.810.148.373 | 162.183.267.959 | 7,34 | |
| 06 | DJPK | 44.213.940.255 | 36.643.824.308 | 7.570.115.947 | 20,66 | |
| 07 | DJPU | 41.622.002.584 | 27.551.773.884 | 14.070.228.700 | 51,07 | |
| 08 | DJPB | 858.567.560.256 | 714.994.712.683 | 143.572.847.573 | 20,08 | |
| 09 | DJKN | 311.494.200.424 | 271.717.188.880 | 39.777.011.544 | 14,64 | |
| 10 | BAPEPAM-LK | 2.706.000 | 97.090.748.115 | (97.088.042.115) | (100,00) | |
| 11 | BPPK | 148.775.131.331 | 133.190.173.730 | 15.584.957.601 | 11,70 | |
| 12 | BKF | 50.842.871.125 | 44.762.099.138 | 6.080.771.987 | 13,58 | |
| Jumlah | | 8.849.450.471.389 | 8.021.195.465.644 | 828.255.005.745 | 10,33 | |

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 97 berikut.

Tabel 97
Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2012

| | | URAIAN TRN | Uraian |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | | | 8.021.195.465.644 |
| Koreksi SAK | | | |
| Reklasifikasi BLU Periode Sebelumnya | | | 43.188.928.397 |
| SALDO AWAL (SIMAK BMN) | | | 8.064.384.394.041 |
| MUTASI TAMBAH : | | | |
| 100 | Penambahan Saldo Awal | | 49.824.750.207 |
| 101 | Pembelian | | 667.710.733.157 |
| 102 | Transfer Masuk | | 473.761.708.452 |
| 103 | Hibah (Masuk) | | 2.734.561.271 |
| 104 | Rampasan | | 920.215.400 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | | 188.198.414.441 |
| 106 | Pembatalan Penghapusan | | 264.698.000 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | | 670.164.935.760 |
| 112 | Perolehan Lainnya | | 1.601.395.250 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | | 1.238.789.300 |

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T | 13.175.332.332 |
| 199 | Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks | 2.802.644.941 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset | 3.001.643.519 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | 7.184.541.566 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | 3.070.313.577 |
| 206 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 5.953.946.000 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 14.475.423.220 |
| | Mutasi Tambah KDP | 0 |
| | Jumlah Mutasi Tambah | 2.106.084.046.393 |
| | MUTASI KURANG : | |
| 201 | Pengurangan Nilai Aset | 0 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | -4.373.235.113 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | -12.712.394.838 |
| 301 | Penghapusan | -4.178.330.169 |
| 302 | Transfer Keluar | -422.287.485.341 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | -632.478.586.721 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | -3.745.257.230 |
| 399 | Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Intra ke ekstra | -1.593.027.146 |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | -188.355.695.855 |
| | Mutasi kurang KDP | |
| | Jumlah Mutasi Kurang | (1.269.724.012.413) |
| | SALDO AKHIR (SIMAK BMN) | 8.900.744.428.021 |
| | Reklasifikasi BLU | (51.293.956.632) |
| | SALDO AKHIR (SAK) | 8.849.450.471.389 |

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal dapat dilihat pada Tabel 98 berikut.

Tabel 98
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| BELANJA ASET PERALATAN MESIN : | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| 532 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 848.335.043.486 |
| MUTASI : | | |
| Pembelian | 664.513.094.003 | |
| Penyelesaian pembangunan langsung | 2.817.801.943 | |
| Pengembangan langsung | 4.317.776.845 | |
| Perolehan KDP | 36.361.898.946 | |
| Pengembangan KDP | 118.613.726.195 | |
| TOTAL MUTASI ASET | 826.624.297.932 | |
| SELISIH | 21.710.745.554 | |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| Pembelian Ekstrakomptabel | 4.586.301.078 | |
| BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset lain | 43.395.624.235 | |
| Perolehan/Pengembangan Peralatan Mesin dari BM lain | (25.540.836.309) | |
| Perolehan/Pengembangan Peralatan Mesin dari Bel Barang/bel pegawai | (1.755.206.167) | |
| Kurang/ Lebih Kapitalisasi | 1.013.516.717 | |
| Selisih SPM Sakpa-Simak (Koreksi Nilai Karena Pengembalian BM) | 11.346.000 | |

C.2.4. Peralatan dan Mesin BLU

Peralatan dan
Mesin BLU
Rp51.293.956.632,0
0

Nilai Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp51.293.956.632,00** dan **Rp43.188.928.397,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK. Terdapat peningkatan nilai aset Peralatan dan Mesin BLU pada TA 2012 sebesar

Rp8.105.028.235,00 atau 18,77 persen.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin BLU yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 99 berikut.

Tabel 99
Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | | (dalam rupiah) |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | | Rp | % | |
| 01 | SETJEN | 10.850.354.768 | 8.103.945.843 | 2.746.408.925 | 33,89 | |
| 02 | BPPK | 40.443.601.864 | 35.084.982.554 | 5.358.619.310 | 15,27 | |
| | Jumlah | 51.293.956.632 | 43.188.928.397 | 8.105.028.235 | 18,77 | |

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.

Tabel 100
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU
Per 31 Desember 2012

| Uraian Transaksi | Jumlah | (dalam rupiah) |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| SALDO AWAL | | 43.188.928.397,00 |
| MUTASI TAMBAH | | |
| Pembelian | 4.250.641.985,00 | |
| Transfer Masuk | 1.358.500,00 | |
| Hibah (Masuk) | 13.500.000,00 | |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 3.849.751.750,00 | |
| | | 8.115.252.235,00 |
| MUTASI KURANG | | |
| Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | -10.224.000,00 | |
| | | -10.224.000,00 |
| SALDO AKHIR | | 51.293.956.632,00 |

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin BLU dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 101 berikut.

Tabel 101
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | JUMLAH | (dalam rupiah) |
|----------------------------|--|--------|----------------|
| 5372 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU | | 2.746.408.925 |
| MUTASI : | | | |
| | Pembelian | | 2.043.262.135 |
| TOTAL MUTASI ASET | | | 2.043.262.135 |
| SELISIH | | | 703.146.790 |
| PENJELASAN SELISIH: | | | |
| | Dari belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 703.146.790 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

C.2.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp11.211.918.159.435,00
35,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp11.211.918.159.435,00** dan **Rp10.635.543.677.167,00**. Terdapat penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan pada TA 2012 sebesar **Rp576.374.482.268,00** atau **5,42** persen.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 102 berikut.

Tabel 102
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 2.977.791.894.067 | 2.888.840.748.158 | 88.951.145.909 | 3,08 |
| 02 | ITJEN | 3.749.181.414 | 2.343.493.115 | 1.405.688.299 | 59,98 |
| 03 | DJA | 6.839.554.676 | 1.114.400.000 | 5.725.154.676 | 513,74 |
| 04 | DJP | 4.544.423.951.761 | 4.448.160.218.335 | 96.263.733.426 | 2,16 |
| 05 | DJBC | 1.586.797.144.043 | 1.461.215.455.598 | 125.581.688.445 | 8,59 |
| 06 | DJPK | 12.900.832.453 | 0 | 12.900.832.453 | 0,00 |
| 06 | DJPU | 62.561.850.800 | 27.152.885.000 | 35.408.965.800 | 130,41 |
| 07 | DJPB | 1.345.060.156.380 | 1.208.680.059.659 | 136.380.096.721 | 11,28 |
| 08 | DJKN | 320.157.489.129 | 282.360.924.737 | 37.796.564.392 | 13,39 |
| 09 | BAPEPAM-LK | 0 | 395.843.550 | (395.843.550) | (100,00) |
| 10 | BPPK | 349.886.435.712 | 314.910.919.015 | 34.975.516.697 | 11,11 |
| 11 | BKF | 1.749.669.000 | 368.730.000 | 1.380.939.000 | 374,51 |
| Jumlah | | 11.211.918.159.435 | 10.635.543.677.167 | 576.374.482.268 | 5,42 |

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 103 berikut.

Tabel 103
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN TRN | | Uraian |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | | 10.635.543.677.167 |
| Koreksi SAK | | 20.236.317 |
| Reklasifikasi BLU Periode Sebelumnya | | 194.255.849.179 |
| Aset Tetap Renovasi | | (92.640.540.435) |
| SALDO AWAL (SIMAKBMN) | | 10.737.179.222.228 |
| MUTASI TAMBAH : | | |
| 100 | Penambahan Saldo Awal | 12.625.344.759 |
| 101 | Pembelian | 3.330.507.226 |
| 102 | Transfer Masuk | 110.613.124.528 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 352.657.653.337 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 195.668.828.937 |
| 112 | Perolehan Lainnya | 369.888.650 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | 1.360.508.406 |
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T | 11.135.038.560 |
| 199 | Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks | 2.986.887.972 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset | 37.519.767.730 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | 21.757.272.910 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | 37.286.359.617 |
| 206 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 60.001.913.827 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 200.131.145.310 |
| | Mutasi Tambah KDP | 0 |
| | Jumlah Mutasi Tambah | 1.047.444.241.769 |
| MUTASI KURANG : | | |
| 201 | Pengurangan Nilai Aset | 0 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | -50.324.179.835 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | -10.636.058.675 |
| 301 | Penghapusan | -77.886.200.758 |
| 302 | Transfer Keluar | -111.134.991.347 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | -195.324.735.262 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | -6.766.383.460 |
| 399 | Penghapusan semu karena reklassifikasi dari Intra ke ekstra | -6.421.911 |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | -11.362.147.466 |
| | Mutasi kurang KDP | |
| | Jumlah Mutasi Kurang | (463.441.118.714) |
| SALDO AKHIR (SIMAKBMN) | | |
| | Reklasifikasi BLU | (196.710.647.484) |
| | Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi | 87.446.461.636 |
| | SALDO AKHIR (SAK) | 11.211.918.159.435 |

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal dapat dilihat pada Tabel 104 berikut.

Tabel 104
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | JUMLAH |
|----------------------------|---|------------------------|
| 533 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 710.862.344.644 |
| MUTASI: | | |
| | Pembelian | 3.330.507.226 |
| | Penyelesaian pembangunan langsung | 1.182.445.676 |
| | Pengembangan langsung | 65.824.095.933 |
| | Perolehan KDP | 68.656.719.365 |
| | Pengembangan KDP | 517.212.089.196 |
| | TOTAL MUTASI ASET | 656.205.857.396 |
| SELISIH | | 54.656.487.248 |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| | Pembelian Ekstrakomptabel | 40.368.300 |
| | BM Gedung Bangunan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain | 63.293.690.032 |
| | Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari BM lain | (9.818.703.381) |
| | Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai | (1.997.789.660) |
| | Kurang/ Lebih kapitalisasi | 2.915.947.389 |
| | Selisih SPM Sakpa-Simak (Koreksi Nilai Karena Pengembalian BM) | 222.974.568 |

Pada Gedung dan bangunan senilai Rp11.211.918.159.435,00 terdapat rumah dinas sebanyak 10.398 rumah pada 7 unit Eselon I. Atas rumah dinas tersebut sebanyak 2.543 rumah masih dikuasai oleh pihak ketiga antara lain dikuasai janda dari pensiunan pegawai, anak dari pensiunan pegawai, pihak ketiga diluar pegawai, dan lain-lain. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari KPK, Pihak *Ombudsman*, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan nomor 239/KM.1/2013 tentang Tim Penyelesaian Sengketa BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rincian data rumah dinas yang dikuasai pihak ketiga per unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran LK BA 015.

C.2.6. Gedung dan Bangunan BLU

Gedung BLU
Rp196.710.647.484,00

Nilai Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp196.710.647.484,00** dan **Rp194.225.849.179,00**. Terjadi kenaikan nilai Nilai Gedung dan Bangunan BLU sebesar **Rp2.454.798.305,00** atau **1,26 persen**. Keseluruhan nilai tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU STAN pada BPPK.

Rincian Gedung dan Bangunan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 105 berikut.

Tabel 105
Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|--------|------------------|------------------|----------------------|------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | BPPK | 196.710.647.484 | 194.255.849.179 | 2.454.798.305 | 1,26 |

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan BLU TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 106 berikut:

Tabel 106
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Uraian Transaksi | Jumlah |
|----------------------------------|---------------------------|
| SALDO AWAL | 194.255.849.179,00 |
| MUTASI TAMBAH | |
| Transfer Masuk | 67.376.100,00 |
| Pengembangan Nilai Aset | 542.471.910,00 |
| Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 1.399.547.370,00 |
| Pengembangan Melalui KDP | 1.677.455.750,00 |
| | 3.686.851.130,00 |
| MUTASI KURANG | |
| Penghentian Aset Dari Penggunaan | -1.232.052.825,00 |
| | -1.232.052.825 |
| SALDO AKHIR | 196.710.647.484,00 |

Terdapat mutasi Gedung dan Bangunan BLU dari Belanja Modal TA 2012 dengan uraian belanja modal dapat dilihat pada Tabel 107 berikut.

Tabel 107
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | JUMLAH |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 5373 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU | 50.000.000 |
| MUTASI : | | |
| | Pengembangan langsung | 542.471.910 |
| TOTAL MUTASI ASET | | 542.471.910 |
| SELISIH | | (492.471.910) |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| | Dari belanja Modal Gedung Bangunan | (492.471.910) |

C.2.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigrasi, dan
Jaringan sebesar
Rp348.337.022.003,
00

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp348.573.649.280,00** dan **Rp332.477.687.395,00**. Terdapat peningkatan nilai aset Jalan dan Jembatan pada TA 2012 sebesar **Rp16.095.961.885,00** atau **4,84 persen**.

Perbandingan rincian nilai Jalan dan Jembatan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 108 berikut.

Tabel 108
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 52.188.436.079 | 43.438.646.825 | 8.749.789.254 | 20,14 |
| 02 | ITJEN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 | DJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 | DJP | 45.640.658.515 | 41.793.942.213 | 3.846.716.302 | 9,20 |
| 03 | DJBC | 213.969.237.346 | 212.686.496.356 | 1.282.740.990 | 0,60 |
| 06 | DJKP | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 | DJPU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 | DJPB | 15.342.370.235 | 15.023.935.761 | 318.434.474 | 2,12 |
| 05 | DJKN | 3.639.238.976 | 3.011.679.772 | 627.559.204 | 20,84 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 | BPPK | 17.625.091.634 | 16.354.369.973 | 1.270.721.661 | 7,77 |
| 07 | BKF | 168.616.495 | 168.616.495 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah | 348.573.649.280 | 332.477.687.395 | 16.095.961.885 | 4,84 |

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Tabel 109 berikut.

Tabel 109
Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN TRN | | Uraian |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | | 332.477.687.395 |
| Koreksi SAK | | 0 |
| Reklasifikasi BLU Periode Sebelumnya | | 18.437.121.332 |
| SALDO AWAL (SIMAK BMN) | | 350.914.808.727 |
| MUTASI TAMBAH : | | 0 |
| 100 | Penambahan Saldo Awal | 17.894.065.286 |
| 101 | Pembelian | 4.621.169.350 |
| 102 | Transfer Masuk | 151.800.000 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 14.847.857.997 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | 20.285.304.909 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | 389.365.769 |
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T | 5.150.000 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset | 964.157.100 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | 116.522.060 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | 248.268.952 |
| 206 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi | 134.177.000 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | 13.782.957.273 |
| | Mutasi Tambah KDP | 0 |
| | Jumlah Mutasi Tambah | 73.440.795.696 |
| MUTASI KURANG : | | |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | -2.760.965.278 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) | -5.104.619.685 |
| 301 | Penghapusan | -244.457.154 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | -48.797.358.274 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | -32.058.750 |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | -405.374.670 |
| | Mutasi kurang KDP | 0 |
| | Jumlah Mutasi Kurang | (57.344.833.811) |
| SALDO AKHIR (SIMAK BMN) | | 367.010.770.612 |
| | Reklasifikasi BLU | (18.437.121.332) |
| SALDO AKHIR (SAK) | | 348.573.649.280 |

Rincian mutasi Jalan dan Jembatan dari belanja modal pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 110 berikut.

**Tabel 110
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012**

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | JUMLAH |
|--|---|------------------|
| 5341 | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan | 3.961.122.061 |
| TOTAL BELANJA | | |
| MUTASI : | | |
| Pembelian | 4.703.569.612 | |
| Penyelesaian pembangunan langsung | 389.365.769 | |
| Pengembangan langsung | 700.251.600 | |
| Perolehan KDP | 1.039.002.929 | |
| Pengembangan KDP | 10.272.761.648 | |
| TOTAL MUTASI ASET | 17.104.951.558 | |
| SELISIH | | (13.143.829.497) |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| BM Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain | 403.830.000 | |
| Perolehan/Pengembangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari BM lain | (13.542.759.497) | |
| Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai | (4.900.000) | |
| Kurang/ Lebih Kapitalisasi | - | |
| Selisih SPM Simak Sakpa | - | |

C.2.8. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

*Jalan, irigasi, dan
jaringan BLU Rp
Rp18.437.121.332,00*

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp18.437.121.332,00** dan **Rp18.437.121.332,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 111 berikut.

**Tabel 111
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | | (dalam rupiah) |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | | | | Rp | % | |
| 01 | SETJEN | 73.072.318 | 73.072.318 | 0 | 0,00 | |
| 02 | BPPK | 18.364.049.014 | 18.364.049.014 | 0 | 0,00 | |
| | Jumlah | 18.437.121.332 | 18.437.121.332 | 0 | 0,00 | |

Selama TA 2012 tidak terdapat mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU.

C.2.9. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp26.339.299.995,00*

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp26.339.299.995,00** dan **Rp21.169.879.443,00**. Terdapat peningkatan nilai aset tetap Lainnya pada TA 2012 sebesar **Rp5.169.420.552,00** atau **24,42** persen.

Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 112 berikut.

Tabel 112
Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | | (dalam rupiah) Rp | % |
| 01 | SETJEN | 2.217.345.527 | 1.853.777.082 | 363.568.445 | 19,61 |
| 02 | ITJEN | 752.055.322 | 722.106.711 | 29.948.611 | 4,15 |
| 03 | DJA | 551.529.369 | 522.608.169 | 28.921.200 | 5,53 |
| 04 | DJP | 5.247.757.003 | 4.574.400.565 | 673.356.438 | 14,72 |
| 05 | DJBC | 7.644.065.103 | 4.537.412.504 | 3.106.652.599 | 68,47 |
| 06 | DJKP | 542.031.502 | 442.041.682 | 99.989.820 | 22,62 |
| 07 | DJPU | 419.278.426 | 419.278.426 | 0 | 0,00 |
| 08 | DJPB | 1.263.129.140 | 1.095.420.952 | 167.708.188 | 15,31 |
| 09 | DJKN | 1.083.886.092 | 815.173.702 | 268.712.390 | 32,96 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 0 | 173.861.145 | (173.861.145) | (100,00) |
| 11 | BPPK | 6.038.913.211 | 5.509.981.305 | 528.931.906 | 9,60 |
| 12 | BKF | 579.309.300 | 503.817.200 | 75.492.100 | 14,98 |
| Jumlah | | 26.339.299.995 | 21.169.879.443 | 5.169.420.552 | 24,42 |

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 113 berikut.

Tabel 113
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2012

| | | URAIAN TRN | Uraian |
|--------------------------------------|---|------------|-------------------------|
| SALDO AWAL (SAK) | | | 21.169.879.443 |
| Koreksi SAK | | | |
| Reklasifikasi BLU Periode Sebelumnya | | | 11.467.292.040 |
| Aset Tetap Renovasi | | | 92.640.540.435 |
| Aset yang dihentikan BLU | | | (31.129.000) |
| SALDO AWAL (SIMAK BMN) | | | 125.246.582.918 |
| MUTASI TAMBAH : | | | |
| 100 | Penambahan Saldo Awal | | 2.000.000 |
| 101 | Pembelian | | 16.904.248.456 |
| 102 | Transfer Masuk | | 7.277.737.025 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | | 36.999.722.520 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | | 194.636.200 |
| 113 | Penyelesaian Pembangunan Langsung | | 1.176.606.273 |
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T | | 6.112.000 |
| 202 | Pengembangan Nilai Aset | | 16.842.626.456 |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) | | 13.605.806.400 |
| 205 | Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) | | 16.185.998 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | | 1.500.000 |
| Mutasi Tambah KDP | | | |
| Jumlah Mutasi Tambah | | | 93.027.181.328 |
| MUTASI KURANG : | | | |
| 204 | Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | | -14.056.707.751 |
| 301 | Penghapusan | | -5.854.400.000 |
| 302 | Transfer Keluar | | -69.888.678.872 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | | -2.853.231.761 |
| 401 | Penghentian Aset Dari Penggunaan | | -27.076.400 |
| Mutasi kurang KDP | | | |
| Jumlah Mutasi Kurang | | | (92.680.094.784) |
| SALDO AKHIR (SIMAK BMN) | | | 125.593.669.462 |
| Reklasifikasi BLU | | | (11.807.907.831) |
| Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi | | | (87.446.461.636) |
| SALDO AKHIR (SAK) | | | 26.339.299.995 |

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari belanja modal dapat dilihat pada Tabel 114 berikut.

Tabel 114
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | (dalam rupiah) |
|---|--|-----------------------|
| | | JUMLAH |
| MUTASI TERKAIT BELANJA : | | |
| Pembelian INTRA | | 22.765.818.897 |
| pembelian EKSTRA | | 2.942.500 |
| Penyelesaian pembangunan langsung | | 12.301.566.734 |
| Pengembangan langsung | | 6.763.087.554 |
| Perolehan KDP | | 2.659.505.287 |
| Pengembangan KDP | | 24.851.417.664 |
| TOTAL MUTASI ASET | | 69.344.338.636 |
| BELANJA PEROLEHAN/PENGEMBANGAN ATL : | | |
| 51 atau '52 Belanja Pegawai/ Belanja Barang | | 55.292.000 |
| 531 Belanja Modal Tanah | | - |
| 532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 6.461.728.500 |
| 533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 47.166.730.505 |
| 534 Belanja Modal JIJ | | 13.938.150 |
| 536 Belanja Modal Lainnya | | 15.643.706.981 |
| 537 Belanja Modal BLU | | - |
| TOTAL BELANJA | | 69.341.396.136 |
| SELISIH | | 2.942.500 |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| Kurang/ Lebih Kapitalisasi | | 2.942.500 |

C.2.10. Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya
BLU
Rp11.807.907.831,0

Nilai Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp11.807.907.831,00** dan **Rp11.467.292.040,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya BLU pada TA 2012 sebesar **Rp340.615.791,00** atau **2,97** persen.

Rincian Aset Tetap Lainnya BLU per eselon I 2012 dapat dilihat pada Tabel 115 berikut.

Tabel 115
Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 3.612.539.380 | 3.643.668.380 | (31.129.000) | (0,85) |
| 02 | BPPK | 8.195.368.451 | 7.823.623.660 | 371.744.791 | 4,75 |
| | Jumlah | 11.807.907.831 | 11.467.292.040 | 340.615.791 | 2,97 |

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya BLU TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 116 berikut

Tabel 116
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU
Per 31 Desember 2012

| Uraian Transaksi | | Jumlah |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| SALDO AWAL | | 11.436.163.040,00 |
| MUTASI TAMBAH | | |
| Pembelian | | 233.174.791,00 |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | | 263.705.000,00 |
| Pengembangan Melalui KDP | | 1.500.000,00 |
| | | 498.379.791,00 |
| MUTASI KURANG | | |
| Transfer Keluar | | -126.635.000,00 |
| | | -126.635.000,00 |
| SALDO AKHIR | | 11.807.907.831,00 |

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya BLU dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 117 berikut.

Tabel 117
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| URAIAN BELANJA DAN MUTASI | | JUMLAH |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 5376 | Belanja Modal BLU | - |
| MUTASI : | | |
| | Pembelian | 233,174,791 |
| TOTAL MUTASI ASET | | 233,174,791 |
| SELISIH | | (233,174,791) |
| PENJELASAN SELISIH: | | |
| | Dari belanja Modal Aset Tetap Lainnya | (233,174,791) |

C.2.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp677.317.480.494,00*

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp677.317.480.494,00** dan **Rp698.283.768.910,00**. Terdapat penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2012 sebesar **Rp20.966.288.416,00** atau **3,00** persen.

Perbandingan rincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 118 berikut.

Tabel 118
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 131.432.804.603 | 170.256.416.552 | (38.823.611.949) | (22,80) |
| 02 | ITJEN | 0 | | | |
| 03 | DJA | 308.808.000 | 0 | 308.808.000 | 0,00 |
| 04 | DJP | 349.138.895.914 | 304.223.274.958 | 44.915.620.956 | 14,76 |
| 05 | DJBC | 51.752.290.618 | 39.294.366.591 | 12.457.924.027 | 31,70 |
| 06 | DJKP | 0 | | | |
| 07 | DJPU | 0 | 40.296.178.800 | (40.296.178.800) | (100,00) |
| 08 | DJPB | 115.687.671.970 | 108.606.931.562 | 7.080.740.408 | 6,52 |
| 09 | DJKN | 19.762.973.374 | 3.898.707.630 | 15.864.265.744 | 406,91 |
| 10 | BAPEPAM-LK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | BPPK | 9.184.783.515 | 31.670.168.317 | (22.485.384.802) | (71,00) |
| 12 | BKF | 49.252.500 | 37.724.500 | 11.528.000 | 30,56 |
| | Jumlah | 677.317.480.494 | 698.283.768.910 | (20.966.288.416) | (3,00) |

Adapun mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 119 berikut.

Tabel 119
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

| Uraian | Jumlah |
|---|--------------------------|
| SALDO AWAL KDP | 698.283.768.910 |
| MUTASI TAMBAH | |
| 501 (Saldo Awal KDP) | 3.002.462.210 |
| 502 (Perolehan/Penambahan KDP) | 98.091.545.361 |
| 503 (Pengembangan KDP) | 723.260.823.156 |
| 504 (Koreksi Nilai KDP) | 4.564.183.276 |
| 506 (reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi) | 146.534.000 |
| | 829.065.548.003 |
| MUTASI KURANG | |
| 505 (Penghapusan/ Penghentian KDP) | (9.344.262.380) |
| 507 (Transfer Keluar KDP) | (2.497.802.402) |
| 599 (Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi) | (827.302.484.907) |
| | (839.144.549.689) |
| SALDO AKHIR KDP (SIMAK) | 688.204.767.224 |
| REKLASIFIKASI BLU | 10.887.286.730 |
| SALDO AKHIR KDP (SAKPA) | 677.317.480.494 |

C.2.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Rp10.887.286.730,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp10.887.286.730,00** dan **Rpnilil**. Nilai tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU pada STAN BPPK.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU pereselon I dapat dilihat pada Tabel 120 berikut.

Tabel 120
Aset Tetap KDP BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| No. | Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | |
|-----|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| 01 | SETJEN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0,00 |
| 02 | BPPK | 10.837.286.730 | 0 | 10.837.286.730 | 0,00 |
| | Jumlah | 10.887.286.730 | 0 | 0 | 0,00 |

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 121 berikut.

Tabel 121
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| Uraian Transaksi | Jumlah |
|---|--------------------------|
| Saldo Awal | 0,00 |
| Mutasi tambah | |
| 502 (perolehan/Penambahan KDP) | 2.661.504.431,00 |
| 503 (Pengembangan KDP) | 14.497.910.269,00 |
| | 17.159.414.700,00 |
| Mutasi kurang | |
| 504 (Koreksi Nilai KDP) | -479.715.470,00 |
| 599 (Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi) | -5.792.412.500,00 |
| | -6.272.127.970,00 |
| Saldo akhir | 10.887.286.730,00 |

Perolehan/penambahan Aset Tetap KDP BLU terdapat pada:

- BLU STAN berupa renovasi gedung kantor yang belum selesai senilai **Rp10.837.286.730,00**
- BLU LPDP berupa renovasi gedung kantor yang belum selesai senilai **Rp50.000.000,00**

C.3 Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang
Rp170.783.795,00*

Nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp170.783.795,00** dan **Rp26.311.480,00**, seluruhnya merupakan saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Rincian Piutang Jangka Panjang dapat dilihat pada Tabel 122 berikut.

Tabel 122
Komposisi Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR | 171.642.005 | 26.443.698 | 145.198.307 | 549,08 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/ TGR | (858.210) | (132.218) | (725.992) | 549,09 |
| Tagihan TP/ TGR - Netto | 170.783.795 | 26.311.480 | 144.472.315 | 549,08 |
| Jumlah | 170.783.795 | 26.311.480 | 144.472.315 | 549,08 |

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi
Rp171.642.005,00*

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ada pada Kementerian Keuangan hanya berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

Nilai bruto Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR Kementerian Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp171.642.005,00** dan **Rp26.443.698,00**. Berkurangnya nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR tersebut dikarenakan adanya pelunasan ganti rugi, dan reklasifikasi akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ TGR Bruto dapat dilihat pada Tabel 123 berikut.

Tabel 123
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I Bruto
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | (dalam rupiah) |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| ITJEN | 0 | 9.000.000 | (9.000.000) | (100,00) |
| DJP | 14.750.005 | 8.332.014 | 6.417.991 | 77,03 |
| DJBC | 1.792.000 | 1.400.000 | 392.000 | 28,00 |
| DJPB | 150.000.000 | 3.841.684 | 146.158.316 | 3.804,54 |
| DJKN | 5.100.000 | 3.870.000 | 1.230.000 | 31,78 |
| JUMLAH | 171.642.005 | 26.443.698 | 300.651.576 | 1.136,95 |

Adapun rincian Tuntutan Perbendaharaan/TGR Neto per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 124 berikut.

Tabel 124
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I Neto
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| ITJEN | 0 | 8.955.000 | (8.955.000) | (100,00) |
| DJP | 14.676.255 | 8.290.354 | 6.385.901 | 77,03 |
| DJBC | 1.783.040 | 1.393.000 | 390.040 | 28,00 |
| DJPB | 149.250.000 | 3.822.476 | 145.427.524 | 3.804,54 |
| DJKN | 5.074.500 | 3.850.650 | 1.223.850 | 31,78 |
| JUMLAH | 170.783.795 | 26.311.480 | 144.472.315 | 549.08 |

Adapun daftar rincian Tuntutan Perbendaharaan/TGR dapat dilihat pada lampiran daftar Tagihan TGR Kementerian Keuangan TA 2012.

C.3.2 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi
(Rp858.210,00)*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2012 sebesar **(Rp858.210,00)** dihitung berdasarkan persentase penyisihan piutang sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada Tabel 125 berikut.

Tabel 125
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | Nilai Bruto | Penyisihan | Nilai Neto |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| DJP | 14.750.005 | (73.750) | 14.676.255 |
| DJBC | 1.792.000 | (8.960) | 1.783.040 |
| DJPB | 150.000.000 | (750.000) | 149.250.000 |
| DJKN | 5.100.000 | (25.500) | 5.074.500 |
| JUMLAH | 171.642.005 | (858.210) | 170.783.795 |

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp900.837.494.078,
00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp900.837.494.078,00 dan Rp801.350.196.060,00 merupakan saldo Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud - Badan Layanan Umum, Aset Lain-lain dan Aset Lain-lain - Badan Layanan Umum.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada Tabel 126 berikut.

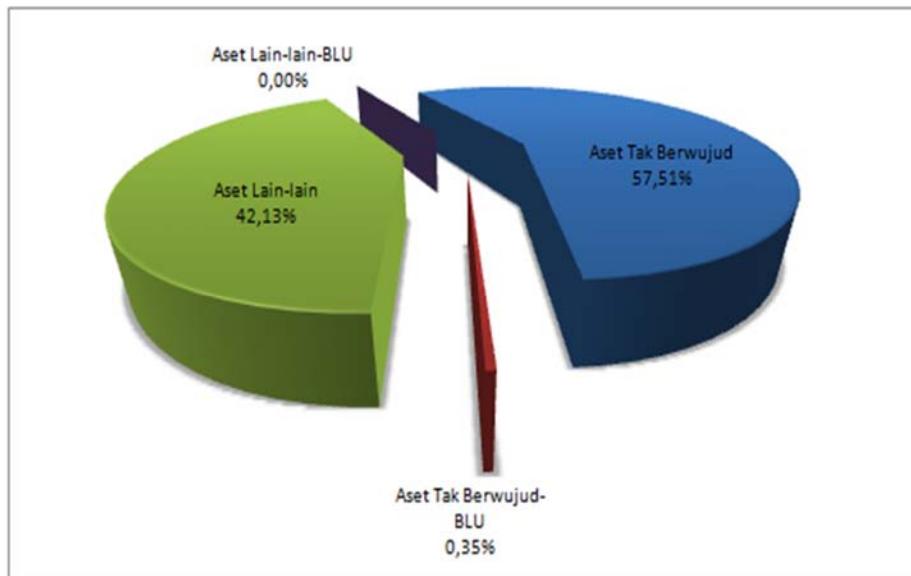
Tabel 126
Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------|
| Aset Tak Berwujud | 518.108.669.309 | 474.893.975.396 | 43.214.693.913 | 9,10 |
| Aset Tak Berwujud- BLU | 3.177.745.040 | 2.898.446.790 | 279.298.250 | 9,64 |
| Aset Lain-lain | 379.512.337.729 | 248.393.281.860 | 131.119.055.869 | 52,79 |
| Aset Lain-lain-BLU | 38.742.000 | 75.164.492.014 | (75.125.750.014) | (99,95) |
| Jumlah | 900.837.494.078 | 801.350.196.060 | 99.487.298.018 | 12,41 |

Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada Grafik 21 berikut.

Grafik 21
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2012



C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp518.108.669.309,
00*

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp518.108.669.309,00** dan **Rp474.893.975.396,00**. Aset Tak Berwujud terdiri dari *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 127 berikut.

Tabel 127
Aset Tak Berwujud per Jenis Aset
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Software | 452.722.715.729 | 409.152.806.967 | 43.569.908.762 | 10,65 |
| Lisensi | 40.289.625.584 | 36.874.147.584 | 3.415.478.000 | 9,26 |
| Hasil Kajian | 828.985.000 | 828.985.000 | 0 | 0,00 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 24.267.342.996 | 28.038.035.845 | (3.770.692.849) | (13,45) |
| Jumlah | 518.108.669.309 | 474.893.975.396 | 43.214.693.913 | 9,10 |

Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 128 berikut.

Tabel 128
Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| SETJEN | 107.131.056.402 | 75.401.042.390 | 31.730.014.012 | 42,08 |
| ITJEN | 8.727.854.688 | 8.177.453.342 | 550.401.346 | 6,73 |
| DJA | 4.997.499.933 | 4.884.969.933 | 112.530.000 | 2,30 |
| DJP | 242.253.533.046 | 235.652.806.089 | 6.600.726.957 | 2,80 |
| DJBC | 102.149.641.171 | 79.838.215.247 | 22.311.425.924 | 27,95 |
| DJKP | 2.145.199.377 | 2.097.599.377 | 47.600.000 | 2,27 |
| DJPU | 8.334.116.005 | 7.825.404.405 | 508.711.600 | 6,50 |
| DJPB | 15.029.739.280 | 17.449.000.108 | (2.419.260.828) | (13,86) |
| DJKN | 14.168.137.051 | 15.284.332.726 | (1.116.195.675) | (7,30) |
| BAPEPAM-LK | 0 | 16.414.368.825 | (16.414.368.825) | (100,00) |
| BPPK | 8.086.040.522 | 7.764.132.822 | 321.907.700 | 4,15 |
| BKF | 5.085.851.834 | 4.104.650.132 | 981.201.702 | 23,90 |
| JUMLAH | 518.108.669.309 | 474.893.975.396 | 43.214.693.913 | 9,10 |

Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2011, Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp43.214.693.913,00. Kenaikan yang signifikan terutama terjadi pada Unit Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kenaikan Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp31.730.014.012,00 selain karena pembelian *software* oleh Pusintek juga karena transfer masuk Aset Tak Berwujud dari Bapepam-LK. Sedangkan kenaikan Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp22.311.425.924,00 merupakan perolehan *software/aplikasi* Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 129 berikut.

**Tabel 129
Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud**

(dalam rupiah)

| | |
|--|-------------------------|
| SALDO AWAL | 474.893.975.396 |
| MUTASI TAMBAH | 71.254.696.794 |
| Penambahan Saldo Awal | 9.507.302 |
| Pembelian | 44.730.246.470 |
| Pengembangan Nilai Aset | 1.647.164.825 |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | 3.541.822.387 |
| Reklasifikasi Masuk | 4.207.409.615 |
| Transfer Masuk | 17.118.546.195 |
| MUTASI KURANG | (28.040.002.881) |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) | (3.494.333.578) |
| Penghentian Aset Dari Penggunaan | (3.159.967.959) |
| Reklasifikasi Keluar | (4.167.825.149) |
| Transfer Keluar | (17.217.876.195) |
| SALDO AKHIR | 518.108.669.309 |

C.4.2. Aset Tak Berwujud - Badan Layanan Umum

Aset Tak Berwujud - BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp3.177.745.040,00** dan **Rp2.898.446.790,00**. Aset Tak Berwujud - BLU tersebut merupakan Aset Tak Berwujud Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Rincian Aset Tak Berwujud - BLU dapat dilihat pada Tabel 130 berikut.

**Tabel 130
Aset Tak Berwujud - BLU per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| SETJEN | 892.533.790 | 892.533.790 | 0 | 0,00 |
| BPPK | 2.285.211.250 | 2.005.913.000 | 279.298.250 | 13,92 |
| JUMLAH | 3.177.745.040 | 2.898.446.790 | 279.298.250 | 9,64 |

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2011, Aset Tak Berwujud - BLU mengalami kenaikan sebesar **Rp279.298.250,00** atau **9,64** persen. Kenaikan tersebut berasal dari kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Aset Tak Berwujud Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2012 sebesar **Rp892.533.790,00** berupa perangkat sistem informasi manajemen PIP; aplikasi *cash management* dan investasi jangka pendek PIP; *website* dan *webmail* PIP serta sistem pengelolaan kinerja (pendekatan *balanced scorecard*) dan kompetensi berbasis *web*. Adapun Aset Tak Berwujud BPPK per 31 Desember 2012 sebesar **Rp2.285.211.250,00** merupakan *Software* Sistem Informasi

Keuangan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Keuangan (STAN).

Rincian Aset Tak Berwujud - BLU per jenis aset dapat dilihat pada Tabel 131 berikut.

Tabel 131
Aset Tak Berwujud - BLU Per Jenis Aset

| Uraian | Nilai (dalam rupiah) |
|--|-------------------------|
| Software - Badan Layanan Umum | 3.010.670.040 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya - Badan Layanan Umum | 167.075.000 |
| JUMLAH | 3.177.745.040 |

C.4.3. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp379.512.337.729,00*

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp379.512.337.729,00** dan **Rp248.393.281.860,00**.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 132 berikut.

Tabel 132
Aset Lain-lain per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| SETJEN | 18.186.753.884 | 5.897.161.885 | 12.289.591.999 | 208,40 |
| ITJEN | 1.455.032.139 | 1.455.032.139 | 0 | 0,00 |
| DJA | 392.012.500 | 2.121.043.217 | (1.729.030.717) | (81,52) |
| DJP | 159.637.213.628 | 111.775.086.480 | 47.862.127.148 | 42,82 |
| DJBC | 109.986.144.883 | 59.603.901.693 | 50.382.243.190 | 84,53 |
| DJPK | 627.297.279 | 153.297.279 | 474.000.000 | 309,20 |
| DJPB | 56.326.590.000 | 48.120.869.752 | 8.205.720.248 | 17,05 |
| DJKN | 14.143.087.418 | 9.969.842.186 | 4.173.245.232 | 41,86 |
| BAPEPAM-LK | 0 | 859.816.400 | (859.816.400) | (100,00) |
| BPPK | 14.968.991.611 | 8.437.230.829 | 6.531.760.782 | 77,42 |
| BKF | 3.789.214.387 | 0 | 3.789.214.387 | 0,00 |
| JUMLAH | 379.512.337.729 | 248.393.281.860 | 131.119.055.869 | 52,79 |

Aset Lain-lain sebesar **Rp379.512.337.729,00** seluruhnya merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Terdapat perbedaan saldo akhir akun Aset Tetap per 31 Desember 2012 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan (166112) pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar **Rp3.034.574.820,00** dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 133 berikut.

Tabel 133
Perbandingan Saldo Akhir Akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Dalam Kegiatan Operasional Pemerintahan pada Neraca SAK
dengan Laporan Posisi BMN di Neraca

| Unit Eselon I | SAK 31 Desember 2012 | SIMAK-BMN 31 Desember 2012 | Selisih (dalam rupiah) |
|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| SETJEN | 18.186.753.884 | 18.265.276.179 | (78.522.295) |
| ITJEN | 1.455.032.139 | 1.473.461.139 | (18.429.000) |
| DJA | 392.012.500 | 392.012.500 | 0 |
| DJP | 159.637.213.628 | 159.656.413.628 | (19.200.000) |
| DJBC | 109.986.144.883 | 110.645.900.133 | (659.755.250) |
| DJPK | 627.297.279 | 640.442.279 | (13.145.000) |
| DJPU | 0 | 0 | 0 |
| DJPB | 56.326.590.000 | 57.243.777.450 | (917.187.450) |
| DJKN | 14.143.087.418 | 14.143.087.418 | 0 |
| BAPEPAM-LK | 0 | 0 | 0 |
| BPPK | 14.968.991.611 | 16.225.257.436 | (1.256.265.825) |
| BKF | 3.789.214.387 | 3.861.284.387 | (72.070.000) |
| JUMLAH | 379.512.337.729 | 382.546.912.549 | (3.034.574.820) |

1. Selisih kurang pada Eselon I Setjen sebesar **Rp78.522.295,00** merupakan *write-off* nilai aset rusak berat yang hilang pada GKN Denpasar I, GKN Denpasar II, dan Kantor Pusat Setjen sebesar **Rp47.393.295,00**, dan aset BLU pada Pusat Investasi Pemerintah sebesar **Rp31.129.000,00** yang direklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan - BLU;
2. Selisih kurang sebesar **Rp18.429.000,00** pada Inspektorat Jenderal merupakan *write-off* 1 unit sepeda motor hilang yang belum diterbitkan SK penghapusan;
3. Selisih kurang sebesar **Rp19.200.000,00** pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan *write-off* 2 unit sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur yang hilang dan belum dihapuskan dari Laporan BMN masing-masing senilai **Rp11.200.000,00** dan **Rp8.000.000,00**;
4. Selisih kurang sebesar **Rp659.755.250,00** pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan *write-off* 5 Unit mobil hilang pada KPPBC Bogor **Rp147.680.000,00**, KPPBC Merak **Rp147.966.000,00**, KPPBC Tangerang **Rp138.380.000,00**, Kantor Pusat **Rp39.860.000,00**, KPPBC Purwakarta **Rp147.833.000,00**; 4 unit sepeda motor pada Kanwil DJBC Sumbagsel **Rp10.200.000,00**, KPPBC Bogor **Rp7.101.250,00**, KPPBC Lampung **Rp8.906.000,00** dan KPPBC Manado **Rp11.270.000,00**; serta terdapat senjata api yang hilang pada KPPBC Merauke sebesar **Rp559.000,00**;
5. Selisih kurang sebesar **Rp13.145.000,00** pada Ditjen Perimbangan Keuangan merupakan *write-off* 1 unit laptop merk Toshiba sebesar **Rp13.145.000,00**;
6. Selisih kurang sebesar **Rp917.187.450,00** pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan *write-off* 5 unit mobil hilang pada KP DJPB sebesar **Rp173.640.500,00**, KPPN Banjarnegara sebesar **Rp219.800.000,00**, KPPN Cirebon sebesar **Rp219.410.000,00**, Kanwil DJPB Provinsi Sumsel sebesar **Rp19.165.250,00**, dan Kanwil DJPB Provinsi Maluku sebesar **Rp31.500.000,00**; 5 unit sepeda motor hilang yaitu 4 unit pada KP DJPB senilai total **Rp57.759.700,00** dan 1 unit pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat sebesar **Rp9.952.000,00** dan *compact disc* yang hilang pada Kanwil DJPB Papua sebesar **Rp185.960.000,00**;

7. Selisih kurang sebesar **Rp1.256.265.825,00** pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan merupakan *write-off* Gedung B STAN yang telah dibongkar namun belum melalui mekanisme penghapusan sebesar **Rp1.232.052.825,00**, aset hilang berupa 1 unit laptop merk Toshiba yang belum dihapuskan sebesar **Rp16.600.000,00** dan reklassifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan - BLU sebesar **Rp7.613.000,00**.
8. Selisih kurang sebesar **Rp72.070.000,00** pada Badan Kebijakan Fiskal merupakan *write-off* Bangunan Gudang Arsip yang dihancurkan pada TA 2012 namun KMK Penghapusan Aset tersebut terbit pada bulan Januari 2013.

C.4.4. Aset Lain-lain - Badan Layanan Umum

Aset Lain-lain -
BLU
Rp38.742.000,00

Rincian Aset Lain-lain - BLU dapat dilihat pada Tabel 134 berikut.

Tabel 134
Aset Lain-lain - BLU per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | (dalam rupiah) | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
| SETJEN | 31.129.000 | 75.156.978.014 | (75.125.849.014) | (99,96) |
| BPPK | 7.613.000 | 7.514.000 | 99.000 | 1,32 |
| JUMLAH | 38.742.000 | 75.164.492.014 | (75.125.750.014) | (99,95) |

Aset Lain-lain - BLU pada Sekretariat Jenderal sebesar **Rp31.129.000,00** merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan-BLU yang dihentikan dari penggunaan karena kondisinya rusak berat dan menunggu proses penghapusan.

Aset Lain-lain - BLU pada BPPK sebesar **Rp7.613.000,00** merupakan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) serta dalam proses penghapusan. Penambahan Aset Lain-lain - BLU terjadi karena perbedaan nilai penghapusan aset hilang antara SAKPA dan SIMAK. Pada periode sebelumnya, terdapat penghapusan Aset Lain-lain - BLU pada SAKPA senilai **Rp150.569.000,00**, namun kondisi yang sebenarnya hanya senilai **Rp150.470.000,00** sehingga menimbulkan selisih **Rp99.000,00** yang ditambahkan pada saldo Aset Lain-lain - BLU pada SAKPA.

Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2011, Aset Lain-lain BLU mengalami penurunan signifikan sebesar Rp75.125.750.014,00. Penurunan tersebut terjadi karena serah terima *Endowment Fund* dari PIP sebagai satker pencatat sementara kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada LPDP, dana tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Pengelola Dana Lainnya.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp Rp814.697.948.478,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp814.697.948.478,00** dan **Rp806.982.593.139,00**. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka, Uang Muka dari KPPN, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada Tabel 135 berikut.

Tabel 135
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Utang kepada Pihak Ketiga | 39.060.216.445 | 17.174.929.541 | 21.885.286.904 | 127,43 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | 753.033.696.543 | 704.320.653.776 | 48.713.042.767 | 6,92 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 4.367.814.771 | 1.583.445.635 | 2.784.369.136 | 175,84 |
| Uang Muka | 0 | 4.155.000 | (4.155.000) | (100,00) |
| Uang Muka dari KPPN | 8.796.376.249 | 1.435.505.756 | 7.360.870.493 | 512,77 |
| Pendapatan Yang Ditangguhkan | 9.439.844.470 | 82.463.903.431 | (73.024.058.961) | (88,55) |
| Jumlah | 814.697.948.478 | 806.982.593.139 | 7.715.355.339 | 0,96 |

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp39.060.216.445,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp39.060.216.445,00** dan **Rp17.174.929.541,00**.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 136 berikut.

Tabel 136
Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| SETJEN | 269.901.750 | 2.697.798.197 | (2.427.896.447) | (90,00) |
| ITJEN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DJA | 1.415.022.900 | 870.463.992 | 544.558.908 | 62,56 |
| DJP | 16.572.048.275 | 7.659.369.008 | 8.912.679.267 | 116,36 |
| DJBC | 1.637.455.032 | 2.435.789.853 | (798.334.821) | (32,78) |
| DJKPK | 89.082.782 | 66.927.191 | 22.155.591 | 33,10 |
| DJPU | 154.377.905 | 49.682.201 | 104.695.704 | 210,73 |
| DJPB | 16.699.191.909 | 1.767.754.047 | 14.931.437.862 | 844,66 |
| DJKN | 236.613.630 | 315.178.998 | (78.565.368) | (24,93) |
| BAPEPAM-LK | 225.966.856 | 20.417.059 | 205.549.797 | 1.006,76 |
| BPPK | 876.940.652 | 1.102.054.949 | (225.114.297) | (20,43) |
| BKF | 883.614.754 | 189.494.046 | 694.120.708 | 366,30 |
| JUMLAH | 39.060.216.445 | 17.174.929.541 | 21.885.286.904 | 127,43 |

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2011, Utang Kepada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar **Rp21.885.286.904,00** atau **127,43** persen. Kenaikan terbesar terjadi pada Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, hal ini terkait dengan saldo kas selain uang persediaan yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran yang belum dibagikan kepada pihak lain.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada Tabel 137 berikut.

**Tabel 137
Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun
per 31 Desember 2012**

(dalam rupiah)

| Akun | Uraian Akun | 31 Desember 2012 |
|--------|--|------------------|
| 212111 | Belanja pegawai yang masih harus dibayar | 2.415.066.234 |
| 212112 | Belanja barang yang masih harus dibayar | 5.897.740.297 |
| 212113 | Belanja modal yang masih harus dibayar | |
| 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | 73.239.272 |
| 212191 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | 30.674.170.642 |
| | Jumlah | 39.060.216.445 |

C.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp753.033.696.543,
00*

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp753.033.696.543,00** dan **Rp704.320.653.776,00**. Nilai tersebut merupakan SPMKP per 31 Desember 2012 yang belum diterbitkan SP2D-nya di DJP dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir di DJBC.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 138 berikut.

**Tabel 138
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

(dalam rupiah)

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
| DJP | 749.662.687.283 | 702.376.172.734 | 47.286.514.549 | 6,73 |
| DJBC | 3.371.009.260 | 1.944.481.042 | 1.426.528.218 | 73,36 |
| JUMLAH | 753.033.696.543 | 704.320.653.776 | 48.713.042.767 | 6,92 |

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada Tabel 139 berikut.

**Tabel 139
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun
per 31 Desember 2012**

(dalam rupiah)

| Akun | Uraian Akun | 31 Desember 2012 |
|--------|---|------------------|
| 219111 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh | 291.560.917.605 |
| 219112 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM | 458.084.584.753 |
| 219114 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB | 17.184.925 |
| 219116 | Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk | 2.137.214.058 |
| 219117 | Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar | 1.233.795.202 |
| 219123 | Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya | |
| | Jumlah | 753.033.696.543 |

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp4.367.814.771,00

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp4.367.814.771,00** dan **Rp1.583.445.635,00**.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Tabel 140 berikut.

Tabel 140
Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | (dalam rupiah) |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| % | | | | |
| SETJEN | 1.085.667.136 | 682.709.621 | 402.957.515 | 59,02 |
| DJBC | 2.059.066.400 | 218.189.167 | 1.840.877.233 | 843,71 |
| DJPB | 24.583.333 | 20.828.097 | 3.755.236 | 18,03 |
| BPPK | 1.198.497.902 | 661.718.750 | 536.779.152 | 81,12 |
| JUMLAH | 4.367.814.771 | 1.583.445.635 | 2.784.369.136 | 175,84 |

1. Pendapatan Diterima Dimuka Setjen sebesar **Rp1.085.667.136,00** terdiri dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada GKN Yogyakarta, GKN Surabaya I, GKN Surabaya II, GKN Medan, GKN Palembang, GKN Banda Aceh, GKN Makassar dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Pendapatan Diterima Dimuka Ditjen Bea dan Cukai sebesar **Rp2.059.066.400,00** merupakan pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Kantor Pusat, KPPBC Bandung dan KPPBC Juanda;
3. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka DJPB sebesar **Rp24.583.333,00** merupakan sewa BMN (Gedung dan Bangunan) yang diterima dimuka pada KPPN Jakarta I sebesar **Rp13.333.333,00**, dan KPPN Cirebon sebesar **Rp11.250.000,00**.
4. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya BPPK pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebesar **Rp1.198.497.902,00**.

C.5.4. Uang Muka

Uang Muka Rp0,00

Nilai Uang Muka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp4.155.000,00**. Nilai tersebut merupakan uang muka yang berasal dari penarikan kembali kelebihan setoran sisa UP TA 2008 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada TA 2010.

Rincian Uang Muka dapat dilihat pada Tabel 141 berikut.

Tabel 141
Uang Muka per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | (dalam rupiah) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| % | | | | |
| DJPB | 0 | 4.155.000 | (4.155.000) | (100,00) |

C.5.5. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp8.796.376.249,00*

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp8.796.376.249,00** dan **Rp1.435.505.756,00**. Nilai tersebut merupakan saldo Uang

Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan selisih kurs yang belum terealisasi satker perwakilan/atase pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN dapat dilihat pada Tabel 142 berikut.

Tabel 142
Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | | | Kenaikan (Penurunan) | (dalam rupiah) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | | |
| SETJEN | 4.149.790.622 | (1.279.591.407) | 5.429.382.029 | (424,31) |
| ITJEN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DJA | 1.399.376.816 | 0 | 1.399.376.816 | 0,00 |
| DJP | 1.786.093.794 | 1.325.869.577 | 460.224.217 | 34,71 |
| DJBC | 319.651.040 | 991.716.122 | (672.065.082) | (67,77) |
| DJPK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DJPU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DJPB | 242.392.866 | 206.792.593 | 35.600.273 | 17,22 |
| DJKN | 279.532.097 | 190.631.871 | 88.900.226 | 46,63 |
| BAPEPAM-LK | 574.739.014 | 0 | 574.739.014 | 0,00 |
| BPPK | 44.800.000 | 87.000 | 44.713.000 | 51.394,25 |
| BKF | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH | 8.796.376.249 | 1.435.505.756 | 7.360.870.493 | 512,77 |

C.5.6. Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan yang
Ditangguhkan
Rp9.439.844.470,00*

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar **Rp9.439.844.470,00** dan **Rp82.463.903.431,00**. Nilai tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan dan pendapatan BLU yang dibatasi penggunaannya yang belum disahkan per 31 Desember 2012. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan dapat dilihat pada Tabel 143 berikut.

Tabel 143
Pendapatan yang Ditangguhkan per Unit Eselon I
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Unit Eselon I | (dalam rupiah) | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
| SETJEN | 1.373.780.852 | 76.913.137.633 | (75.539.356.781) | (98,21) |
| ITJEN | 0 | 4.537.500 | (4.537.500) | (100,00) |
| DJA | 14.780.303 | 0 | 14.780.303 | 0,00 |
| DJP | 71.138.894 | 27.735.915 | 43.402.979 | 156,49 |
| DJBC | 1.360.190.433 | 910.473.709 | 449.716.724 | 49,39 |
| DJPK | 374.788.740 | 0 | 374.788.740 | 0,00 |
| DJPU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DJPB | 147.684.800 | 138.689.827 | 8.994.973 | 6,49 |
| DJKN | 5.347.336.064 | 4.151.689.346 | 1.195.646.718 | 28,80 |
| BAPEPAM-LK | 745.695.356 | 315.151.750 | 430.543.606 | 136,61 |
| BPPK | 4.446.804 | 2.487.751 | 1.959.053 | 78,75 |
| BKF | 2.224 | 0 | 2.224 | 0,00 |
| JUMLAH | 9.439.844.470 | 82.463.903.431 | (73.024.058.961) | (88,55) |

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas Dana
Lancar
Rp52.249.880.732.
122,00*

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian Ekuitas Dana Lancar dapat dilihat pada Tabel 144 berikut.

Tabel 144
Rincian Ekuitas Dana Lancar
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | (dalam rupiah) | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | % |
| Cadangan Piutang | 49.076.505.292.934 | 60.326.557.849.853 | (11.250.052.556.919) | (18,65) |
| Cadangan Persediaan | 285.586.142.510 | 283.838.540.126 | 1.747.602.384 | 0,62 |
| Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | (774.134.999.714) | (717.825.069.672) | (56.309.930.042) | 7,84 |
| Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi | 83.498 | 0 | 83.498 | 0,00 |
| Dana Lancar BLU | 3.641.157.122.268 | 2.168.961.124.597 | 1.472.195.997.671 | 67,88 |
| Barang/Jasa yang Harus Diterima | 25.134.905.397 | 24.214.537.744 | 920.367.653 | 3,80 |
| Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan | (4.367.814.771) | (1.384.808.578) | (2.983.006.193) | 215,41 |
| Jumlah | 52.249.880.732.122 | 62.084.362.174.070 | (9.834.481.441.948) | (15,84) |

C.6.1. Cadangan Piutang

*Cadangan Piutang
Rp49.016.779.361.599,00*

Cadangan Piutang sebesar Rp49.016.779.361.599,00 merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang dan Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*).

Rincian Cadangan Piutang dapat dilihat pada Tabel 145 berikut.

Tabel 145
Rincian Cadangan Piutang
per 31 Desember 2012

| Akun | Uraian | (dalam rupiah) |
|------|--|----------------------|
| | | 31 Desember 2012 |
| 1151 | Piutang Pajak | 93.468.526.344.200 |
| 1152 | Piutang Bukan Pajak | 96.450.818.001 |
| 1141 | Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 1.801.187.869 |
| 1142 | Uang muka belanja | 0 |
| 1154 | Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 9.625.650.721 |
| 1157 | Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | 20.520.519.164 |
| 1158 | Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | 32.766.356.150 |
| 1161 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak | (44.550.942.630.944) |
| 1162 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | (51.808.973.643) |
| 1164 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR | (9.414.674.698) |
| 1166 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Keg Operasional BLU | (112.142.971) |
| 1167 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Keg Non Operasional BLU | (633.092.250) |
| | Jumlah | 49.016.779.361.599 |

C.6.2. Cadangan Persediaan

*Cadangan
Persediaan
Rp285.586.142.510,
00*

- Persediaan Rp 284.672.873.440,00
- Persediaan BLU Rp 913.269.070,00

C.6.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp774.134.999.714,00.

Rincian Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek dapat dilihat pada Tabel 146 berikut.

Tabel 146

| Akun | Uraian | (dalam rupiah) 31 Desember 2012 |
|--------|---|------------------------------------|
| 212111 | Belanja pegawai yang masih harus dibayar | (2.415.066.234) |
| 212112 | Belanja barang yang masih harus dibayar | (5.897.740.297) |
| 212113 | Belanja modal yang masih harus dibayar | 0 |
| 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | (73.239.272) |
| 212191 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | (12.715.257.368) |
| 219111 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh | (291.560.917.605) |
| 219112 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM | (458.084.584.753) |
| 219114 | Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB | (17.184.925) |
| 219116 | Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk | (2.137.214.058) |
| 219117 | Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar | (1.233.795.202) |
| 219123 | Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya | 0 |
| 219611 | Pendapatan yang Ditangguhkan | 0 |
| | Jumlah | (774.134.999.714) |

C.6.4. Keuntungan/Kerugian Yang Belum Terealisasi

Keuntungan/Kerugi
an yang Belum
Terealisasi
Rp83.498,00

Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi sebesar **Rp83.498,00** merupakan akun penyeimbang dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari selisih kurs.

C.6.5. Dana Lancar BLU

Dana Lancar BLU
Rp
Rp3.641.157.122.268,00

Dana Lancar BLU sebesar **Rp3.641.157.122.268,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Kas pada BLU.

C.6.6. Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang
Harus Diterima
Rp25.134.905.397,0
0

Barang/Jasa yang Harus Diterima sebesar **Rp25.134.905.397,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Uang Muka Belanja.

C.6.7. Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang
Harus Diserahkan
(Rp4.367.814.771,00)

Barang/Jasa yang Harus Diserahkan sebesar **(Rp4.367.814.771,00)** merupakan akun penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka.

C.7. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana
Investasi Rp
40.145.471.145.118
.00

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012.

Rincian Ekuitas Dana Investasi dapat dilihat pada Tabel 147 berikut.

Tabel 147
Rincian Ekuitas Dana Investasi
per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

| Uraian | 31 Desember 2012 | 31 Desember 2011 | Kenaikan (Penurunan) | (dalam rupiah) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | 39.244.462.867.245 | 37.731.845.000.870 | 1.512.617.866.375 | 4,01 |
| Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya | 901.008.277.873 | 726.219.529.526 | 174.788.748.347 | 24,07 |
| Jumlah | 40.145.471.145.118 | 38.458.064.530.396 | 1.687.406.614.722 | 4,39 |

C.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp39.244.462.867,2
45,00

Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar **Rp39.244.462.867,245,00** merupakan akun penyeimbang Aset Tetap.

C.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya
Rp901.008.277.873,
00

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar **Rp901.008.277.873,00** merupakan akun penyeimbang Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp170.783.795,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp900.837.494.078,00**.

D. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Penatausahaan Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Revaluasi Aset.

Aset DJP yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) berdasarkan temuan pemeriksaan BPK RI sebesar Rp195.330.450.986,00, DJP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa terhadap aset dimaksud, saat ini jumlah yang belum dinilai kembali adalah sebesar Rp13.084.481.413,00.
- 2) Terhadap aset-aset yang belum dinilai telah disampaikan kepada KPKNL terkait untuk segera dilakukan penilaian kembali.

b. Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.346.404 m², sebanyak 406 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
- 3) KPDJP telah memerintahkan kepada seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

c. Penertiban Rumah Dinas (Bangunan Tempat Tinggal).

Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya pengamanan baik secara administratif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

1. Upaya Administratif, yaitu:

- 1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
- 2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
- 4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
- 5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Desember 2009.

Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

2. Sengketa Pajak

Sengketa Pajak

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

| Jenis Ketetapan | Jumlah Ketetapan / Keputusa n/ Putusan | Nominal Ketetapan/Keputusan/Putusan | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Dalam Rp | Dalam USD | Total Rp |
| SKPKB/SKPKB T/ STP/SPPT/Keput usan/ Putusan Kurang Bayar | 117.176 | 45.488.621.154.852 | 1.017.497.068 | 55.327.817.799.607 |
| SKPLB/Keputus an/ Putusan Lebih Bayar | 1.999 | 17.411.257.439.641 | 388.567.940 | 21.168.709.416.540 |
| SKPN/Keputusa n/ Putusan Nihil | 1.323 | - | - | - |
| Jumlah | 120.498 | 62.899.878.594.493 | 1.406.065.007 | 76.496.527.216.147 |

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

| Jenis Sengketa Pajak | Jumlah Ketetapan/ Keputusan /Putusan | Nominal Ketetapan | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Dalam Rp | Dalam USD | Total Rp |
| Non Keberatan | 101.645 | 3.054.115.992.198 | 347.264.117 | 6.412.159.999.527 |
| Keberatan | 8.570 | 14.793.003.233.604 | 547.429.168 | 20.086.643.289.905 |
| Banding/Gugata n | 6.764 | 34.116.917.811.784 | 434.817.496 | 38.321.602.994.816 |
| Peninjauan Kembali | 3.519 | 10.935.841.556.907 | 76.554.227 | 11.676.120.931.900 |
| Jumlah | 120.498 | 62.899.878.594.493 | 1.406.065.007 | 76.496.527.216.147 |

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2012 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Jenis Pajak | Jumlah Sengketa Pajak | | | |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Jumlah Ketetapan/Keputusan/Putusan | Nilai Dalam Rp | Nilai Dalam USD | Total Dalam Rp |
| 1 | PPh Pasal 25 OP | 443 | 169.028.493.872 | 0,00 | 169.028.493.872 |
| 2 | PPh Pasal 25 Badan | 3.348 | 22.584.464.722.204 | 1.139.314.013 | 33.601.631.224.182 |
| 3 | PPh Pasal 21 | 1.023 | 1.062.829.572.466 | 0,00 | 1.062.829.572.466 |
| 4 | PPh Pasal 22 | 81 | 67.520.599.241 | 0,00 | 67.520.599.241 |
| 5 | PPh Pasal 23 | 1.358 | 2.536.350.270.370 | 0,00 | 2.536.350.270.370 |
| 6 | PPh Pasal 26 | 889 | 6.226.280.167.557 | 265.588.012 | 8.794.516.239.729 |
| 7 | PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb) | 852 | 809.802.021.643 | 201.635 | 811.751.834.027 |
| 8 | PPN | 15.827 | 28.355.184.382.838 | 0,00 | 28.355.184.382.838 |
| 9 | PPn BM | 103 | 408.445.541.809 | 0,00 | 408.445.541.809 |
| 10 | Bunga Penagihan | 317 | 137.385.761.093 | 0,00 | 137.385.761.093 |
| 11 | PKK | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | PBB Sektor Pedesaan | 73.286 | 7.752.084.403 | 0,00 | 7.752.084.403 |
| 13 | PBB Sektor Perkotaan | 22.682 | 28.629.054.597 | 0,00 | 28.629.054.597 |
| 14 | PBB Sektor Perkebunan | 169 | 103.616.164.814 | 0,00 | 103.616.164.814 |
| 15 | PBB Sektor Perhutanan | 33 | 30.294.915.603 | 0,00 | 30.294.915.603 |
| 16 | PBB Sektor Pertambangan Non Migas | 85 | 340.608.653.894 | 961.348 | 349.904.889.054 |
| 17 | PBB Sektor Pertambangan Migas | 1 | 31.686.188.090 | 0,00 | 31.686.188.090 |
| 18 | BPHTB | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Jumlah | 120.498 | 62.899.878.594.494 | 1.406.065.007 | 76.496.527.216.147 |

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan kantor wilayah per 31 Desember 2012 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

| No | Kanwil DJP | Jumlah Ketetapan/Keputusan /Putusan | Total Dalam Rp |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Kanwil DJP Nanggroe Aceh | 245 | 123.351.911.559 |
| 2 | Kanwil DJP Sumatera Utara I | 362 | 445.295.544.037 |
| 3 | Kanwil DJP Sumatera Utara II | 476 | 92.465.628.507 |
| 4 | Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau | 592 | 495.246.243.830 |
| 5 | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi | 73.947 | 163.441.686.681 |
| 6 | Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung | 1.743 | 825.899.435.609 |
| 7 | Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung | 372 | 146.984.116.758 |
| 8 | Kanwil DJP Jakarta Pusat | 1.457 | 3.505.877.426.916 |
| 9 | Kanwil DJP Jakarta Barat | 545 | 490.993.032.029 |
| 10 | Kanwil DJP Jakarta Selatan | 1.148 | 3.453.217.035.007 |
| 11 | Kanwil DJP Jakarta Timur | 898 | 480.928.605.244 |
| 12 | Kanwil DJP Jakarta Utara | 425 | 444.632.003.712 |
| 13 | Kanwil DJP Jakarta Khusus | 5.207 | 17.192.295.845.353 |
| 14 | Kanwil DJP Banten | 1.511 | 494.015.512.751 |
| 15 | Kanwil DJP Jawa Barat I | 1.243 | 490.020.242.794 |
| 16 | Kanwil DJP Jawa Barat II | 1.329 | 952.257.988.589 |
| 17 | Kanwil DJP Jawa Tengah I | 939 | 238.575.787.722 |
| 18 | Kanwil DJP Jawa Tengah II | 406 | 161.227.002.567 |
| 19 | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta | 444 | 31.593.158.976 |
| 20 | Kanwil DJP Jawa Timur I | 709 | 221.135.060.500 |
| 21 | Kanwil DJP Jawa Timur II | 782 | 299.730.614.295 |
| 22 | Kanwil DJP Jawa Timur III | 897 | 166.857.189.792 |
| 23 | Kanwil DJP Kalimantan Barat | 2.640 | 91.990.322.122 |
| 24 | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah | 916 | 709.814.148.302 |
| 25 | Kanwil DJP Kalimantan Timur | 317 | 410.850.686.801 |
| 26 | Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara | 747 | 195.776.546.080 |
| 27 | Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara | 16.294 | 41.944.143.798 |
| 28 | Kanwil DJP Bali | 446 | 195.853.539.245 |
| 29 | Kanwil DJP Nusa Tenggara | 456 | 51.249.279.218 |
| 30 | Kanwil DJP Papua Dan Maluku | 194 | 658.022.809.274 |
| 31 | Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | 2.811 | 43.224.984.668.079 |
| | JUMLAH | 120.498 | 76.496.527.216.147 |

3. PBB Pertambangan Migas

PBB
Pertambangan
Migas

Pemungutan PBB terutang kepada Wajib Pajak didahului dengan penerbitan SPPT kepada Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang yang tercantum dalam SPPT tersebut. Khusus terhadap Wajib Pajak KKKS atau PBB Pertambangan Migas, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari Wajib Pajak pada umumnya, karena Wajib Pajak terikat pada kontrak dengan pemerintah sehingga diberlakukan lex specialist.

Dalam pemungutan PBB Wajib Pajak KKKS terdapat beberapa institusi yang terkait dalam pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang kepada Wajib Pajak KKKS, yaitu DJP, BP Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak KKKS yang sudah berproduksi wajib menyetorkan prosentase tertentu sesuai kontrak karya dari net operating income (NOI) ke pemerintah;
- b. Bagian pemerintah tersebut akan dikurangi dengan unsur-unsur pajak yaitu PPN reimbursement, Pajak Bumi dan Bangunan, dan PDRD;
- c. PBB tersebut dibayarkan ke daerah melalui mekanisme pemindahbukuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
- d. Setiap awal tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ketetapan sementara besarnya pajak terhadap objek pajak pertambangan migas dan pada membuat ketetapan rampung berdasarkan SPPT;
- e. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukunya ke Direktur Jenderal Anggaran;
- f. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- g. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mintra KPPN Jakarta II;
- h. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.
- i. Pengungkapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penerimaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut:

1) PBB Migas

- a. Telah dilakukan pembayaran PBB Migas tahun 2011 atas Kontraktor CBM (*coalbed methane*) sebesar Rp186.989.438.000,00.
- b. Ketetapan PBB Migas tahun 2012 sebesar Rp21.385.938.328.078,00, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • PBB Migas <i>Onshore</i> | : Rp 2.782.850.484.279,00 |
| • PBB Migas <i>Offshore</i> | : Rp 5.990.031.367.059,00 |
| • PBB Migas Tubuh Bumi | : <u>Rp12.613.074.476.740,00</u> |

Total PBB Migas 2012 : Rp21.385.956.328.078,00
- c. Realisasi pembayaran PBB Migas tahun 2012 sebesar Rp19.427.128.685.369,00, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

| | |
|-------------|--------------------------------|
| ▪ Tahap I | : Rp 8.437.646.318.618,00 |
| ▪ Tahap II | : Rp10.651.063.312.919,00 |
| ▪ Tahap III | : <u>Rp 338.419.053.832,00</u> |

Total PBB Migas 2012 : Rp19.427.128.685.369,00

2) PBB Panas Bumi

- a. Ketetapan PBB Panas Bumi Tahun 2012 sebesar Rp185.364.925.550,00, dengan rincian:
 - PBB Panas Bumi *Onshore* : Rp 69.978.731.833,00
 - PBB Panas Bumi Tubuh Bumi : Rp115.386.193.717,00
 - Total PBB Panas Bumi 2012 : Rp185.364.925.550,00
- b. Realisasi pembayaran PBB Panas Bumi Tahun 2012 sebesar Rp179.196.585.210,00.

4. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

*Pengalihan
BPHTB dan P2*

Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
- b. DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
- c. DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
- d. Tahapan pengalihan PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
- e. Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Daftar Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

| No. | Kabupaten/Kota | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) |
|-----|------------------------|--|
| 1 | Kota Bandar Lampung | KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung |
| 2 | Kota Palu | KPP Pratama Palu |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Selatan |
| 4 | Kabupaten Gresik | KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Selatan |
| 5 | Kota Balikpapan | KPP Pratama Balikpapan |
| 6 | Kota Samarinda | KPP Pratama Samarinda |
| 7 | Kota Medan | KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. |
| 8 | Kabupaten Deli Serdang | KPP Pratama Lubuk Pakam |
| 9 | Kota Yogyakarta | KPP Pratama Yogyakarta |

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| 10 | Kabupaten Sukoharjo | KPP Pratama Sukoharjo |
| 11 | Kota Semarang | KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Tengah Satu, KPP Pratama Semarang Tengah Dua, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Gayamsari |
| 12 | Kota Depok | KPP Pratama Depok |
| 13 | Kabupaten Bogor | KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Ciawi |
| 14 | Kota Pekanbaru | KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Pekanbaru Tampan |
| 15 | Kota Pontianak | KPP Pratama Pontianak |
| 16 | Kota Gorontalo | KPP Pratama Gorontalo |
| 17 | Kota Palembang | KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |

Daftar Kabupaten/Kota yang akan Melakukan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013

| NO | KANWIL DJP | KPP PRATAMA | KABUPATEN/KOTA | NILAI PIUTANG cfm. LP3 PBB |
|----------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Aceh | KPP Pratama Banda Aceh | Kota Banda Aceh | 35.716.021.043 |
| 2 | Bengkulu Lampung | KPP Pratama Arga Makmur | Kabupaten Bengkulu Utara | 3.804.867.262 |
| | | KPP Pratama Metro | Kabupaten Lampung Tengah | 39.959.074.800 |
| | | KPP Pratama Kotabumi | Kabupaten Way Kanan | 2.178.551.233 |
| | | KPP Pratama Kotabumi | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.338.260.876 |
| | | KPP Pratama Metro | Kota Metro | 6.744.324.320 |
| | | KPP Pratama Arga Makmur | Kabupaten Mukomuko | 1.628.312.514 |
| 3 | Sumatera Barat dan Jambi | KPP Pratama Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | 22.326.955.141 |
| | | KPP Pratama Jambi | Kabupaten Batang Hari* | 9.592.227.421 |
| | | KPP Pratama Payakumbuh | Kabupaten Tanah Datar | 15.360.741.136 |
| | | KPP Pratama Bangko | Kabupaten Merangin | 9.684.272.572 |
| | | KPP Pratama Padang | Kota Padang | 136.172.152.654 |
| 4 | Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung | KPP Pratama Tanjung Pandan | Kabupaten Belitung Timur* | 1.226.290.146 |
| | | KPP Pratama Sekayu | Kabupaten Musi Banyuasin* | 13.817.010.432 |
| | | KPP Pratama Pangkal Pinang | Kota Pangkalpinang | 12.507.596.078 |
| 5 | Sumatera Utara I | KPP Pratama Binjai | Kota Binjai* | 21.682.788.805 |
| 6 | Sumatera Utara II | KPP Pratama Tebing Tinggi | Kabupaten Serdang Bedagai* | 20.387.453.963 |
| | | KPP Pratama Kisaran | Kabupaten Asahan* | 23.963.604.537 |
| | | KPP Pratama Rantau Prapat | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 15.254.401.251 |
| | | KPP Pratama Pematang Siantar | Kabupaten Simalungun | 45.130.386.879 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | KPP Pratama Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar | 22.749.011.436 |
| | | KPP Pratama Kisaran | Kabupaten Batubara | 12.699.711.384 |
| | | KPP Pratama Sibolga | Kota Sibolga | 4.629.265.354 |
| 7 | Riau dan Kepulauan Riau | KPP Pratama Dumai | Kabupaten Rokan Hilir* | 16.834.846.203 |
| | | KPP Pratama Batam | Kota Batam | 191.946.410.120 |
| | | KPP Pratama Rengat | Kabupaten Indragiri Hulu* | 20.202.435.904 |
| | | KPP Pratama Tanjungpinang | Kota Tanjungpinang | 32.351.813.137 |
| | | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | Kabupaten Siak* | 7.429.231.190 |
| | | KPP Pratama Bangkinang | Kabupaten Kampar | 64.446.063.383 |
| | | KPP Pratama Bangkinang | Kabupaten Rokan Hulu | 32.325.979.977 |
| | | KPP Pratama Rengat | Kabupaten Kuantan Singingi | 12.697.520.770 |
| | | KPP Pratama Dumai | Kota Dumai | 24.318.855.797 |
| | | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan | 17.664.946.596 |
| 8 | Kanwil DJP Jakarta Pusat | Kanwil DJP Jakarta Pusat | Provinsi DKI Jakarta | 372.277.161.731 |
| 9 | Kanwil DJP Jakarta Barat | Kanwil DJP Jakarta Barat | | 664.914.508.311 |
| 10 | Kanwil DJP Jakarta Selatan | Kanwil DJP Jakarta Selatan | | 1.299.263.829.726 |
| 11 | Kanwil DJP Jakarta Timur | Kanwil DJP Jakarta Timur | | 805.553.924.267 |
| 12 | Kanwil DJP Jakarta Utara | KPP Pratama Jakarta Penjaringan | | 702.066.277.317 |
| 13 | Banten | KPP Pratama Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | 33.803.407.827 |
| 14 | Jawa Barat I | KPP Pratama Bandung Tegallega | Kota Bandung* | 98.293.412.815 |
| | | KPP Pratama Bandung Bojanagara | | 147.159.711.241 |
| | | KPP Pratama Cicadas | | 130.623.694.723 |
| | | KPP Pratama Bandung Karees | | 112.133.769.181 |
| | | KPP Pratama Bandung Cibeunying | | 217.264.401.270 |
| | | KPP Pratama | Kabupaten Bandung | 156.950.422.853 |

| | | | | |
|----|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Soreang | | |
| | | KPP Pratama Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya* | 5.928.533.225 |
| | | KPP Pratama Majalaya | Kabupaten Bandung* | 163.809.172.951 |
| | | KPP Pratama Cimahi | Kabupaten Bandung Barat* | 162.979.516.098 |
| | | KPP Pratama Sukabumi | Kabupaten Sukabumi | 166.555.377.760 |
| | | KPP Pratama Cimahi | Kota Cimahi* | 98.335.325.747 |
| | | KPP Pratama Ciamis | Kota Banjar* | 1.248.357.587 |
| 15 | Jawa Barat II | KPP Pratama Karawang Utara | Kabupaten Karawang* | 167.011.724.620 |
| | | KPP Pratama Karawang Selatan | | 143.715.815.930 |
| | | KPP Pratama Cikarang Utara | Kabupaten Bekasi | 73.784.315.256 |
| | | KPP Pratama Cikarang Selatan | | 117.296.397.803 |
| | | KPP Pratama Cibitung | | 124.638.570.025 |
| | | KPP Pratama Bogor | Kota Bogor* | 180.376.839.263 |
| | | KPP Pratama Kuningan | Kabupaten Majalengka* | 6.316.252.661 |
| | | KPP Pratama Cirebon | Kota Cirebon | 46.774.831.434 |
| | | KPP Pratama Bekasi Selatan | Kota Bekasi | 227.648.698.227 |
| | | KPP Pratama Bekasi Utara | | 103.463.774.256 |
| 16 | DIY | KPP Pratama Bantul | Kabupaten Bantul* | 58.144.699.240 |
| | | KPP Pratama Sleman | Kabupaten Sleman* | 162.736.966.326 |
| 17 | Jawa Tengah I | KPP Pratama Demak | Kabupaten Demak* | 7.313.458.851 |
| | | KPP Pratama Pekalongan | Kota Pekalongan* | 25.560.775.216 |
| | | KPP Pratama Pati | Kota Rembang | 13.109.850.519 |
| | | KPP Pratama Blora | Kabupaten Grobogan | 5.566.071.717 |
| | | KPP Pratama Salatiga | Kabupaten Semarang* | 32.227.070.484 |
| | | KPP Pratama Tegal | Kota Tegal* | 11.959.250.649 |
| | | KPP Pratama Pekalongan | Kota Pemalang | 16.975.885.114 |
| | | KPP Pratama Tegal | Kabupaten Tegal | 25.228.289.665 |
| | | KPP Pratama Batang | Kabupaten Batang | 10.582.956.586 |
| | | KPP Pratama Pekalongan | Kabupaten Pekalongan | 13.364.027.495 |
| | | KPP Pratama Kudus | Kabupaten Kudus | 11.278.014.890 |
| 18 | Jawa Tengah II | KPP Pratama Purwokerto | Kabupaten Banyumas | 110.758.935.415 |
| | | KPP Pratama Temanggung | Kabupaten Wonosobo* | 11.119.493.757 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | KPP Pratama Klaten | Kabupaten Klaten* | 38.766.043.027 |
| | | KPP Temanggung | Kabupaten Temanggung* | 14.077.776.889 |
| | | KPP Pratama Surakarta | Kota Surakarta* | 141.241.136.549 |
| | | KPP Pratama Cilacap | Kabupaten Cilacap | 70.811.693.328 |
| | | KPP Pratama Magelang | Kota Magelang | 7.478.570.173 |
| | | KPP Pratama Magelang | Kabupaten Magelang | 114.128.691.537 |
| | | KPP Pratama Purworejo | Kabupaten Purworejo | 8.448.990.556 |
| | | KPP Pratama Karanganyar | Kabupaten Karanganyar | 36.408.877.069 |
| | | KPP Pratama Boyolali | Kabupaten Boyolali | 23.806.764.695 |
| | | KPP Pratama Kebumen | Kabupaten Kebumen | 19.003.351.139 |
| 19 | Jawa Timur II | KPP Pratama Mojokerto | Kota Mojokerto* | 7.166.908.494 |
| | | KPP Pratama Mojokerto | Kabupaten Mojokerto* | 28.159.006.077 |
| | | KPP Pratama Bojonegoro | Kabupaten Bojonegoro* | 8.169.455.650 |
| | | KPP Pratama Tuban | Kabupaten Tuban* | 7.044.897.344 |
| | | KPP Pratama Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | 1.303.491.510 |
| 20 | Jawa Timur III | KPP Pratama Jember | Kabupaten Jember* | 81.775.497.363 |
| | | KPP Pratama Kediri | Kota Kediri* | 24.252.959.341 |
| | | KPP Pratama Malang Utara | Kota Malang* | 53.472.789.614 |
| | | KPP Pratama Malang Selatan | | 56.876.085.638 |
| | | KPP Pratama Pasuruan | Kabupaten Pasuruan* | 118.367.181.185 |
| | | KPP Pratama Pare | Kabupaten Kediri | 18.758.292.317 |
| | | KPP Pratama Batu | Kota Batu | 14.764.577.225 |
| | | KPP Pratama Probolinggo | Kota Probolinggo | 9.904.573.047 |
| | | KPP Pratama Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi | 33.204.105.249 |
| | | KPP Pratama Pasuruan | Kota Pasuruan | 11.874.774.813 |
| 21 | Bali | KPP Pratama Badung Selatan | Kabupaten Badung | 146.630.439.452 |
| | | KPP Pratama Badung Utara | | 59.053.687.555 |
| | | KPP Pratama Denpasar Barat | Kota Denpasar | 98.681.870.394 |
| | | KPP Pratama Denpasar Timur | | 130.834.089.157 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | KPP Pratama Tabanan | Kabupaten Jembrana | 23.410.468.217 |
| | | KPP Pratama Tabanan | Kabupaten Tabanan | 48.179.243.402 |
| 22 | Nusa Tenggara | KPP Pratama Praya | Kabupaten Lombok Barat | 26.928.469.754 |
| | | KPP Pratama Mataram Barat | Kota Mataram | 28.648.773.271 |
| | | KPP Pratama Mataram Timur | | 15.566.170.042 |
| 23 | Kalimantan Barat | KPP Pratama Pontianak | Kabupaten Kubu Raya* | 31.650.349.644 |
| 24 | Kalimantan Timur | KPP Pratama Tarakan | Kota Tarakan | 31.437.470.212 |
| | | KPP Pratama Bontang | Kota Bontang | 22.741.276.034 |
| | | KPP Pratama Tanjung Redeb | Kabupaten Berau | 14.358.029.274 |
| | | KPP Pratama Tenggarong | Kabupaten Kutai Barat | 8.748.602.750 |
| 25 | Kalimantan Selatan dan Tengah | KPP Pratama Banjarmasin | Kota Banjarmasin* | 68.849.048.619 |
| | | KPP Pratama Sampit | Kabupaten Katingan | 2.311.330.386 |
| 26 | Sulawesi Selatan, barat, dan Tenggara | KPP Pratama Bantaeng | Kabupaten Gowa* | 17.513.256.309 |
| | | KPP Pratama Kolaka | Kabupaten Kolaka* | 12.656.073.202 |
| | | KPP Pratama Makassar Selatan | Kota Makassar | 39.012.714.154 |
| | | KPP Pratama Makassar Utara | | 69.483.177.388 |
| | | KPP Pratama Makassar Barat | | 33.319.226.036 |
| 27 | Papua dan Maluku | KPP Pratama Timika | Kabupaten Mimika* | 10.902.207.393 |
| | | KPP Pratama Sorong | Kabupaten Fak Fak | 1.793.675.545 |
| JUMLAH | | | | 9.836.861.292.363 |

5. Siaran Pers DJP Mengenai Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Pajak Asian Agri

Siaran Pers Asian Agri

Dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Januari 2013 menginformasikan mengenai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan cassasi Jaksa/ Penuntut Umum dengan Putusan MA Nomor 2239.K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dalam petikan putusannya sesuai informasi dari siaran pers tersebut, MA menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Dalam siaran pers juga informasikan bahwa kepada terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan mensyaratkan dalam 1

(satu) tahun sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar Rp2.519.995.391.304,- (Dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima ratus tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.

6. Pungutan Ekspor/Bea Keluar

*Pungutan
Ekspor/Bea Keluar*

- a. Mutasi pungutan ekspor selama Tahun 2012 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

| AKUN | Saldo Awal 12/31/2011 | Koreksi | Mutasi | | | Saldo Akhir 12/31/2012 |
|---|--------------------------|---------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | Penambahan | Reklasifikasi | Pembayaran(Realisasi Restitusi) | |
| ASET LANCAR Piutang PE | 124,151,001,519 | | | | - | 124,151,001,519 |
| ASET LAIN-LAIN Piutang PE (DJKN) | - | | | | - | - |
| KEWAJIBAN UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN BK | 1,944,480,942 | | | | 710,685,840 | 1,233,795,102 |

1) Piutang Pungutan Ekspor

Saldo piutang pungutan ekspor per 31 Desember 2012 tidak mengalami perubahan dari posisi saldo per 31 Desember 2011.

2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-18/BC/2011 tentang Pelaksanaan Penyisihan Piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kualitas piutang PE per 31 Desember 2012 dikategorikan sebagai piutang macet karena telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL .

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (Utang Kelebihan Pembayaran Bea Keluar)

Saldo utang kelebihan pembayaran bea keluar per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.233.795.102,00 dan Rp1.944.480.942,00 atau turun sebesar Rp710.685.840,00 karena adanya realisasi pengembalian pada KPPBC Dumai yang terdiri atas:

| No | Satker | Perusahaan (Eksporir) | Persetujuan Pengembalian | SP2D | Nilai |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | KPPBC Dumai | PT Intibenua Perkasatama | KEP-63/KM.02/2008; | 500209C tgl. 12/27/2012 | 58,238,104 |
| | | | KEP-72/KM.02/2008 | 500210C tgl. 12/27/2012 | 266,565,176 |
| 2 | KPPBC Dumai | PT Multimas Nabati Asahan | KEP-78/KM.02/2008 | 500211C tgl. 12/27/2012 | 385,882,560 |
| JUMLAH | | | | | 710,685,840 |

Adapun rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Bea Keluar per 31 Desember 2012 yaitu:

| No | Satker | Perusahaan (Eksporir) | Persetujuan Pengembalian | Nilai |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | KPPBC Balikpapan | PT Bayan Resources | No.627 tgl 7/12/2009 | 939.519.412 |
| 2 | KPPBC Balikpapan | PT Gunung Bayan Pratama Coal | No.659 tgl 16/12/2009 | 33.693.613 |
| 3 | KPPBC Dumai | PT Bukit Kapur Reksa | KEP-82/KM.02/2008 | 116.000.280 |
| | | | KEP-53/KM.02/2008 | 144.581.797 |
| JUMLAH | | | | 1.233.795.102 |

7. Pengelolaan Barang Hasil Tegahan, Sitaan/Rampasan, Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008, kriteria dari Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah sebagai berikut.

1) Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah:

- a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau Barang yang dikirim melalui Pos :
 - 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
 - 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

2) Barang yang Dikuasai Negara adalah :

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau dieksport yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai;atau
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

3) Barang yang Menjadi Milik Negara adalah:

- a. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk dieksport atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk dieksport atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- e. Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau dieksport;atau
- f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Atas barang yang menjadi milik negara yang dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan adalah barang yang telah memiliki status akan dilelang dan sudah mendapat keputusan dari Menteri Keuangan. Sedangkan barang yang berstatus dihibahkan, dimusnahkan dan barang yang belum ada peruntukannya hanya diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai lampiran. Hal ini karena barang-barang tersebut berada dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai, tetapi belum ada keputusan dari Menteri Keuangan tentang peruntukannya.

Berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari penjualan hasil sitaan/tegahan masih disajikan secara netto. Kebijakan tersebut diambil melalui surat Sekretaris DJBC ke Kementerian Keuangan nomor S-260/BC.1/2009 tanggal 12 Juni 2009, dan telah dijawab oleh Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan suratnya nomor S-684/SJ.3/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

a Untuk barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Pelelangan Permenkeu Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 yang mengatur bahwa :

1. Harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara yang akan dilelang paling sedikit, meliputi:
 - a) Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Ps 22;
 - b) Sewa gudang TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
 - c) Sewa gudang di TPP;
 - d) Biaya pencacahan dan penimbunan di Tempat Penimbunan Pabean.
2. Hasil pelelangan setelah dikurangi bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22, sewa gudang serta biaya-biaya yang dikeluarkan, sisanya disediakan untuk pemiliknya.

Apabila atas sisa hasil lelang barang tidak dikuasai dan atau barang dikuasai negara sampai dengan 90 hari sejak tanggal pelelangan tidak diambil oleh pemiliknya, maka atas hasil pelelangan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

b. Untuk barang yang menjadi milik negara, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditetapkan bahwa hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.

Merujuk rekomendasi dapat diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap pendapatan hasil penjualan hasil lelang barang yang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara, dikecualikan dari azas bruto dalam pencatatan pendapatannya, karena terhadap barang tersebut masih melekat hak keuangan negara seperti pungutan pabean dan PDRI, dan utang pada pihak ketiga seperti sewa gudang, biaya lelang dsb, sehingga atas biaya biaya tersebut dikurangkan terlebih dahulu dari dari pendapatan penjualan hasil lelang (azas netto). Apabila atas sisa hasil lelang barang tidak dikuasai dan atau barang dikuasai negara sampai dengan 90 hari sejak tanggal pelelangan tidak diambil

oleh pemiliknya, maka atas hasil pelelangan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- 2) Pemberlakukan azas bruto dalam pelaksanaaan penjualan barang tegahan/barang milik negara, DJBC mengalami kendala-kendala antara lain:
 - a) Bawa untuk pengalokasian biaya lelang harus menunggu tahun berikutnya, karena atas usulan RKAK/L harus dibuat pada awal tahun sebelumnya.
 - b) Kesulitan dalam memprediksikan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk biaya lelang, karena frekuensi dan jumlah barang yang akan dilelang dalam satu tahun anggaran sulit untuk diprediksikan.
 - c) Dengan mengalokasikan sebagian anggaran DJBC yang terbatas untuk biaya pelelangan, akan dapat mempengaruhi pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama DJBC.

Saat ini atas pelaksanaaan penjualan barang tegahan/barang milik negara telah menggunakan azaz bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 Tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, di mana dalam pasal 22 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat Lelang merupakan harga Lelang.
- (2) Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga BMN;
 - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
 - c. sewa gudang di TPP;
 - d. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP; dan
 - e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN.
- (3) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang BMN sesuai harga Lelang BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetor seluruhnya ke kas negara.
- (4) Hasil Lelang yang merupakan bagian dari harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disediakan untuk yang berhak.

Sebagai petunjuk pelaksanaaan penyetoran PNBP dimaksud telah dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-1388/BC/2011 tanggal 30 Desember 2011 hal Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran PNBP Atas Hasil Lelang Barang Menjadi Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 02 paragraf 24 dinyatakan bahwa dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Merujuk pada PSAP tersebut maka penerimaan hasil lelang barang tegahan/barang menjadi milik negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disajikan secara netto termasuk yang dikecualikan dari ketentuan penyajian pendapatan berdasarkan azas bruto.

Selama Tahun Anggaran 2011 jumlah pendapatan hasil lelang yang tercatat di SAKPA sebesar Rp21.940.453.434,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Realiasasi Pendapatan Penjualan hasil sitaan/rampasan (423114) senilai Rp21.114.479.434,00.
2. Hasil pelelangan atas Barang Menjadi Negara yang disetorkan dengan akun yang salah, yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan senilai Rp559.034.000,00 disetorkan dengan akun Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan (423129) dan
3. Senilai Rp266.940.000,00 merupakan pendapatan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta disetorkan dengan akun Pendapatan Pabean Lainnya (412119). Berikut ini disajikan rincian data penerimaan hasil lelang per pelaksanaan lelang.

| Nama Kantor | Tanggal Pelaksanaan Lelang | Hasil Terbentuk | Sewa TPP | Bea Lelang Penjual | Jasa Pra Lelang | Biaya Pencacahan | Hasil Bersih Lelang | Nilai Tercatat di SAKPA |
|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(2)-(3)-(4) | (8) | |
| KPPBC BELAWAN | 28/04/2011 | 705.000.000 | 145.866.000 | 100.000 | - | - | 559.034.000 | 559.034.000 |
| KPPBC BANDAR LAMPUNG | - | - | - | - | - | - | 22.755.000 | 22.755.000 |
| KPPBC SOEKARNO HATTA | 17/03/2011 | 307.100.000 | 40.060.000 | 100.000 | - | - | 266.940.000 | 266.940.000 |
| KPPBC SOEKARNO HATTA | 27/07/2011 | 1.743.000.000 | 184.664.000 | 100.000 | - | - | 1.558.236.000 | 1.558.236.000 |
| KPPBC BOGOR | 14/02/2011 | 78.967.000 | 61.646.000 | - | - | - | 17.321.000 | 17.321.000 |
| KPPBC BOGOR | 20/04/2011 | 1.610.985.000 | 252.766.608 | - | 240.660.000 | - | 1.358.218.392 | 1.117.558.392 |
| KPPBC JUANDA | 31/05/2011 | 585.165.000 | 125.283.000 | 100.000 | 105.329.700 | 14.629.125 | 459.782.000 | 459.782.000 |
| KPPBC BANJARMASIN | 07/12/2011 | 1.681.000.000 | - | 100.000 | 302.580.000 | 42.025.000 | 1.680.900.000 | 1.680.900.000 |
| KPU BC TANJUNG PRIOK | - | - | - | - | - | - | 16.257.927.042 | 16.257.927.042 |
| JUMLAH | | 6.711.217.000 | 664.419.608 | 500.000 | 648.569.700 | 56.654.125 | 22.181.113.434 | 21.940.453.434 |

Jaminan Tunai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan, definisi jaminan dalam rangka kepabeanan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.

Jaminan dalam rangka kepabeanan dapat berbentuk:

- a. Jaminan tunai;
- b. Jaminan bank;
- c. Jaminan dari perusahaan asuransi; atau
- d. Jaminan Indonesia Exim Bank;
- e. Jaminan perusahaan penjaminan;
- f. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*); atau
- g. Jaminan tertulis.

Jaminan dapat digunakan untuk:

- a. menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan:
 - 1) atas impor yang diberikan penundaan pembayaran;
 - 2) atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
 - 3) atas impor sementara;
 - 4) atas pengajuan keberatan;
 - 5) yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan;
- b. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar:

- a. pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau
- b. jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

- Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu:
- izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
 - izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
 - pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
 - izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor;
 - paling lama diputuskannya keberatan; atau
 - yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Jaminan tunai merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean dan harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean. Dalam hal Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean. Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:

- menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean; dan/atau
- menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.

Atas setiap uang tunai yang diterima, bendahara penerimaan di Kantor Pabean harus menyimpan ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja berikutnya. Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker. Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain bertanggung jawab atas rekening Bendahara Penerimaan pada beberapa satker Bendahara Penerimaan juga bertanggung jawab atas rekening Jaminan Tunai. Jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan mengajukan keberatan atau banding atas penetapan DJBC. Atas uang jaminan ini tidak disajikan dalam neraca karena uang tersebut bukan hak negara. Adapun rincian jaminan tunai per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

Jaminan Tunai per 31 Desember 2012 pada DJBC

| KODE KANWIL | SATKER | SATKER | NILAI |
|---------------|--------|----------------------|------------------------|
| 002 | 410951 | KPPBC MEDAN | 59,612,000 |
| 002 | 410976 | KPPBC TELUK NIBUNG | 8,000,000 |
| 002 | 411651 | KPPBC BELAWAN | 24,058,787,548 |
| 003 | 411033 | KPPBC DUMAI | 3,215,000,000 |
| 003 | 411042 | KPPBC PEKANBARU | 56,165,476 |
| 005 | 411130 | KPPBC JAMBI | 500,000 |
| 005 | 411702 | KPPBC PALEMBANG | 208,695,250 |
| 006 | 410713 | KPPBC MERAK | 59,000,000 |
| 006 | 532530 | KPPBC SOEKARNO HATTA | 23,750,313,957 |
| 007 | 411611 | KPPBC JAKARTA | 1,395,720,339 |
| 007 | 447532 | KPPBC MARUNDA | 887,786,918 |
| 008 | 410707 | KPPBC BANDUNG | 244,364,193 |
| 008 | 410722 | KPPBC BOGOR | 2,842,876,593 |
| 008 | 613281 | KPPBC PURWAKARTA | 3,515,962,764 |
| 008 | 636736 | KPPBC BEKASI | 7,487,938,988 |
| 009 | 410810 | KPPBC YOGYAKARTA | 15,588,000 |
| 009 | 411620 | KPPBC TANJUNG MAS | 985,623,416 |
| 010 | 410832 | KPPBC JUANDA | 819,741,000 |
| 010 | 410857 | KPPBC GRESIK | 24,599,734 |
| 010 | 411636 | KPPBC TANJUNG PERAK | 9,866,988,687 |
| 010 | 526856 | KPPBC PASURUAN | 183,454,200 |
| 012 | 411384 | KPPBC NGURAH RAI | 542,453,074 |
| 012 | 561115 | KPPBC BENOA | 55,990,000 |
| 013 | 411560 | KPPBC SINTETE | 10,602,772 |
| 013 | 411718 | KPPBC PONTIANAK | 31,210,000 |
| 014 | 411240 | KPPBC KOTABARU | 100,000,000 |
| 014 | 411259 | KPPBC BALIKPAPAN | 967,996,246 |
| 014 | 561288 | KPPBC SANGATA | 11,040,000 |
| 015 | 411296 | KPPBC BITUNG | 70,000,000 |
| 015 | 411300 | KPPBC MANADO | 10,500,000 |
| 015 | 411755 | KPPBC MAKASSAR | 177,875,906 |
| 016 | 411378 | KPPBC TERNADE | 21,180,000 |
| 017 | 447501 | KPU BC TANJUNG PRIOK | 38,232,512,474 |
| 018 | 447517 | KPU BC BATAM | 595,902,749 |
| JUMLAH | | | 120,513,982,283 |

9. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

1) Hibah pada DJP

Dana Hibah Indonesia: *Technical Assistance to Indonesia Tax Administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. TF 093998 Child Trust Fund-7 (CTF-7)*

Dana Hibah Indonesia: *Technical Assistance to Indonesia Tax Administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998 Child Trust Fund-7 (PFM-MDTF CTF-7)* merupakan program hibah yang digulirkan untuk tujuan reformasi administrasi perpajakan. Proyek yang didanai oleh hibah ini ditujukan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan guna mendukung PINTAR, peningkatan kapasitas manajemen proyek dan implementasi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas intelijen dan penyidikan pajak, serta *knowledge management*.

Nilai Dana Hibah ini adalah sebesar USD1,643,200.00 (amandemen ketiga). *Grant Agreement* ditandatangani dan mulai berlaku efektif tanggal 22 April 2009. *Closing date* dari *Trust Fund Grant No. 093998* adalah 31 Oktober 2012.

Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- *Consultancy Services for Independent Bid Evaluation (IBE);*
Jasa konsultansi *Independent Bid Evaluation (IBE)* bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan PINTAR sejalan dengan ketentuan yang berlaku (*World Bank Procurement Guidelines*). Konsultan IBE telah menyelesaikan evaluasi proposal Paket *Core Tax* dan evaluasi proposal teknis Paket *Owner's Agent*.
- *Change Management Consultancy Services to Support PINTAR;*
Jasa konsultansi *Change Management* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan oleh *Project Implementation Unit (PIU) DJP* dalam rangka mengimplementasikan PINTAR telah dilakukan berdasarkan pemahaman yang baik mengenai perlunya perubahan. Sehubungan dengan pembatalan pengadaan Paket Core Tax PINTAR, DJP mengajukan permohonan pembatalan kegiatan *Change Management* yang merupakan salah satu paket pendukung Core Tax. Permohonan pembatalan ini telah mendapatkan persetujuan dari *World Bank*.
- *Consultancy Services for Criminal Investigations;*
Jasa konsultansi *Criminal Investigation* bertujuan untuk melakukan *scoping* atas pengembangan proses bisnis yang dilakukan di Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan berfokus pada optimalisasi struktur organisasi, peningkatan pada manajemen sumber daya manusia, dan mendukung kebutuhan teknologi investigasi. Hasil yang diharapkan berupa analisis organisasi, struktur dan alur kerja, proposal proses otomasi, penilaian kebutuhan pelatihan, *public affairs* dan *outreach analysis*, serta *legal assistance review*. DJP telah mengajukan permohonan pembatalan kegiatan *Criminal Investigation* karena tujuan yg ingin dicapai dalam proyek ini telah *overlap* dengan kegiatan-kegiatan di bidang intelijen dan penyidikan yang telah dilaksanakan DJP sejak tahun 2007. Permohonan pembatalan ini telah mendapatkan persetujuan dari *World Bank*.

- *Knowledge Management Consultancy Services for The Development of Knowledge Management Strategy, Analysis, and Implementation Roadmap for DGT;*
Jasa konsultansi *Knowledge Management* dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional. Hasil yang diharapkan dari jasa konsultansi ini adalah *knowledge management strategy, organization impact document, knowledge management analysis document, implementation roadmap*, dan estimasi biaya penerapan *knowledge management system*. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.
- *Procurement Assistance Services;*
Jasa Konsultansi *Procurement Assistance Service* bertujuan melakukan asistensi terhadap PIU, Panitia Pengadaan, dan *Technical Team* selama tahap persiapan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.
- *Executive Program on Comparative Tax Policy and Administration;*
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperdalam pemahaman mengenai desain dan implementasi sistem perpajakan dalam tataran internasional. Pelatihan diikuti oleh tiga peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.
- *Duke University's Program on Tax Policy Analysis and Revenue Forecasting;*
Tujuan program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas *tax policy analysis* dan *revenue forecasting* bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan intensif selama empat minggu di Duke University, North Carolina, California, Amerika Serikat. Pelatihan diikuti oleh tiga peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Peserta pelatihan telah mengikuti program pada tanggal 24 Juni - 20 Juli 2012.
- *Project and Programme Management, Monitoring, and Control (SETYM International Training Center);*
Program pelatihan *Project and Programme Management, Monitoring, and Control* bertujuan untuk memberikan pandangan global dan prosedur khusus dalam perencanaan, *monitoring*, dan proses kontrol dengan menekankan pada langkah-langkah penting yang harus dicapai serta penyiapan aspek-aspek pendukung pelaksanaan proyek. Kegiatan telah dilaksanakan di SETYM International Training Center, Montreal, Kanada dan diikuti oleh dua peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Peserta pelatihan telah mengikuti program sejak tanggal 2 Juli s.d. 20 Juli 2012.
- *Project and Programme Impact Assessment (SETYM International Training Center);*
Program pelatihan *Project and Programme Impact Assessment* bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kerangka kerja dan proses evaluasi di dalam proyek serta menetapkan posisi penilaian dampak proyek. Kegiatan telah dilaksanakan di SETYM International Training Center, Montreal, Kanada dan diikuti oleh dua peserta dari Direktorat Jenderal Pajak. Peserta pelatihan telah mengikuti program sejak tanggal 20 Agustus s.d. 31 Agustus 2012.

2) Hibah Pada Ditjen Perimbangan Keuangan

Pada tahun 2012 Ditjen Perimbangan Keuangan menerima hibah langsung dari luar negeri berbentuk jasa atau *technical assistance*. Daftar hibah tersebut adalah:

a. *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)*

Hibah diperoleh dari *Australian Aid (AusAID)* untuk mendukung program *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)* dengan nomor register 71483301. Sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-1/PK.1./2013, pada tahun 2012 AusAID menyerahkan hibah langsung dalam bentuk jasa senilai Rp7.588.645.230,00.

b. *Desentalisastion as Contribution to Good Governance (GIZ-DeCGG)*

Hibah diperoleh dari *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* untuk mendukung program *Decentalisastion as Contribution to Good Governance (GIZ-DeCGG)* dengan nomor register 72234001. Sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-9/PK.1./2013, pada tahun 2012 AusAID menyerahkan hibah langsung dalam bentuk jasa senilai Rp5.435.927.000,00.

3) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada Badan Kebijakan Fiskal

Dalam rangka membantu penyempurnaan manajemen keuangan Pemerintah Indonesia, Word Bank telah memberikan pinjaman dengan nomor PHLN LN/Cr 4762-IND dan 4026-IDA: *Government Financial Management and Revenue administion Project (GFMRAP)* sebesar USD1.661.730,32 setara dengan Rp15.121.745.912,00 (US\$1 = Rp9.100).

Pinjaman tersebut berlaku efektif mulai tanggal 22 Maret 2005 dan mempunyai *closing date* tanggal 31 Desember 2013 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 10694001 dan 10695701.

Pada Tahun Anggaran 2012, BKF mempunyai pagu anggaran untuk kegiatan GFMRAP sebesar Rp1.436.745.000. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.200.466.267 atau 83,55 persen, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp236.278.733. Realisasi anggaran untuk kegiatan GFMRAP tersebut digunakan untuk membiayai beasiswa tugas belajar 7 pegawai BKF, dengan rincian :

- Program S2 = 3 orang di Jepang
- Program S3 = 4 orang di Australia, Jerman dan Universitas Indonesia

Sampai dengan akhir tahun 2012, realisasi pinjaman GFMRAP adalah sebagai berikut :

| Pinjaman | | Realisasi |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Rp | Total | Rp |
| Rp 15.121.745.912 | | Rp 13.620.562.202 |
| | Tahun 2005 | Rp - |
| | Tahun 2006 | Rp 2.264.060.478 |
| | Tahun 2007 | Rp 3.238.201.236 |
| | Tahun 2008 | Rp 1.848.740.727 |
| | Tahun 2009 | Rp 1.880.579.127 |
| | Tahun 2010 | Rp 1.278.808.438 |
| | Tahun 2011 | Rp 1.909.705.929 |
| | Tahun 2012 | Rp 1.200.466.267 |

Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF : Hibah TA ADB 4872-INO (70712601)

Dalam rangka membantu penyediaan infrastruktur di Indonesia, World Bank melalui Asian Development Bank berkomitmen untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk *Technical Assistance* dengan nomor PHLN 4872-INO : *Enhancing Private Sector Participation in Infrastructure Provision.*

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 12 April 2007 dan mempunyai *closing date* tanggal 31 November 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa *closing date sampai dengan* tanggal 30 September 2012. Hibah dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 70712601.

Pada Tahun Anggaran 2012 pagu anggaran untuk Hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO sebesar Rp3.348.763.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp1.336.754.000,00.
2. Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.913.094.000,00.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.915.000,00.

Dari anggaran tersebut tidak ada yang dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 dengan total pengeluaran sebesar US\$258,654.82 baru mendapat pengesahan dari negara donor pada tanggal 18 Desember 2012. Sedangkan batas akhir pengajuan SP3HL-BJS ke Direktorat EAS DJPU adalah tanggal 18 Desember 2012.

Adapun kegiatan yang telah mendapat pengesahan dari negara donor tersebut adalah :

1. *Training/Workshop* dengan jumlah pengesahan sebesar RpUS\$143,259.74.
2. Jasa Konsultan dengan jumlah pengesahan sebesar US\$115,395.08.

Sampai dengan akhir tahun 2012, realisasi hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO adalah sebagai berikut :

| Mata Uang | Rupiah | USD |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total Hibah | 13.517.560.000 | 1.469.300,00 |
| Total Realisas i | 8.874.708.013 | 931.111,69 |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | 3.731.850.491 | 373.185,05 |
| 2010 | 3.305.916.857 | 359.338,79 |
| 2011 | 1.836.940.665 | 198.587,85 |
| 2012 | - | - |
| Sisa Hibah | 4.642.851.987 | 538.188,31 |

4) Bantuan Tenaga Ahli Luar Negeri pada Bapepam-LK

Pada tahun anggaran 2012, Bapepam-LK menerima bantuan dari luar negeri berupa tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Negara Asing/Donor | Jenis Bantuan | Proyek | Periode | Konsultan |
|-----|---|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| 1. | <i>The Australian Government overseas aid program (AusAID)</i> | <i>Technical Assistance of AIPEG</i> | <i>Australian Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)</i> | - | Gavin Forte |
| 2. | <i>Asian Development Bank (ADB)*</i> | <i>Technical Assistance</i> | <i>TA 7466-INO: Strengthening Indonesia's Capital Market</i> | 2011 – 2013 | Fariz Rabidin |
| 3. | <i>United States Agency for International Development (USAID)</i> | <i>Technical Assistance</i> | <i>Support for Economic Analysis and Development in Indonesia (SEADI)</i> | 16 Mar 2011 – 31 Agt 2014 | James R Hamburic |

Bantuan dari luar negeri berupa tenaga ahli tersebut diatas tidak masuk dalam DIPA Bapepam-LK.

5) Hibah pada Ditjen Anggaran

Realisasi Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp1.520.110.451,00 dipergunakan untuk :

1. *Workshop* Penerapan KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerja
2. *Study Visit* ke Luar Negeri
3. Jasa Konsultan

10. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan OJK

Pasca disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 November 2011 (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK mulai berkoordinasi untuk membangun OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali.

Berdasarkan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 UU tersebut di atas, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Sementara itu, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka per 31 Desember telah diterbitkan Laporan Penutup Bapepam-LK untuk selanjutnya akan dilakukan proses likuidasi dan diakhiri dengan penerbitan Laporan Likuidasi Bapepam-LK.

11. Hal-hal terkait Konsolidasi

Hal-hal terkait Konsolidasi

Berkaitan dengan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 TA 2012 menjadi Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012 (*Audited*), terdapat kebijakan akuntansi yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada nilai pos-pos tertentu. Adapun kebijakan akuntansi dilakukan melalui jurnal penyesuaian konsolidasi.

Koreksi reklasifikasi transaksi internal Kementerian Keuangan berupa Aset Tetap Renovasi ke akun Gedung dan Bangunan dirinci sebagai berikut:

| No. | Eselon 1 | Koreksi Reklasifikasi ATR ke Gedung dan Bangunan |
|--------|----------|--|
| 01 | SETJEN | 21.252.829.142 |
| 02 | ITJEN | (1.405.688.299) |
| 03 | DJA | (5.698.431.056) |
| 04 | DJP | 1.907.638.259 |
| 06 | DJKPK | (12.900.832.453) |
| 07 | DJPU | 23.441.964 |
| 08 | DJPB | (619.442.000) |
| 09 | DJKN | (818.273.900) |
| 11 | BPPK | (1.741.241.657) |
| Jumlah | | 0 |

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

E.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI terlampir.

E.2. Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata sampai dengan 31 Desember 2012 adalah 5.663 rekening dengan rincian 5.646 rekening senilai Rp15.663.404.471.424,60 dan 9 rekening senilai US\$1.210.960,25. Perkembangan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 148 berikut.

Tabel 148
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

| No. | Pengelompokan Rekening | per 30 Juni 2011 | | | | per 31 Desember 2011 | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| | | Rek. | Rupiah | Rek. | Dolar | Rek. | Rupiah | Rek. | Dolar |
| <i>I. Dipertahankan</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Rek. Bend. Penerimaan | 15 | 52.871.748.211,78 | 1 | 1.966,94 | 10 | 7.146.701.582,88 | 0 | 0,00 |
| 2. | Rek. Bend. Pengeluaran | 1.125 | 176.534.281.454,56 | - | - | 1.138 | 3.768.524.541,50 | 0 | 0,00 |
| 3. | Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (Diusulkan menjadi BLU) | 92 | 14.454.542.833.412,70 | 1 | 200.266,24 | 3 | 17.447.292.532,00 | 1 | 200.266,24 |
| 4. | Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga | 46 | 155.985.725.409,14 | - | - | 52 | 164.678.166.841,73 | 0 | 0,00 |
| 5. | Rek. Penampungan Dana Titipan | 1 | 154.505.800,00 | - | - | 1 | 707.275.349,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat | - | - | 2 | 0,23 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 7. | Rek. Penerimaan Non DIPA | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rek. Aktif Lainnya | 4.367 | 823.315.377.136,45 | 5 | 1.008.726,84 | 2.590 | 718.376.790.669,38 | 5 | 1.003.858,10 |
| Sub Total | | 5.646 | 15.663.404.471.424,60 | 9 | 1.210.960,25 | 3.794 | 912.124.751.516,49 | 8 | 1.204.124,34 |
| <i>II. Ditutup</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Ditutup setor ke Kas Negara | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.914 | 391.755.263.543,13 | 2 | 0,00 |
| 2. | Ditutup setor ke Non Kas Negara | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 313 | 18.746.180.248,11 | 0 | 0,00 |
| 3. | Ditutup digabung ke rekening pemerintah lainnya | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 191 | 1.944.156.528,16 | 0 | 0,00 |
| 4. | Ditutup setor ke Kas Negara dan Non Kas Negara | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2.190,29 | 0 | 0,00 |
| Sub Total | | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 2.422 | 412.445.602.509,69 | 2 | 0,00 |
| 1. | Penutupan yang belum/tidak dilaksanakan | 0 | 0,00 | | | 178 | 31.112.535.666,76 | | |
| 2. | Tidak jelas identitas pemilik rekening | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 3. | Pembahasan deadlock (dokumen/informasi tidak lengkap) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Sub Total | | 0 | 0,00 | | | 178 | 31.112.535.666,76 | | |
| Total | | 5.657 | 15.663.404.471.424,60 | 9 | 1.210.960,25 | 3.794 | 912.124.751.516,49 | 10 | 1.204.124,34 |

Rincian mutasi rekening Kementerian Keuangan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012.

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

E.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual terdiri dari:

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambahan pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Pendapatan dan belanja secara akrual tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 149 berikut.

Tabel 149
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

| Pendapatan / Belanja | Realisasi Menurut Basis Kas (Rp) | Penyesuaian Akrual (Rp) | | Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | Tambah | Kurang | |
| A. Pendapatan Negara dan Hibah | | | | |
| I. Penerimaan Perpajakan | 980,470,822,097,887 | 30,544,400,996,580 | 22,732,742,890,834 | 988,282,480,203,632 |
| 1. Pajak Dalam Negeri | 930,855,230,106,189 | 30,217,492,161,366 | 22,446,689,845,706 | 938,626,032,421,848 |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional | 49,615,591,991,698 | 326,908,835,214 | 286,053,045,128 | 49,656,447,781,784 |
| II. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2,359,109,958,283 | 38,596,693,795 | 45,928,145,293 | 2,351,778,506,785 |
| 1. Penerimaan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pendapatan PNBP Lainnya | 856,424,264,729 | 34,607,349,343 | 41,783,695,293 | 849,247,918,779 |
| 4. Pendapatan Badan Layanan Umum | 1,502,685,693,554 | 3,989,344,452 | 4,144,450,000 | 1,502,530,588,006 |
| III. Penerimaan Hibah * | | | | |
| Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah | 982,829,932,056,170 | 30,582,997,690,375 | 22,778,671,036,127 | 990,634,258,710,417 |
| B. Belanja Negara | | | | |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 16,325,448,043,171 | 30,396,627,665 | 21,156,596,009 | 16,334,688,074,827 |
| 1. Belanja Pegawai | 7,976,346,217,823 | 2,467,738,168 | 2,030,701,642 | 7,976,783,254,349 |
| 2. Belanja Barang | 6,097,847,421,003 | 15,175,713,297 | 18,639,071,147 | 6,094,384,063,153 |
| 3. Belanja Modal | 1,635,619,657,094 | 37,918,833 | 486,823,220 | 1,635,170,752,707 |
| 4. Pembayaran Bunga Utang | 615,634,747,251 | 12,715,257,368 | 0 | 628,350,004,619 |
| 5. Belanja Hibah * | | | | |
| 6. Subsidi | | | | |
| 7. Bantuan Sosial | | | | |
| 8. Belanja Lain - lain | | | | |
| II. Transfer ke Daerah | | | | |
| 1. Dana Perimbangan | | | | |
| a. Dana Bagi Hasil | | | | |
| b. Dana Alokasi Umum | | | | |
| c. Dana Alokasi Khusus | | | | |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | | | | |
| a. Dana otonomi Khusus | | | | |
| b. Dana penyesuaian | | | | |
| Jumlah Belanja Negara | 16,325,448,043,171 | 30,396,627,665 | 21,156,596,009 | 16,334,688,074,827 |

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 menurut basis kas adalah sebesar Rp982.829.932.056.170,00 terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp30.582.997.690.375,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp22.778.671.036.127,00. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi pendapatan TA 2012 secara akrual adalah sebesar Rp990.634.258.710.417,00.
2. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 menurut basis kas adalah sebesar Rp16.325.448.043.171,00 terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp30.396.627.665,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp21.156.596.009,00. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi belanja TA 2012 secara akrual adalah sebesar Rp16.334.688.074.827,00. Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual terlampir.

E.4. Barang Tegahan

Daftar Barang Tegahan DJBC lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

E.5. Barang Sitaan

Daftar Barang Sitaan DJP lingkup Kementerian Keuangan terlampir

E.6. Rekapitulasi Piutang Negara Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang aktif diurus oleh PUPN/DJKN

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara kepada DJKN per 31 Desember 2012 sebesar Rp41.849 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Piutang yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah | Rp41.848 miliar |
| 5. Piutang yang diserahkan oleh Lembaga Negara (semua lembaga Negara selain kementerian) | Rp 1,11 miliar |

Rekapitulasi Piutang Negara dapat dilihat pada tabel 150 berikut.

Tabel 150
Rekapitulasi Piutang Negara
Per 31 Desember 2012

(dalam jutaan rupiah)

| NO | URAIAN | PIUTANG NEGARA | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------|--------|---------------|
| | | INSTANSI PEMERINTAH | | LEMBAGA NEGARA | | JUMLAH | |
| | | BKPN | NILAI | BKPN | NILAI | BKPN | NILAI |
| 1 | Saldo Awal (1 Januari 2012) | 23,141 | 38,091,744.04 | 20 | 1,027.45 | 23,161 | 38,092,771.49 |
| 2 | Mutasi Tambah | 3,013 | 4,337,292.47 | 7 | 82.87 | 3,020 | 4,337,375.34 |
| | Jumlah | 26,154 | 42,429,036.51 | 27 | 1,110.32 | 26,181 | 42,430,146.83 |
| 3 | Mutasi Kurang | 2,872 | 581,067.54 | 0 | 1.08 | 2,872 | 581,068.62 |
| 4 | Saldo Akhir (31 Desember 2012) | 23,282 | 41,847,968.97 | 27 | 1,109.24 | 23,309 | 41,849,078.21 |

Saldo awal Piutang Negara merupakan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang belum selesai per 1 Januari 2012 sebanyak 23.161 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) senilai Rp38.093 miliar . Mutasi tambah berasal dari SP3N selama tahun 2012 sebanyak 3.020 BKPN senilai Rp4.337 miliar, sedangkan mutasi kurang berasal dari Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), Piutang Sementara Belum dapat Ditagih (PSBDT), Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS), Surat Pengembalian,Pembayaran, dan Koreksi sebanyak 2.872 BKPN senilai Rp581 miliar. Sehingga saldo akhir piutang Negara 31 Desember 2012 adalah sebanyak 23.309 BKPN senilai Rp41.849 miliar.

E.7. Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2012

Jumlah Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2012 sebanyak 10.115 senilai Rp1.847 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Barang Bergerak sebanyak 4.017
2. Barang Tidak Bergerak sebanyak 6.098

Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan dapat dilihat pada tabel 151 berikut.

Tabel 151
Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan BKPN
Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

| NO | KPKNL | Barang Bergerak | Barang Tidak bergerak | Jml Barang Jaminan | Nilai Barang Jaminan |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | KPKNL Banda Aceh | 82 | 28 | 110 | 64,272,250,000 |
| 2 | KPKNL Lhokseumawe | 225 | 212 | 437 | 1,175,010,000 |
| 3 | KPKNL Medan | 373 | 137 | 510 | 400,000,000 |
| 4 | KPKNL P. Siantar | 44 | 47 | 91 | 290,741,128 |
| 5 | KPKNL Kisaran | 61 | 52 | 113 | 899,366,394 |
| 6 | KPKNL Padang | 14 | 2 | 16 | - |
| 7 | KPKNL Pekanbaru | 47 | 60 | 107 | 308,400,000 |
| 8 | KPKNL Jambi | 14 | - | 14 | - |
| 9 | KPKNL Palembang | 9 | 33 | 42 | 51,500,000 |
| 10 | KPKNL B. Lampung | 24 | 174 | 198 | 1,310,000,000 |
| 11 | KPKNL Metro | 3 | 47 | 50 | 101,000,000 |
| 12 | KPKNL Serang | - | 9 | 9 | - |
| 13 | KPKNL Tangerang | 32 | 821 | 853 | 322,839,600 |
| 14 | KPKNL Serpong | 191 | 1,178 | 1369 | 41,366,349,191 |
| 15 | KPKNL Jakarta I | 24 | 67 | 91 | 463,775,120,000 |
| 16 | KPKNL Jakarta II | 43 | 91 | 134 | 349,212,672,725 |
| 17 | KPKNL Jakarta III | 24 | 56 | 80 | 38,798,512,562 |
| 18 | KPKNL Jakarta IV | 54 | 206 | 260 | 5,470,677,750 |
| 19 | KPKNL Jakarta V | 734 | 981 | 1715 | 832,848,815,749 |
| 20 | KPKNL Bandung | 330 | 156 | 486 | 5,799,061,000 |
| 21 | KPKNL Bekasi | 13 | 14 | 27 | 882,381,000 |
| 22 | KPKNL Bogor | 266 | 41 | 307 | 2,106,326,529 |
| 23 | KPKNL Purwakarta | 43 | 39 | 82 | 750,075,580 |
| 24 | KPKNL Tasikmalaya | - | 7 | 7 | 219,993,000 |
| 25 | KPKNL Cirebon | 2 | 20 | 22 | 400,000,000 |
| 26 | KPKNL Semarang | 11 | 207 | 218 | 95,700,000 |
| 27 | KPKNL Surakarta | 6 | 59 | 65 | 545,000,000 |
| 28 | KPKNL Pekalongan | - | 11 | 11 | 16,320,000 |
| 29 | KPKNL Tegal | 1 | 2 | 3 | - |
| 30 | KPKNL Yogyakarta | - | 3 | 3 | - |
| 31 | KPKNL Surabaya | 163 | 140 | 303 | 7,758,000,000 |
| 32 | KPKNL Sidoarjo | 7 | 72 | 79 | 593,608,239 |
| 33 | KPKNL Malang | 28 | 62 | 90 | 525,000,000 |
| 34 | KPKNL Jember | 15 | 11 | 26 | 90,940,000 |
| 35 | KPKNL Pamekasan | 3 | 1 | 4 | - |
| 36 | KPKNL Madiun | 1 | 3 | 4 | - |
| 37 | KPKNL Pontianak | 3 | 1 | 4 | - |
| 38 | KPKNL Singkawang | 6 | 22 | 28 | 302,600,000 |
| 39 | KPKNL Banjarmasin | 2 | 46 | 48 | 232,000,000 |
| 40 | KPKNL Balikpapan | 4 | - | 4 | - |
| 41 | KPKNL Samarinda | 6 | 1 | 7 | - |
| 42 | KPKNL Tarakan | - | 9 | 9 | 490,000,000 |
| 43 | KPKNL Denpasar | 23 | 15 | 38 | - |
| 44 | KPKNL Singaraja | 11 | 18 | 29 | 1,489,281,000 |
| 45 | KPKNL Mataram | 52 | 23 | 75 | 888,436,000 |
| 46 | KPKNL Kupang | 1 | 5 | 6 | - |
| 47 | KPKNL Makassar | 200 | 270 | 470 | 16,109,749,200 |
| 48 | KPKNL ParePare | 54 | 9 | 63 | 1,358,844,600 |
| 49 | KPKNL Palopo | 22 | 36 | 58 | 4,637,327,445 |
| 50 | KPKNL Kendari | - | 2 | 2 | 3,221,000 |
| 51 | KPKNL Manado | 746 | 561 | 1307 | 1,038,900,000 |
| 52 | KPKNL Gorontalo | - | 29 | 29 | - |
| 53 | KPKNL Ambon | - | 2 | 2 | 80,000,000 |
| | Jumlah | 4,017 | 6,098 | 10,115 | 1,847,016,019,692 |



Kemepterian KEUANGAN RI



Integritas - Profesionalisme - Sinergi - Pelayanan - Kesempurnaan